

# **PERSEPSI MASYARAKAT BALI TERHADAP SISTEM NILAI RUANG TERBUKA TRADISIONAL DI KOTA DENPASAR**

## **TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

**I NENGAH SUDATA**  
NIM : L4D000188



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka

Semarang,     September 2002

I NENGAH SUDATA  
NIM L4D000188

**PERSEPSI MASYARAKAT BALI TERHADAP SISTEM NILAI  
RUANG TERBUKA TRADISIONAL DI KOTA DENPASAR**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

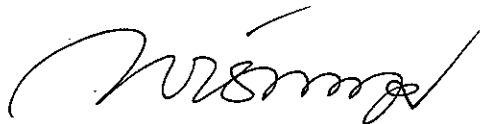
Oleh :  
**I NENGAH SUDATA**  
L4D000188

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 23 September 2002

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, September 2002

Pembimbing Pendamping



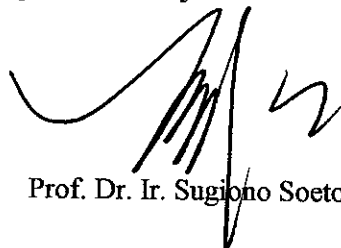
Ir. Wisnu Pradoto, MT

Pembimbing Utama



Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

*Pikiran dan tingkah laku kami tenang dan segar.  
Kami menunjukkan sikap ramah kepada orang lain.  
Kami toleran terhadap orang lain; terhadap kekurangan-  
kekurangan dan kesalahan-kesalahan mereka.  
Kami memandang sikap mereka dengan hati yang lapang.*

*Kami berlaku dan bertindak seakan-akan apa yang  
kami jadikan sasaran pasti akan tercapai.  
Kami memang individu yang sesuai dengan idaman kami,  
citra tersebut terpantul dalam setiap perbuatan kami.*

*Kami tidak akan mengijinkan pertimbangan maupun  
sikap kami dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif  
ataupun pesimistis.*

*Kami memberikan reaksi dengan cara yang tenang  
dan bijaksana dalam keadaan apapun.  
Kalaupun kami tidak dapat menguasai suatu keadaan  
kami selalu akan berusaha memberikan reaksi  
dengan cara positif terhadap fakta-fakta negatif sekalipun.  
[LPCD]*

*Aum A No Bradrah Kratawo Wiswatah  
Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah.  
[R.W. 1. 89.1]*

*Tesis ini kupersembahkan kepada Bapak (alm), Ibu,  
istri yang tercinta Ni Ketut Sukarmi dan putri  
yang tersayang Ni Luh Putu Erayanti; karena  
dengan pengorbanannyaalah karya ini dapat terwujud.*

## ABSTRAK

Ruang terbuka merupakan elemen kota yang secara fisik maupun sosial bermanfaat dan berperan penting dalam kehidupan kota yang berkelanjutan. Perkembangan fungsi ruang terbuka perlu diatur sehingga terbentuk keselarasan berbagai aspek kehidupan kota. Di Propinsi Bali pada umumnya terdapat ruang terbuka yang merupakan komponen ruang permukiman tradisional Bali disebut natah (setara dengan ruang terbuka pekarangan); telajakan (setara dengan sempadan pagar); radius kesucian pura (setara dengan sempadan pura), setra (setara dengan tempat pemakaman) dan alun-alun (setara dengan taman, lapangan umum). Fenomena yang terlihat bahwa tingkat urbanisasi yang pesat di Kota Denpasar mengakibatkan pesatnya kegiatan pemanfaatan ruang. Pesatnya kegiatan pemanfaatan ini mendesak ruang terbuka sehingga terjadi perubahan-perubahan ruang terbuka di Kota Denpasar. Tingkat perubahan ruang terbuka tradisional bervariasi karena ruang terbuka tradisional mempunyai sistem nilai; ada nilai-nilai yang masih dipertahankan dan ada nilai-nilai yang telah diabaikan oleh masyarakat Bali.

Tujuan studi ini untuk mengetahui persepsi masyarakat Bali terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional dengan mengidentifikasi perubahan sistem nilai yang diterapkan sampai saat ini; keinginan untuk menerapkan sistem nilai; analisis dan mengambil kesimpulan keberadaan sistem nilai ruang terbuka tradisional.

Penelitian dilaksanakan di Kota Denpasar; khususnya di Desa Adat Denpasar dengan pertimbangan lokasi ini mewakili permasalahan yang sesuai dengan tema yang diangkat yakni sistem nilai ruang terbuka tradisional. Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, observasi lapangan dan suvey primer persepsi masyarakat terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional. Sampel diambil berdasarkan sampling purposif dimana responden adalah kelian (ketua) banjar adat dan beberapa tokoh masyarakat. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif normatif, dan kuantitatif sederhana. Perubahan dan keberadaan sistem nilai dikaji berdasarkan acuan nilai-nilai ruang terbuka tradisional.

Ditemukan bahwa nilai-nilai natah yang masih dipertahankan oleh masyarakat Bali adalah: penataan berdasarkan tata nilai tri mandala; bangunan berorientasi kedalam natah; berfungsi tempat upacara agama; simbol pertemuan langit dan tanah. Penggunaan sikut telah diabaikan oleh masyarakat Bali dan lengkapnya bangunan tradisional pada natah telah berubah dari 9 unit menjadi 4 – 5 unit bangunan tradisional. Nilai-nilai telajakan seluruhnya tetap dipertahankan oleh masyarakat Bali; pengadaannya oleh pemilik bangunan, ditanami tanaman penunjang upacara agama, dan pemeliharannya oleh pemilik bangunan. Sebagian besar masyarakat tidak sependapat dengan radius kesucian Pura Dang Kahyangan karena dinilai terlalu luas cakupannya, namun radius kesucian Pura Kahyangan Desa dapat diterima oleh masyarakat Bali. Nilai-nilai setra seluruhnya masih dipertahankan : merupakan komponen desa adat, sebagai media upacara ngaben, dan adanya syarat-syarat tertentu dalam penggunaannya. Nilai-nilai dari alun-alun juga seluruhnya dipertahankan oleh masyarakat Bali : sebagai peninggalan sejarah, sebagai pelengkap catus patha, dan fungsi tempat tawur kesanga.

Diusulkan kepada Pemerintah Kota Denpasar agar hasil penelitian ini dijadikan dasar dalam penataan kota, khususnya penataan ruang terbuka; dan sebagai bahan kajian dalam pembangunan kota, terutama dalam perencanaan dan perancangan kota.

Kata kunci : sistem nilai, tradisional, ruang terbuka

## ABSTRACT

*The open space is one of the city's element that physically and socially has benefit and important role in the sustainable of city life. Actually, the development of open space function need to be arranged, so there will be a harmonious in many aspect of city life. Generally, in the province of Bali there are many open space that will be arranged as a component of Bali's traditional housing area, usually local people call it natah (equal with open space in the yard); telajakan (equal with fence border); pura holy area (equal with pura's border), setra (equal with cemetery area) and town centre park (equal with park, public square). The phenomenon shows that the increasing of urbanization at Denpasar resulted the increasing of space using activity. This using activity forces the open space so there are open space changes at Denpasar City. The level of traditional open space changes are various because the traditional open spaces have it own value system; there are values that still be hold and there are many values that had been ignored by the people of Bali.*

*The aims of this study is to describe the Bali society's perception to the values system of traditional open space by identified the changes of value system applied at this present time; the willingness to apply the value system; analysis and conclusion about the existence of the traditional value system of open space.*

*This research is conducted in Kota Denpasar; especially at Desa Adat Denpasar, considering that this location could represent the problems according to the theme that discussed, that is the traditional value system of open space. The activities of this research was conducted by library system, field observation and primary survey of society perception of the traditional value system of open space. The samples taken according to the purposive sampling, the respondents are traditional neighborhood kelian (the traditional leader) and some of society prominent figures. The analysis was conducted by normative descriptive and simple quantitative methods. The changes and the existence of the value system was studied according to the references of traditional values of open space.*

*From the research was found that the natah values that still be applied by the people of Bali are : the arrangement according to the tri mandala values; the building inside orientated to the natah; functioned as a religion ceremony location; the symbol of the companionship between the heavens and the earth. The using of sikut had been neglected by Bali's people; and the completeness of the traditional building at natah have been changes from nine to four or five traditional buildings. Telajakan values still be hold by Bali's people : that is the procurement by the owner of building, was planted with the supporting plants along the religion ceremony, and the treatments was done by the building owner. Most of the Bali's people disagree with the holy area of Pura Dang Kahyangan because it was considered that the scope is too large, but the holy area of Pura Kahyangan Desa could be accepted by the Bali's People. All of setra values that still be applied : they are the components of traditional village, such as traditional ngaben ceremony, and the existence of the specific requirements in application. The whole values of the central park area is also still be applied by Bali's people : as an historical area, as a compliment of catus patha, and as the function of tawur kesanga area.*

*Output of these research recommended for the urban government of Denpasar as basic in urban plan especially in urban open space plan; as discussion matter in urban development especially in urban design and urban planning.*

**Key word :** open space, traditional, value system

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, bahwa dengan rahmat, karunia serta petunjukNyalah kami dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Adapun tema yang kami angkat dalam tesis ini adalah tema ruang terbuka dengan judul “ Persepsi Masyarakat Bali Terhadap Sistem Nilai Ruang Terbuka Tradisional di Kota Denpasar”. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian pendidikan Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan tesis ini banyak mendapat bantuan dan dukungan dari dosen pembimbing (Mentor dan Co-Mentor), para dosen pengampu di MTPK-UNDIP dan teman mahasiswa Reguler V MTPK-UNDIP. Pada kesempatan ini kami ucapakan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, DEA. selaku Ketua Jurusan MTPK dan dosen pembina Mata Kuliah Pra Tesis dan Seminar yang telah banyak memberikan arahan ;
2. PM. Brotosunaryo, SE, MSP. selaku dosen Mata Kuliah Pra Tesis dan Seminar yang telah banyak memberikan arahan, prosedur dalam penyusunan tesis ini;
3. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc. selaku dosen koordinator Mata Kuliah Pra Tesis dan Seminar dan sekaligus dosen pembimbing (Mentor) yang telah banyak memberi arahan pemikiran dan masukan dalam penyusunan tesis ini;
4. Ir. Wisnu Pradoto, MT selaku dosen pembimbing (Co-Mentor) yang telah banyak memberi arahan pemikiran dan masukan dalam penyusunan tesis ini;
5. Ir. Nany Yuliasuti, MSP selaku dosen pembahas yang telah banyak memberi arahan pemikiran dan masukan dalam penyusunan tesis ini;
6. Ir. Djoko Suwandono, MSP selaku dosen penguji yang telah banyak memberi arahan pemikiran dan masukan dalam penyusunan tesis ini;
7. Seluruh dosen pengampu dilingkungan MTPK-UNDIP;
8. Seluruh Staf Administrasi dilingkungan MTPK-UNDIP;
9. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Bali yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan ini;
10. Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan ini;
11. Bapak Ir Nyoman Gelebet, M.Si, Ir. I Gusti Made Putra, M.Si, Ir. Putu Rumawan Salain, M Si, Ir. I Gusti Putu Anindya Putra, MSP, Ir. I Gusti Bagus Agung Suteja, MM masing-masing selaku nara sumber dalam penelitian ini;
12. Pemimpin Proyek/Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (PPSDM) P3KT-BUIP Loan IBRD 4155-IND sebagai penyandang dana dari kegiatan pendidikan ini;
13. Bapak Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia Kota Denpasar yang telah banyak memberikan masukan terkait dengan ruang terbuka tradisional;
14. Bapak Kepala Desa Adat Denpasar yang telah banyak memberikan masukan dan informasi dalam penelitian ini;
15. Para Kepala Lingkungan/ Kelian Banjar Dinas yang berada dilingkungan Desa Adat yang telah banyak membantu kelancaran dalam penelitian ini;
16. Seluruh perangkat Desa Adat dan seluruh *Kelian* (ketua) Banjar Adat dilingkungan Desa Adat Denpasar selaku responden dalam penyusunan tesis ini;

17. Rekan-rekan Reguler V MTPK-UNDIP yang telah banyak memberikan masukan, dorongan moral dan spiritual;

18. Semua pihak terkait yang tak dapat kami sebutkan satu persatu

Kami menyadari penulisan ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran sangat kami harapkan demi sempurnanya penelitian dan penyusunan tesis ini.

Semarang, September 2002

Penyusun.



# DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2 Rumusan Masalah.....	7
	1.3 Tujuan dan Sasaran Studi .....	7
	1.3.1 Tujuan Studi .....	7
	1.3.2 Sasaran Studi .....	8
	1.4 Ruang Lingkup .....	8
	1.4.1 Lingkup Substansial .....	8
	1.4.2 Lingkup Spasial .....	9
	1.5 Kerangka Pemikiran .....	9
	1.6 Metode Penelitian .....	12
	1.6.1 Pendekatan Studi .....	12
	1.6.2 Metode Pelaksanaan Studi .....	12
	1.6.3 Kebutuhan Data .....	13
	1.6.4 Teknik Pengumpulan Data .....	14
	1.6.5 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data .....	15
	1.6.6 Teknik Sampling .....	15
	1.6.7 Teknik Analisis .....	16
	1.7 Sistematika Penulisan .....	16

<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT, KONSEP RUANG TERBUKA TRADISIONAL DAN KONSEP RUANG TERBUKA NON TRADISIONAL .....</b>	<b>18</b>
	2.1 Pengertian Persepsi Masyarakat .....	18
	2.2 Konsep Ruang Terbuka Tradisional .....	21
	2.2.1 Jenis-jenis Ruang Terbuka Tradisional .....	21
	2.2.2 Fungsi Ruang Terbuka Tradisional .....	23
	2.2.3 Penataan Ruang Terbuka Tradisional.....	24
	2.3 Konsep Ruang Terbuka Non Tradisional .....	40
	2.3.1 Pengertian dan Jenis Ruang Terbuka Non Tradisional .....	40
	2.3.2 Fungsi Ruang Terbuka Non Tradisional .....	44
	2.3.3 Penataan Ruang Terbuka Non tradisional.....	45

2.4	Rangkuman .....	49
2.4.1	<i>Natah</i> .....	49
2.4.2	<i>Telajakan</i> .....	50
2.4.3	Radius Kesucian Pura.....	50
2.4.4	<i>Setra</i> .....	52
2.4.5	Alun-alun.....	52
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN RUANG TERBUKA DI KOTA DENPASAR...</b>	54
3.1	Ruang Terbuka di Kota Denpasar.....	54
3.2	Ruang Terbuka Di Desa Adat Denpasar.....	58
3.3	Rangkuman.....	74
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENDAPAT DAN KEINGINAN MASYARAKAT BALI TERHADAP NILAI-NILAI RUANG TERBUKA .....</b>	76
4.1	Analisis Kondisi dan Keinginan Masyarakat Bali Terhadap Nilai- nilai Ruang Terbuka Tradisional.....	76
4.1.1	<i>Natah</i> .....	76
4.1.2	<i>Telajakan</i> .....	86
4.1.3	Radius Kesucian <i>Pura</i> .....	89
4.1.4	<i>Setra</i> .....	93
4.1.5	Alun-alun.....	94
4.2	Pendapat dan Keinginan Masyarakat Bali Terhadap Nilai-nilai Ruang Terbuka Non Tradisional.....	95
4.3	Prospek dan Implikasi.....	97
4.3.1	Di Desa Adat Denpasar.....	97
4.3.2	Prospek dan Implikasi Terhadap Kota Denpasar.....	100
4.3.3	Prospek dan Implikasi Terhadap Kota-Kota di Bali.....	103
4.4	Rangkuman.....	104
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	108
5.1	Kesimpulan .....	108
5.2	Rekomendasi .....	110
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	114
	<b>LAMPIRAN .....</b>	117

## DAFTAR TABEL

Tabel :	I.1	Kebutuhan Data.....	13
Tabel :	I.2	Penentuan Jumlah Sampel Penelitian.....	15
Tabel :	II.1	<i>Tri Hita Karana</i> Dalam Susunan Kosmos.....	27
Tabel :	II.2	<i>Tri Angga</i> Dalam Susunan Kosmos.....	27
Tabel :	II.3	Daftar Klasifikasi Taman, Ruang Terbuka da Jalan Kecil .....	42
Tabel :	III.1	Perkembangan Luas Terbangun dan Perkembangan Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar 1948 – 1998.....	55
Tabel :	III.2	Nama-nama Banjar yang termasuk Desa Adat Denpasar Tahun 2001 .....	61
Tabel :	IV.1	Analisis Kondisi dan Keinginan Menerapkan Nilai-nilai <i>Natah</i> ..	78
Tabel :	IV.2	Analisis Kondisi dan Keinginan Menerapkan <i>Sikut</i> Pada <i>Natah</i> .	80
Tabel :	IV.3	Analisis Kelengkapan Bangunan Tradisional Pada <i>Natah</i> .....	81
Tabel :	IV.4	Identifikasi Perubahan Sampai Saat Ini Dan Keinginan Masyarakat Bali Terhadap Nilai-nilai <i>Natah</i> .....	84
Tabel :	IV.5	Analisis Kondisi dan Keinginan Masyarakat Terhadap Nilai- Nilai <i>Telajakan</i> .....	88
Tabel :	IV.6	Pendapat Masyarakat Terhadap Radius Kesucian Pura.....	90
Tabel :	IV.7	Keinginan Responden Yang Tidak Sependapat Dengan Radius Kesucian Pura Dang Kahyangan ( Radius 2 km).....	90
Tabel :	IV.8	Pendapat Responden Terhadap Bangunan Yang Berada Pada Radius Kesucian <i>Pura Kahyangan Desa</i> .....	91
Tabel :	IV.9	Pendapat Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Lapangan Puputan Badung ( Alun-alun).....	94

Tabel :	IV.10	Persepsi Masyarakat Bali Terhadap Nilai-Nilai Ruang Terbuka Non Tradisional Pada Ruang Terbuka Tradisional.....	97
Tabel :	IV.11	Persepsi Masyarakat Bali Terhadap Sistem Nilai Ruang Terbuka Tradisional di Kota Denpasar.....	106

## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	1.1	Ilustrasi Perubahan Bentuk Dan Luas <i>Natah</i> .....	5
Gambar :	1.2	Kerangka Alur Pikir.....	11
Gambar :	2.1	Pusat Kerajaan Berkembang Menjadi Kota Kabupaten.....	26
Diagram :	2.2	Hubungan Tata Ruang Dengan Konsep yang Melandasinya.....	28
Gambar :	2.3	Ukuran Tradisional.....	30
Gambar :	2.4	Konsep Arah Orientasi Ruang dan Konsep <i>Sanga Mandala</i> .....	32
Gambar :	2.5	Konsep dan Penjabaran <i>Sanga Mandala</i> .....	33
Gambar :	2.6	Nama-Nama Bangunan Tradisional, Pengukuran Jarak Antar Bangunan dan Alternatif Pintu Masuk.....	34
Diagram :	3.1	Perkembangan Prosentase Luas Terbangun Kota Denpasar Tahun 1948 – 1998 .....	55
Gambar :	3.2	Stadia Perkembangan Kota Denpasar 1948 – 1998 .....	56
Gambar :	3.3	Orientasi Wilayah Studi.....	59
Gambar :	3.4	Penggunaan Lahan .....	62
Gambar :	3.5	Radius Kesucian Pura <i>Dang Kahyangan</i> .....	69
Gambar :	3.6	Radius Kesucian Pura <i>Kahyangan Desa</i> .....	70
Gambar :	3.7	Sejarah Perkembangan Blok Peruntukan Di Sekitar Pusat Kota ( <i>Pempatan Agung</i> ) Denpasar .....	72
Gambar :	3.8	Alun-Alun Dan <i>Setra</i> .....	73
Gambar :	4.1	Variasi <i>Natah</i> dan Bangunan Yang Menempatnya di Desa Adat Denpasar .....	83

Diagram :	4.2	Identifikasi Perubahan Nilai-nilai <i>Natah</i> Sampai Saat Ini .....	85
Diagram :	4.3	Identifikasi Pendapat Dan Keinginan Masyarakat Terhadap Nilai-nilai <i>Ntah</i> Pada Saat Merenovasi Dan Atau <i>Ngarangin</i> .....	85
Diagram :	4.4	Identifikasi Perubahan Sistem Nilai Ruang Terbuka Tradisional Di Kota Denpasar.....	107
Diagram :	4.5	Keinginan Mempertahankan Sistem Nilai Ruang Terbuka Tradisional.....	107
Gambar :	5.1	Bentuk Ruang Terbuka Tradisional Yang Selaras Dengan Tata Nilai <i>Tri Mandala</i> .....	112

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	A	Hasil Survey Lapangan . Persepsi Masyarakat Bali Terhadap Sistem Nilai Ruang Terbuka di Kota Denpasar.....	117
Lampiran :	B	Tabulasi Silang ( <i>Crosstabulation</i> ).....	126
Lampiran :	B.1	Crosstabulation pendidikan dengan penggunaan ukuran tradisional .....	126
Lampiran :	B.2	Crosstabulation luas pekarangan dengan penggunaan ukuran tradisional .....	127
Lampiran :	B.3	Crosstabulation Pendapatan dengan lengkapnya bangunan tradisional .....	128
Lampiran :	B.4	Crosstabulation luas pekarangan dengan lengkapnya bangunan tradisional .....	129
Lampiran :	B.5	Crosstabulation jumlah kepala keluarga dengan lengkapnya bangunan tradisional .....	130
Lampiran :	B.6	Crosstabulation pendidikan dengan ketersediaan telajakan .....	131
Lampiran :	B.7	Crosstabulation pendapatan dengan ketersediaan telajakan .....	132
Lampiran :	B.8	Crosstabulation luas pekarangan dengan ketersediaan telajakan .....	133
Lampiran :	B.9	Crosstabulation pendidikan dengan pendapat tentang radius kesucian pura.....	134
Lampiran :	B.10	Crosstabulation pekerjaan dengan pendapat tentang radius kesucian pura.....	135
Lampiran :	C	Daftar Narasumber.....	136
Lampiran :	D	Glossary.....	137

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jumlah penduduk di perkotaan (urbanisasi) mengalami pertumbuhan cepat. Pertumbuhan tersebut disamping akibat pertumbuhan penduduk alami juga disebabkan karena migrasi masuk. Besarnya migrasi masuk di wilayah perkotaan disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah akibat dari daya tarik kota dan akumulasi kegiatan perekonomian kota serta semakin berkurangnya kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Pada skala nasional, periode 1980 – 1990 jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan mencapai 30,90 % dan pada periode 1990 – 1995 urbanisasi mengalami perkembangan yang semakin cepat, dimana jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan meningkat menjadi 35,90 %. Laju pertumbuhan penduduk perkotaan pada periode tersebut tercatat rata-rata 4,76 % per tahun, jauh diatas pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1,70 % (BPS, 1996 : 33). Bank Dunia memperkirakan bahwa pada dua dekade mendatang jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan di Indonesia akan mencapai 50 % dari total penduduk nasional (Tjahyati, 2000 : 1).

Tingkat urbanisasi yang tinggi seperti tersebut diatas dan meningkatnya kegiatan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan fisik kota serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan berbagai fasilitas dan sarana pelayanan kota seperti perumahan, fasilitas pelayanan sosial dan fasilitas umum. Konsekuensi dari semua ini adalah meningkatnya kebutuhan ruang untuk menampung berbagai aktivitas di



perkotaan. Meningkatnya kebutuhan ruang di satu sisi dihadapkan pada keterbatasan lahan di sisi yang lain akan mengganggu keberadaan ruang terbuka di perkotaan.

Batasan atau pengertian ruang terbuka, antara lain disebutkan bahwa ruang terbuka adalah ruang umum yang berada di luar bangunan (Eko Budihardjo, 1999 : 89-90). Intruksi Dalam Negeri No.14 Tahun 1988 menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari tata ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan.

Ruang terbuka umum dapat memberikan berbagai manfaat untuk sebuah kota, baik manfaat fisik maupun sosial. Secara fisik dan visual, ruang terbuka dibutuhkan untuk memberikan keindahan dan udara segar diantara padatnya bangunan dan tingginya intensitas kegiatan masyarakat. Ruang terbuka merupakan elemen penting yang dapat dimanfaatkan oleh manusia guna mendukung berbagai aktivitas. Dalam ruang terbuka, interaksi dan aktivitas sosial yang merupakan faktor kehidupan sangat dibutuhkan sebagaimana dibutuhkannya aspek fisik dan visual.

Isu ruang terbuka dalam pembangunan kota terkait dengan pembangunan kota yang berkelanjutan ; peranan ruang terbuka kota sangat penting bagi kehidupan manusia dan keberlanjutan suatu kota. Kebijakan pengelolaan kota pada masa yang akan datang menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan antara kebutuhan permukiman dan faktor-faktor ekologi (Hall, 2000 : 106 & Moughtin, 1996 : 4-5). Fungsi ekologis dari ruang terbuka hijau adalah : penyegaran udara, penyerapan air hujan, pengendalian banjir, memelihara ekosistem tertentu, pelembut arsitektur bangunan. Bentuk dan ukuran ruang

terbuka merupakan suatu determinan utama bentuk kota, artinya 30 – 50 % luas seluruh kota diperuntukkan untuk ruang terbuka (Budihardjo, 1999 : 91 - 93).

Kota Denpasar sebagai ibu kota Propinsi Bali dan sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk dengan rata-rata pertumbuhan 2,21 % per tahun pada periode 1990 – 1999 ; sementara dalam kurun waktu yang sama laju pertumbuhan penduduk Propinsi Bali hanya 0,94 % per tahun (Bali Membangun, 1999 : XII-3). Pertumbuhan penduduk yang relatif besar di Kota Denpasar menyebabkan meningkatnya kegiatan sosial dan ekonomi serta meningkatnya intensitas dan perubahan pemanfaatan ruang. Dalam kondisi demikian ruang terbuka sebagai salah satu komponen ruang kota juga mengalami perubahan.

Di Propinsi Bali pada umumnya termasuk Kota Denpasar terdapat ruang terbuka yang merupakan komponen ruang permukiman tradisional Bali. Ruang terbuka sebagai komponen ruang permukiman tradisional Bali antara lain: *natah* sebagai pusat orientasi di dalam satu pekarangan rumah; *telajakan* berupa jalur hijau yang berada antara saluran tepi jalan dengan pagar depan bangunan rumah berfungsi pertamanan; alun-alun di *pempatan agung* (simpang empat) yang berfungsi sebagai tempat upacara *tawur kesanga* pada setiap menjelang Hari Raya *Nyepi*; radius kesucian pura; tempat *melasti* ( tempat upacara penyucian simbol-simbol agama yang diselenggarakan di pantai ); *setra* atau kuburan merupakan pelengkap desa adat berfungsi sebagai tempat upacara pembakaran mayat atau *ngaben* dan lain-lain.

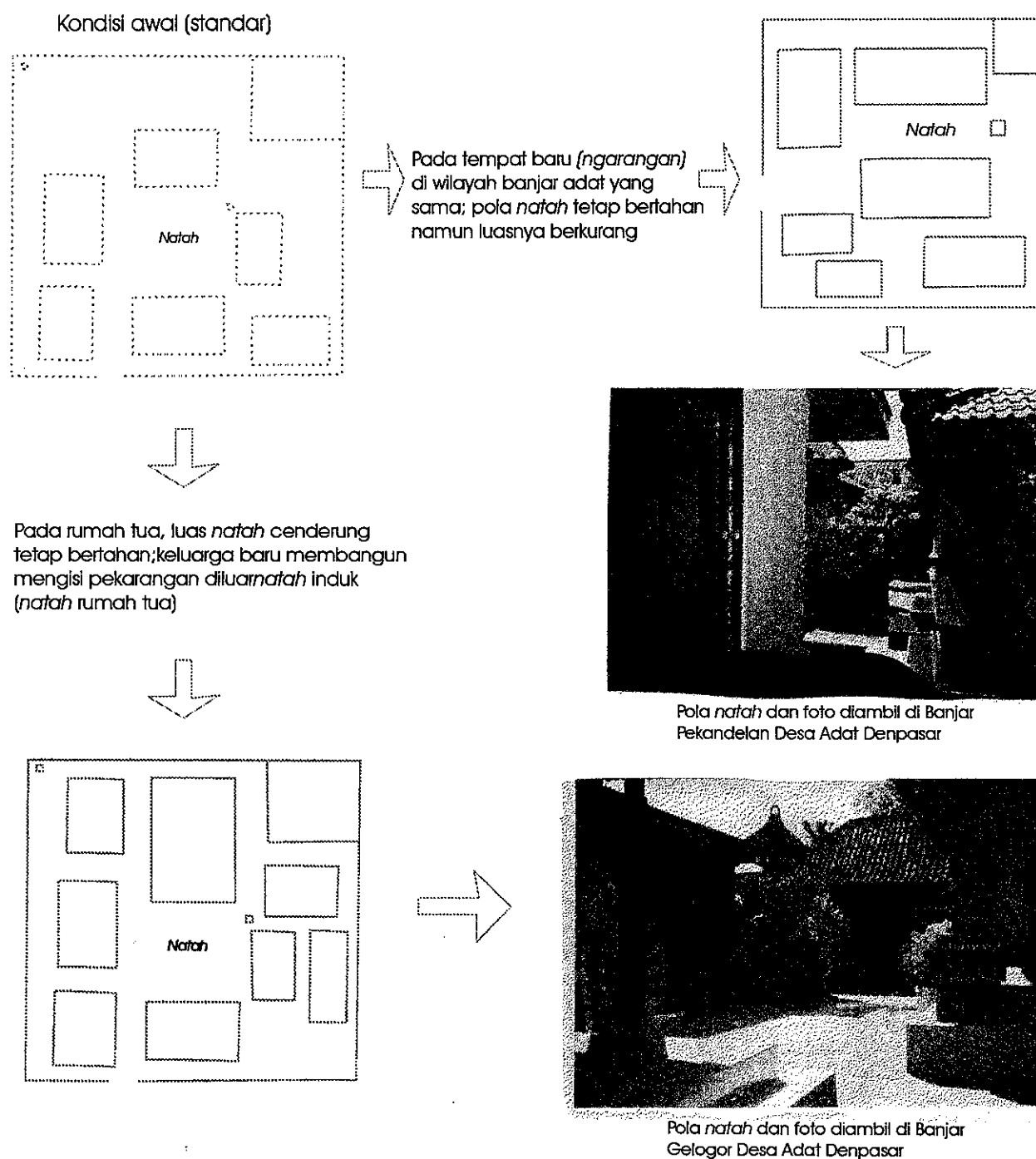
Fenomena yang terlihat bahwa tingkat urbanisasi yang pesat di Kota Denpasar mengakibatkan pesatnya kegiatan pemanfaatan ruang. Pesatnya kegiatan pemanfaatan ini mendesak ruang terbuka sehingga terjadi perubahan-perubahan ruang terbuka di Kota Denpasar. Memang tidak semua jenis ruang terbuka tradisional mengalami gangguan yang

serius jika dilihat dari wujud fisiknya. Masing-masing mempunyai persoalan yang berbeda jika dikaitkan dengan keberadaan ruang terbuka tradisional di Kota Denpasar.

*Natah* sebagai salah satu ruang terbuka tradisional terutama dilihat dari pola dan fungsinya sebagai pusat orientasi bangunan dan tempat upacara agama masih tetap bertahan, namun luasannya berkurang karena adanya perubahan komponen yang menempatnya yakni adanya bangunan modern atau semi tradisional. Hal ini dapat disaksikan pada permukiman desa adat di pusat kota, jarang ditemukan adanya bangunan rumah yang menghadap ke jalan; yang tampak dari jalan hanyalah tembok (*penyengker*) karena bangunan huniannya menghadap kedalam (*natah*) sebagai pusat orientasi. Pola *natah* ini bahkan banyak digunakan pada bangunan umum seperti kantor pemerintah, sekolah, hotel dan lain-lainnya. Perubahan-perubahan bentuk dan luas *natah* sebagai ruang terbuka tradisional karena adanya nilai-nilai yang diabaikan dan ada pula nilai-nilai yang tetap dipertahankan oleh masyarakat Bali. Pada rumah tua, luas *natah* cenderung tetap bertahan; karena anggota keluarga yang sudah menikah kemudian membangun hunian baru dan menempati ruang kosong diluar *natah* tua. Sementara pada daerah baru diluar tanah milik keluarga, namun masih berada dalam satu wilayah banjar adat; keluarga yang menikah umumnya membangun hunian dengan pola *natah* namun luasnya relatif lebih kecil (Gambar 1.1). Namun adanya bangunan *sanggah natah*, *penunggun karang*, dan bangunan *sanggah* yang mengaruskan tetap adanya ruang terbuka pada satu unit hunian.

*Telajakan* dan radius kesucian *pura* juga mengalami perubahan, karena adanya perubahan persepsi terhadap beberapa nilai-nilai yang terkandung didalamnya berdampak pada perubahan luas yakni terdesaknya *telajakan* dan radius kesucian *pura* oleh area terbangun. Sementara disisi lain pemerintah Kota Denpasar berupaya mempertahankan ruang terbuka *telajakan* dan radius kesucian *pura* ini melalui Perda Tata Ruang dan

## GAMBAR : 1.1 ILUSTRASI PERUBAHAN BENTUK DAN LUAS NATAH



upaya-upaya praktis seperti pembongkaran toko di depan *Pura Desa* sebagai salah satu upaya mengamankan radius kesucian *pura*.

*Alun-alun Puputan* dan *setra* , sebagai ruang terbuka tradisional sampai saat ini sedikit mengalami perubahan fungsi yakni sebagai tempat rekreasi pasif namun tidak mengganggu fungsinya sebagai tempat upacara agama, dapat dikatakan bahwa keberadaan *alun-alun* dan *setra* sebagai ruang terbuka tradisional di Kota Denpasar masih tetap ada.

Disamping perubahan-perubahan ruang terbuka seperti tersebut diatas, permasalahan pemanfaatan ditinjau dari sisi tradisional dan non tradisional; kadang-kala saling mendukung dan juga sering terjadi konflik pemanfaatan antara sistem nilai ruang terbuka non tradisional yang mengutamakan nilai keindahan, ekonomis dan fungsi rekreatif; dan sistem nilai ruang terbuka tradisional yang mengutamakan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan. Disadari pula adanya faktor kritis terhadap perubahan ruang terbuka tradisional yakni kondisi ekonomi dan kondisi fisik ruang. Hal ini senada dengan pendapat Rapoport dalam tulisannya yang berjudul '*House Form and Culture*' mengatakan bahwa bentuk-bentuk rumah tradisional meningkat pengaruhnya apabila faktor ekonomi dan faktor fisik terpenuhi (Rapoport, 1969 : 58-60). Khusus terhadap ruang terbuka tradisional, timbul suatu pertanyaan; nilai-nilai ruang terbuka tradisional yang manakah masih tetap bertahan atau yang manakah sudah diabaikan ?

Bertitik tolak dari fenomena di atas, perlu dilakukan studi persepsi masyarakat terhadap perubahan ruang terbuka tradisional Bali (*natah*, *telajakan*, *alun-alun*, *setra* dan radius kesucian *pura*) di Kota Denpasar yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penataan ruang terbuka kota pada masa yang akan datang. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar karena tekanan terhadap ruang terbuka tradisional relatif besar dibandingkan dengan kota-kota lain di Propinsi Bali.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mencermati fenomena dan problematika seperti dikemukakan diatas yakni adanya perubahan bentuk dan luasan serta perubahan komponen *natah*, namun fungsinya sebagai pusat orientasi bangunan dan tempat upacara agama masih tetap bertahan. Adanya perubahan *telajakan* karena pelebaran jalan; adanya radius kesucian *pura* hanya dalam bentuk jalan di sekeliling pura. *Alun-alun Puputan* dengan bentuk dan luasnya tetap bertahan namun fungsinya meningkat dengan adanya tambahan fungsi rekreasi. Sementara *setra* sebagai ruang terbuka tradisional baik luas dan fungsinya masih tetap bertahan. Keseluruhannya akibat dari adanya nilai-nilai ruang terbuka tradisional yang masih dipertahankan dan ada pula nilai-nilai ruang terbuka tradisional yang telah diabaikan oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dirumuskan masalahnya adalah : “ Perubahan-perubahan sistem nilai ruang terbuka tradisional di Kota Denpasar “. Berdasarkan rumusan masalah tersebut yang menjadi pertanyaan penelitian (*research question*) adalah : Bagaimanakah persepsi masyarakat Bali sekarang terhadap perubahan-perubahan sistem nilai ruang terbuka tradisional di Kota Denpasar ?

## 1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

### 1.3.1 Tujuan Studi

Tujuan studi adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional Bali di Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini dilandasi oleh adanya perubahan-perubahan ruang terbuka tradisional, namun belum diketahui nilai-nilai ruang terbuka tradisional yang mana masih dipertahankan dan yang mana telah diabaikan oleh masyarakat Bali. Persepsi masyarakat Bali terhadap nilai-nilai ruang terbuka

tradisional di Kota Denpasar diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penataan ruang terbuka khususnya dan penataan ruang kota umumnya.

### 1.3.2 Sasaran Studi

Untuk mencapai tujuan studi seperti disebutkan pada butir 1.3.1, maka sasaran studi yang akan dilakukan adalah :

1. Identifikasi perubahan sistem nilai ruang terbuka tradisional di Kota Denpasar.
2. Identifikasi pendapat dan keinginan masyarakat Bali terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional di Kota Denpasar.
3. Menilai pendapat dan keinginan masyarakat Bali terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional di Kota Denpasar atas dasar kondisi yang terjadi saat ini dan yang diinginkan oleh masyarakat Bali.
4. Merumuskan dan mengambil kesimpulan pendapat dan keinginan masyarakat Bali terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional di Kota Denpasar.
5. Merekomendasikan hasil studi sebagai salah satu acuan dan pertimbangan penataan ruang terbuka dan penataan ruang kota.

## 1.4 Ruang Lingkup

### 1.4.1 Lingkup Substansial

Lingkup substansial dalam penulisan ini adalah kajian terhadap nilai-nilai ruang terbuka tradisional Bali mencakup *natah*, *telajakan*, *alun-alun*, *setra* dan *radius kesucian pura*. Jenis-jenis ruang terbuka tersebut mempunyai permasalahan relatif lebih besar karena letaknya di pusat kota dibandingkan jenis ruang terbuka tradisional yang lain (tempat *melasti* yang tempatnya di pantai). Jenis-jenis ruang terbuka tersebut juga

mempunyai pengaruh yang lebih luas terhadap ruang kota karena jumlah unitnya lebih besar dari ruang terbuka tradisional Bali yang lain.

#### 1.4.2 Lingkup Spasial.

Lingkup spasial studi ini difokuskan pada ruang terbuka tradisional Bali (*natah, telajakan, alun-alun, setra*, dan radius kesucian *pura* ) yang berada di dalam wilayah Desa Adat Denpasar. Dipilihnya Desa Adat Denpasar sebagai wilayah studi karena pada wilayah tersebut terkonsentrasi permukiman lama yang mencerminkan corak perubahan ruang terbuka tradisional (*natah, telajakan, alun-alun, setra* dan *radius kesucian pura* ); mencakup banjar adat yang berada di pusat, tengah dan pinggiran kota.

#### 1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan berawal dari adanya fenomena yang menunjukkan pertumbuhan penduduk Kota Denpasar yang relatif cepat. Sementara disisi lain kegiatan usaha di Kota Denpasar juga semakin meningkat. Sehingga dari kedua perkembangan ini, cepatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kegiatan usaha berpengaruh pada perubahan sosial, ekonomi dan fisik kota. Perubahan ini akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan ruang. Meningkatnya kebutuhan ruang di satu sisi akan mendesak ruang terbuka pada sisi yang lain yakni berubahnya ruang terbuka tradisional Bali di Kota Denpasar. Meskipun ruang terbuka tradisional mengalami perubahan secara fisik yang dapat divisualisasikan, namun belum diketahui nilai-nilai ruang terbuka yang mana masih tetap bertahan atau nilai-nilai yang mana telah diabaikan oleh masyarakat Bali. Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas dibalik perubahan ruang terbuka tradisional maka perlu dikaji melalui identifikasi dan analisis persepsi masyarakat Bali terhadap perubahan ruang terbuka tradisional di Kota Denpasar.

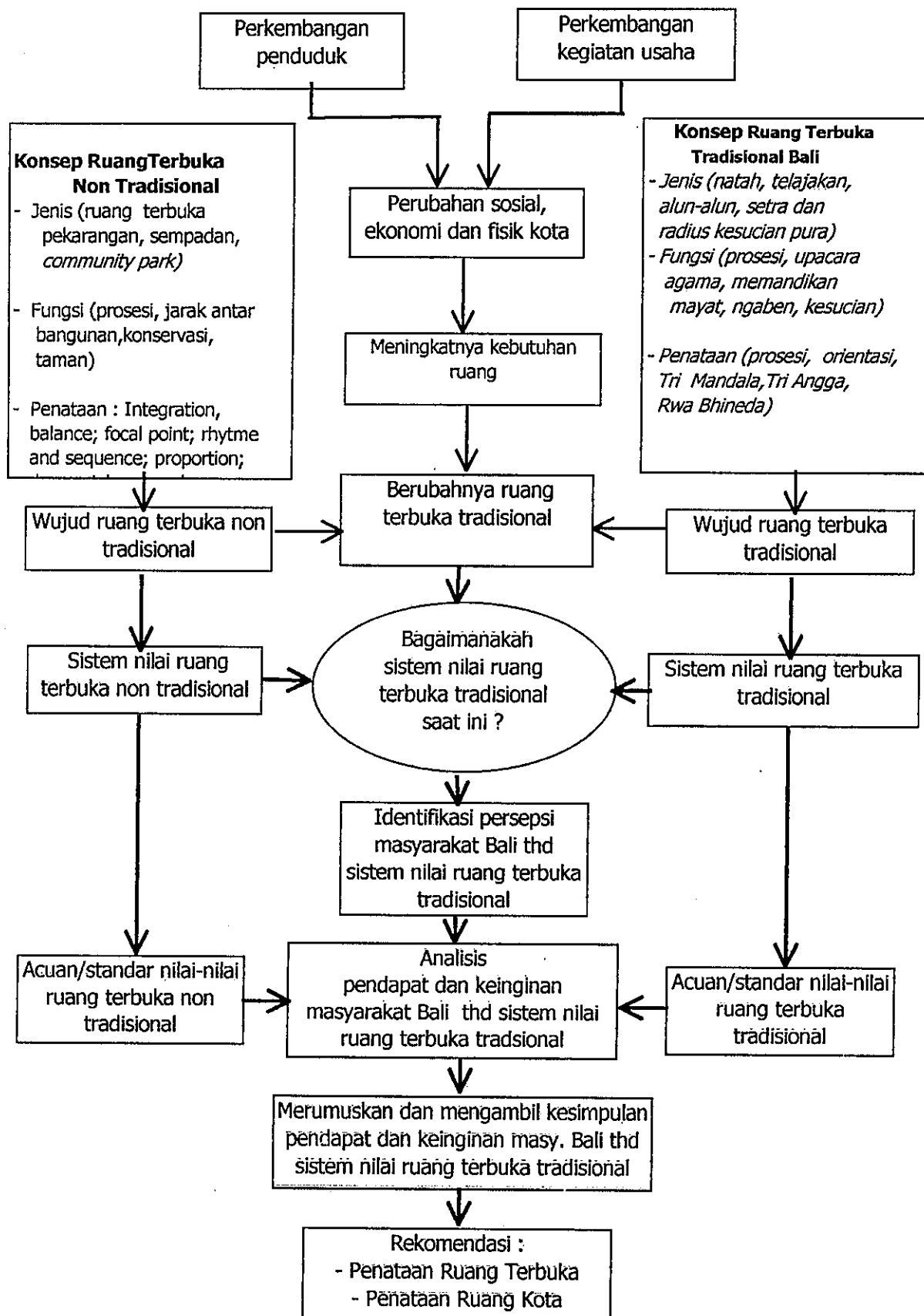


Adapun perubahan persepsi tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metoda kualitatif normatif, deskriptif kuantitatif sederhana; dengan tabel-tabel kontingensi. Studi ini juga akan mengacu pada konsep dan standar nilai-nilai yang ada, diantaranya meliputi :

- Konsep *Natah dan Telajakan* yang digali dari konsep satu unit hunian tradisional Bali. Antara lain penataan yang berlandaskan *tri mandala* atau *sanga mandala*.
- Konsep radius kesucian *Pura* yang digali dari filosofi *Tri.Hita Karana dan Asta Bumi*. Antara lain adanya ketentuan kesucian pura; *apaneleng* = sejauh mata memandang; *apanimpug* = sejauh lemparan; *apanyengker* = sejauh yang dipagari. Adanya pengertian *karang gerah* = pekarangan yang kurang baik ditempati jika berbatasan langsung dengan *pura*.
- Konsep *alun-alun* digali dari sejarah pusat desa kerajaan dan *pempatan agung*. Alun-alun Puputan adalah peninggalan sejarah kerajaan Badung dan merupakan komponen *pempatan agung* (pusat kerajaan).
- Konsep *setra* digali dari teritorial (palemahan) Desa Adat. Palemahan Desa Adat umumnya terdiri dari perumahan, bale desa, pasar dan *setra*. *Setra* merupakan sarana pelengkap desa adat untuk penguburan mayat dan tempat upacara ngaben.
- Konsep ruang terbuka modern yang digali dari definisi ruang terbuka secara umum.

Fungsi-fungsi ruang terbuka non tradisional dikaitkan dengan fungsi tradisional

Melalui upaya-upaya tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan dan disimpulkan hasil studi yang diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan khususnya dalam penyusunan / pentaan ruang terbuka di Kota Denpasar dan maupun penyusunan rencana tata ruang Kota Denpasar. Melengkapi uraian kerangka alur pikir dalam penelitian ini, secara diagramatis disajikan pada gambar : 1.2

**GAMBAR : 1.2 KERANGKA ALUR PIKIR**

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan Studi**

Penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Bali Terhadap Sistem Nilai Ruang Terbuka Tradisional di Kota Denpasar “ ini didasari oleh pemikiran bahwa persepsi masyarakat sangat diperlukan dalam penentuan arahan pengembangan ruang terbuka kota khususnya ruang terbuka tradisional. Oleh karena itu pendekatan studi ini dilaksanakan melalui kajian persepsi masyarakat terhadap ruang terbuka tradisional yang telah berubah oleh perkembangan pembangunan; namun belum diketahui nilai ruang terbuka yang mana masih bertahan dan mana yang telah diabaikan oleh masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui seberapa besar perubahan sistem nilai ruang terbuka tradisional yang telah terjadi; bagaimana pendapat dan keinginan masyarakat terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional yang digali dari persepsi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penataan ruang terbuka kota.

Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif yang mendeskripsikan fenomena sistem nilai ruang terbuka tradisional yang telah mengalami perubahan yang digali dari persepsi masyarakat.

### **1.6.2 Metoda Pelaksanaan Studi.**

Metoda pelaksanaan studi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengajukan / penyusunan proposal penelitian;
- b. Pelaksanaan survai / pengumpulan data;
- c. Pengolahan dan penyajian data;
- d. Penyusunan laporan penelitian.

### 1.6.3 Kebutuhan Data.

Untuk memenuhi kebutuhan data dalam studi ini, survei skunder dilakukan di beberapa instansi / dinas di lingkungan Pemda Kota Denpasar seperti Bappeda, BPN, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Lingkungan Hidup. Survei ini dilakukan untuk memperoleh data jumlah dan jenis ruang terbuka tradisional serta data pendukung kebijaksanaan yang dilakukan oleh masing-masing instansi / dinas sehubungan dengan ruang terbuka tradisional Bali di kota Denpasar. Selanjutnya survei primer dilakukan untuk memperoleh data empiris persepsi masyarakat terhadap ruang terbuka tradisional Bali di Kota Denpasar. Secara rinci kebutuhan data sekunder dan primer, sumber data serta manfaatnya disajikan pada Tabel : I.1

**TABEL : I.1**  
**KEBUTUHAN DATA**

Jenis Data	Rincian Data	Sumber	Manfaat
1. Data Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>RUTR Kota</li> <li>Hasil Penelitian</li> <li>Program-program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda, DKP, DLH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui Kebijakan dan program ruang terbuka</li> </ul>
2. Data Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis dan jumlah ruang terbuka tradisional</li> <li>Kondisi Fisik ruang terbuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda, DKP</li> <li>DKP, Dinas Tata Kota, Data Primer (lapangan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui jenis dan jumlah ruang terbuka tradisional</li> <li>Mengetahui gambaran umum perwujudan konsep ruang terbuka tradisional</li> </ul>
3. Data Sosial & Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tokoh Spiritual</li> <li>Jumlah Desa Adat</li> <li>Jumlah Desa Dinas</li> <li>Jumlah Banjar Adat di Desa Adat Denpasar</li> <li>Dinas Terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPS, Bappeda, BPLA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui besarnya sampel</li> </ul>
4. Data Persepsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai-nilai tradisional dari <i>natah, telajakan, radius kesucian pura, Alun-alun Puputan, Setra (kuburan)</i> yang dapat dijadikan acuan;</li> <li>Persepsi tentang nilai-nilai tersebut, yang dipertahankan dan yang diabaikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Primer (lapangan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui keberadaan <i>natah, telajakan, dan radius kesucian pura, Alun-alun Puputan, Setra (kuburan)</i>.</li> <li>Mengetahui keinginan masyarakat terhadap pentan ruang terbuka</li> </ul>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2002

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.

Pendapat beberapa praktisi, budayawan dan tokoh masyarakat; jumlah keseluruhan delapan orang berkaitan dengan nilai-nilai ruang terbuka yang dapat dijadikan acuan dilakukan dengan wawancara langsung. Pendapat dan masukan ini dimaksudkan untuk konfirmasi dan mempertajam nilai-nilai dari masing-masing jenis ruang terbuka tradisional yang dapat dijadikan acuan.

Teknik pengumpulan data sekunder seperti data kebijaksanaan, eksisting fisik ruang terbuka secara umum, serta data sosial dan kelembagaan yang terkait dilakukan dengan teknik dokumentasi yakni mencatat data-data instansi dan juga wawancara dengan perorangan pejabat tertentu. Wawancara ini diperlukan untuk melengkapi informasi pada saat pencatatan atau melengkapi informasi yang masih meragukan pada saat pencatatan.

Sedangkan pengumpulan data empiris tentang persepsi masyarakat dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur. Dalam wawancara, interviewer membawa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan disusun dengan pilihan jawaban sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban atau beberapa pilihan jawaban. Sedangkan daftar pertanyaan lainnya merupakan daftar pertanyaan semi terbuka, disamping memberikan pilihan jawaban juga memberi peluang kepada responden untuk menjawab secara terbuka. Daftar pertanyaan ini disusun untuk mengetahui nilai-nilai ruang terbuka tradisional yang masih bertahan dan nilai-nilai yang telah diabaikan serta untuk mengetahui keinginan masyarakat tentang nilai-nilai yang dapat dipertahankan pada masa yang akan datang.

### 1.6.5 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.

Untuk data skunder yang telah terkumpul kemudian dikategorisasikan dan disajikan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik atau gambar agar mudah diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan data primer atau data empirik hasil survei lapangan akan ditabulasikan dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel kontingensi (Sujana, 1996 : 20) dimana pada baris disajikan jenis ruang terbuka dan pada kolom adalah jumlah frekuensi jawaban responden atau sebaliknya.

### 1.6.6 Teknik Sampling.

Pemilihan responden dilakukan dengan teknik sampling purposif. Sampling purposif dikenal juga sebagai sampling pertimbangan (Nasution, 1994 : 98 dan Sujana, 1996 : 168). Teknik sampling ini terjadi apabila pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan atau pertimbangan peneliti. Sampling purposif akan baik hasilnya di tangan seorang ahli yang mengenal populasi dan dapat segera mengetahui lokasi masalah-masalah yang khas. Populasinya adalah warga desa adat di Kota Denpasar dan beberapa tokoh masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan lapangan penelitian mengenai persepsi masyarakat Bali terhadap ruang terbuka tradisional di Kota Denpasar maka sampel yang dipilih adalah dari unsur desa adat. pada Tabel : I.2

**TABEL : I.2**  
**PENENTUAN JUMLAH SAMPEL PENELITIAN**

No	Unsur	Jumlah		Jumlah Sampel
		Institusi	Sampel	
1	Banjar Adat ( <i>Kelian Adat</i> )	86	86	86
2	Tokoh Masyarakat		14	14
	Jumlah			100

Sumber : Hasil Analisis tahun 2002

### 1.6.7 Teknik Analisis.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif normatif dimana data kualitatif didukung dengan pengolahan kuantitatif. Metoda pengukuran digunakan disini pengukuran menurut Skala Likert. Pada tahun 1932 Rensis Likert mengembangkan teknik ini untuk mengukur sikap masyarakat (Nasution, 1994 : 61 – 64 dan Nazir, 1988 : 396 – 398 ). Analisis tabulasi silang (crosstab) dan Uji Chi-Square dilakukan pada nilai-nilai yang mengalami perubahan.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

### ▪ Bab I Pendahuluan

Mengungkapkan latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup penelitian serta kerangka pemikirannya.

### ▪ Bab II Kajian Persepsi Masyarakat, Konsep Ruang Terbuka Non Tradisional dan Konsep Ruang Terbuka Tradisional

Pada bab ini dijelaskan mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Melalui kajian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diangkat, walaupun jawabannya masih bersifat teoritis.

### ▪ Bab III Permasalahan Ruang Terbuka di Kota Denpasar

Menguraikan gambaran ruang terbuka di Kota Denpasar dan ruang terbuka pada obyek penelitian atau Desa Adat Denpasar yang terkait dengan permasalahan ruang terbuka tradisional.

- **Bab IV Analisis Pendapat dan Keinginan Masyarakat Bali Terhadap Ruang Terbuka**

Menganalisis data-data hasil survey lapangan terkait dengan pendapat dan keinginan masyarakat terhadap nilai-nilai ruang terbuka tradisional maupun non tradisional.

- **Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi**

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan hasil penelitian dan beberapa rekomendasi apabila ada yang masih perlu ditindaklanjuti dari hasil kesimpulan tersebut.



## **BAB II**

### **KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT, KONSEP RUANG TERBUKA TRADISIONAL DAN KONSEP RUANG TERBUKA NON TRADISIONAL**

#### **2.1 Pengertian Persepsi Masyarakat**

Pengertian persepsi dari Kamus Psikologi adalah berasal dari Bahasa Inggris *perception* yang artinya : persepsi, penglihatan, tanggapan ; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indra-indra yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Kartono & Gulo, 1987 : 343 ).

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan (Davidoff, 1981 dalam Walgito, 2000 : 53 ). Dapat dikemukakan bahwa persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya, dan juga tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi merupakan aktivitas yang terintegrasi, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito, 2000 : 54 ). Berdasarkan atas hal tersebut, dapat

dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu satu dengan individu yang lain tidak sama.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal : perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan sedangkan faktor eksternal adalah: stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.

Persepsi dihasilkan dari para stakeholders termasuk staf dan masyarakat umum. Persepsi berbeda-beda mulai dari identifikasi isu kritis dalam taman dan tempat rekreasi sampai kepada sebuah visi dari sistem yang ideal dari taman, ruang terbuka, tempat rekreasi dan jalan kecil yang diinginkan untuk masyarakat. Informasi ini kemudian dapat dipertimbangkan dan dihadapkan pada realitas yang dapat diukur yakni informasi yang nyata. (Mertes & Hall, 1995 : 19).

Pengertian masyarakat dalam kamus bahasa inggris disebutkan bahwa masyarakat asal katanya *socius* yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus, bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sedangkan jiwa masyarakat merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata sosial, status dan peranan sosial. Sehingga para pakar sosiologi seperti MacIver, J.L Gillin memberikan pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur

merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama ( Soelaiman, 1993 dalam Mussadun, 2000). Jadi, karena masyarakat itu terdiri dari kumpulan individu yang saling bergaul, berinteraksi dan mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama, maka suatu masyarakat dapat dinamakan masyarakat kampus, masyarakat desa adat, masyarakat pemerhati lingkungan desa adat dan sebagainya.

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

Tanggapan masyarakat Bali terhadap sesuatu dapat dijelaskan bahwa masyarakat Bali adalah masyarakat religius yang dilandasi oleh Agama Hindu. Pokok-pokok keimanan dalam Agama Hindu disebut *Panca Sraddha* yakni percaya adanya Tuhan (*Brahman/Hyang Widhi*); percaya adanya percikan Tuhan yang ada pada setiap manusia (disebut *Atman* = jiwa); percaya adanya hukum *karma pala*; percaya *Punarbhawa*(*Reinkarnasi/Samsara* = penitisan kembali); dan percaya *Moksa* ( = kebebasan keterikatan dengan benda-benda yang bersifat duniawi dan terlepasnya *Atman* dari pengaruh maya dan bersatu kembali dengan sumber-Nya).

Dasar ajaran agama Hindu adalah filsafat, etika dan ritual. Ritual inilah yang paling nampak kepermukaan dan memerlukan ruang dalam palaksanaannya. *Yadnya* menurut ajaran Agama Hindu merupakan satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Hindu didalam kehidupannya sehari-hari. Sebab Tuhan menciptakan manusia beserta makhluk hidup lainnya berdasarkan atas *yadnya*, maka hendaklah

manusia memelihara dan mengembangkan dirinya atas dasar *yadnya* sebagai jalan untuk berbhakti dan mengabdikan diri kepada Sang Pencipta (*Tat Twam Asi*). *Yadnya* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan suci yang didasarkan atas cinta kasih, pengabdian yang tulus ikhlas dengan tanpa pamrih. Keyakinan ini yang melandasi sikap perilaku serta kegiatan upacara keagamaan di Bali termasuk Desa Adat Denpasar sebagai obyek penelitian.

## 2.2 Konsep Ruang Terbuka Tradisional

### 2.2.1 Jenis-jenis ruang terbuka tradisional

Ruang terbuka tradisional Bali sering disebut *karang suwung* dan *karang tuang*. Jenis-jenis ruang terbuka tradisional Bali antara lain :

- *Natah*, adalah ruang kosong dalam satu pekarangan yang perwujudannya dilandasi oleh konsep *sanga mandala*, *tri mandala* dan *rwa bhineda* ( Meganada, 1990 : 32 dan Sujana & Susila, 2000 : 136);
- *Telajakan* sebagai penata garis sempadan antara tembok penyengker dan jalinjangan tepi jalan dihiasi tanaman hias tradisional untuk kegiatan spiritual dan ekonomi penunjang ( Gelebet, 1984 : 50).
- Radius kesucian *pura* ruang kosong disekeliling *pura* untuk menjaga kesucian pura (Netra, 1994 : 83);
- Tempat *Melasti*, kawasan suci di pantai yang dipergunakan upacara *melasti* menjelang Hari Raya Nyepi (Netra, 1994 : 72);
- Alun-alun di *pempatan agung*, merupakan ruang terbuka yang dipergunakan sebagai tempat aktifitas sosial keagamaan (*tawur kesanga*) ( Widiastuti, 1996 : 7).
- *Setra* adalah tanah milik desa adat yang digunakan penguburan mayat dan atau pembakaran mayat (*ngaben*) ( Surpha, 1999 : 19).

Pembahasan lebih lanjut mengenai ruang terbuka tradisional, sesuai dengan lingkup pembahasan pada bab I, hanya akan dibahas mengenai *natah*, *telajakan*, *alun-alun*, *setra* dan *radius kesucian pura*.

*Natah* dalam perseptif filsafat dikemukakan bahwa *natah* merupakan simbol tempat pertemuan antara langit (*purusa*) dan *pertiwi*/tanah (*pradana*). Dalam filsafat Hindu bahwa *purusa* merupakan benih-benih unsur kejiwaan (*atma*) dan *pradana* merupakan unsur kebendaan (*pancamahabutha*). Pada *natah* ini terjadi pertemuan antara jiwa (*atma*) dan raga (*angga*) sehingga mewujudkan kehidupan di alam ini. Makna *natah* yang paling utama adalah memberi peluang suatu kehidupan yakni berumah tangga selama jiwa bertemu dengan raga atau sepanjang ayat dikandung badan (Gomudha, : I-25). *Natah* melambangkan sesuatu yang kosong (luang), karena dengan kekosongan dapat dipahami makna tentang isi. *Natah* disimbolkan sebagai pusat dari perputaran, dan kalau dianalogikan dengan tubuh manusia maka *natah* adalah tali pusar. *Natah* adalah ruang kosong dengan *bale* mengelilingi pusat sehingga tercipta keseimbangan. *Bale* yang mengelilingi merupakan simbol dari *dewata nawa sanga*. Makna *natah* adalah memberikan peluang kehidupan, karena pada *natah* itulah akan terjadi pertemuan antara jiwa dan raga. Semua bangunan berorientasi ke dalam *natah*, sehingga *natah* berfungsi sebagai pusat orientasi dan sebagai lambang pemersatu. Dalam konsep ini *natah* menjadi pusat dan tidak berkaitan dengan hirarki ruang tetapi lebih menekankan simbol perputaran dan simbol keseimbangan (Swanendri, 2000 : 24).

Setiap pekarangan rumah memiliki tiga jenis *natah* yaitu *natah pawon/lebu* (*service*) yang terletak di depan dapur (*nista*), *natah bale* sebagai pusat pekarangan dengan nilai *madya* / antara / semi, dan *natah merajan/sanggah* sebagai tempat suci yang mempunyai nilai *utama*. Sesuai dengan yang tersaksikan, pada setiap pekarangan rumah terdapat tiga *natah* yaitu *natah penunggun karang*, *natah bale*, dan *natah merajan*. Adanya tiga *natah* ini sesuai dengan konsep yang membedakan alam menjadi tiga yaitu alam dewa, alam manusia, dan alam *bhuta*.

*Natah* merupakan simbol dari ketiga alam tersebut. Oleh karena itu dalam upacara ritual *mecaru* yang mempunyai makna menyucikan alam, dilakukan pada tiga *natah* tersebut.

Meskipun ada beberapa jenis *telajakan* dari masing-masing fungsi peruntukan seperti : *telajakan pura*, *telajakan setra* yang biasanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum; namun dalam pembahasan ini hanya akan dibahas *telajakan* yang ada di depan rumah. *Alun-alun* adalah lapangan umum peninggalan sejarah (Wiryomartono, 1995 : 47). Tidak ada perbedaan alun-alun menurut jenisnya. *Setra* juga tidak ada dibedakan menurut jenisnya, yang membedakan adalah lokasi sesuai dengan Desa Adat yang dilayaninya. Radius kesucian *pura* dapat dibedakan menjadi radius kesucian *Pura Sad Kahyangan*, radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* dan radius kesucian *Pura Kahyangan Desa*.

### 2.2.2 Fungsi ruang terbuka tradisional

Fungsi ruang terbuka tradisional masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Kegunaan *natah* adalah sebagai zone/area tengah, memiliki fungsi serba guna, sebagai orientasi / pengikat-pengikat *bale*, tempat upacara, lintasan kegiatan, tempat jemur hasil bumi, terima tamu/resepsi dan lain-lain ( Gomudha, 1999 : 1-24 – 1-25). Sesuai dengan yang tersaksikan, kegunaan *natah* dapat dibedakan menjadi kegunaan yang bersifat sakral dan kegunaan yang bersifat profan. Kegunaan yang bersifat sakral; bahwa masyarakat Bali yang beragama Hindu melaksanakan empat jenis upacara keagamaan yang disebut dengan *catur yadnya* (*dewa yadnya*, *rsi yadnya*, *manusa yadnya* dan *pitra yadnya*). Masing-masing upacara keagamaan ini memiliki ketentuan mengenai tempat pelaksanaan masing-masing upacara tersebut. Ada yang dilakukan di dalam bangunan (*bale* dan bangunan *merajan*), dan ada yang dilakukan pada *natah*. Upacara yang dilakukan pada *natah* juga ada yang dilakukan pada *natah merajan*, *natah bale*, dan *natah penunggun karang*. Upacara *dewa yadnya* dilaksanakan pada *natah bale* dan *natah merajan*. Upacara *rsi yadnya* hanya dilaksanakan pada *griya* (rumah kasta *brahmana*) yaitu pada *natar merajan*. Upacara *pitra yadnya* seperti upacara

memandikan jenazah dan rangkaian upacara *ngaben* dilakukan pada *natah bale*. Upacara *manusa yadnya* seperti upacara tiga bulanan, potong gigi dan pernikahan dilakukan pada *natah merajan*, dan *natah bale*. Upacara *bhuta yadnya* seperti *mecaru* dilaksanakan pada *natar merajan*, *natah bale* dan *natah penunggun karang*. Kegiatan yang bersifat profan adalah terkait dengan upacara keagamaan yang bersifat sakral diatas yaitu kegiatan menjemur hasil bumi dan kegiatan penunjang upacara ritual seperti menerima tamu. Kegiatan ini umumnya dilakukan pada *natah bale*.

Fungsi *telajakan* adalah sebagai ruang antara sebelum masuk pekarangan rumah dan penata garis sempadan antara tembok penyengker dan *jelinjingan* tepi jalan dihiasi tanaman hias tradisional untuk kegiatan spiritual dan penunjang ekonomi keluarga. Fungsi *alun-alun* adalah tempat pertemuan masyarakat desa adat, sedangkan fungsi *setra* adalah tempat penguburan mayat dan atau tempat pembakaran mayat (*ngaben*). Fungsi radius *kesucian pura* adalah untuk melindungi kesakralan *pura* dari kegiatan yang bersihaf profan sehingga kekhusukan umat yang melaksanakan persembahyangan tidak terganggu.

### 2.2.3 Penataan ruang terbuka tradisional

Sebelum menguraikan penataan ruang terbuka tradisional, maka terlebih dahulu dikemukakan filosofi dan konsep penataan ruang tradisional Bali. Filosofi penataan ruang tradisional Bali dilandasi oleh falsafah *Tri Hita Karana* dan konsep-konsep lainnya yang terkait, dapat dijelaskan sebagai berikut. Konsep ruang tradisional Bali pada dasarnya bersumber dari filosofi religi kosmos dari agama Hindu, yang diwujudkan dalam bentuk keseimbangan antara manusia (mikro kosmos) dengan alam (makro kosmos) yang dipandang sebagai sesuatu yang berbeda (*Rwa Bhineda*), saling berpengaruh membentuk kesatuan . Filosofi ini melahirkan konsep *puser* (poros/sentral) yakni bertemunya arah yang berbeda *kangin-kauh* dan *kaja-kelod* yang menjadi landasan dalam pembentukan pusat desa (*pempatan agung*), menjadi sumbu yang jelas dalam penempatan fasilitas-fasilitas desa dimana

perumahan penduduk sebagai *periphery* (Widiastuti, 1996 : 19). Dijelaskan pula bahwa *pempatan agung* diwujudkan dengan adanya : *puri* sebagai pusat pemerintahan kerajaan; *alun-alun* tempat masyarakat mengadakan kegiatan sosial keagamaan; Pasar Desa; *Pura Desa*; *Bale Kul-kul*; pohon beringin; *wantilan* tempat warga mengadakan pertemuan.

Kosmos (makro kosmos dan mikro kosmos) tersebut terbentuk dari unsur-unsur yang sama untuk mencapai tujuan hidup lahir dan bathin melalui simbol-simbol sebagai upaya menyelaraskan diri dengan lingkungan kehidupannya. Landasan konsep ruang yang dapat dirumuskan dari filosofi ini, secara menerus sampai pada elemen terkecil yang pada hakekatnya merupakan penjabaran keselarasan kosmos melalui unsur-unsur *Tri Hita Karana* (*purusa/jiwa, perana/tenaga, prakerti/fisik*) dan *Tri Angga* (*utama angga, madya angga, nista angga*). Kedudukan filosofi dan landasan konsep ini bersifat kontekstual, dimana dalam penjabarannya timbul keragaman bentuk tatanan lingkungan dan tatanan sosial karena adanya konsepsi *tri pramana* : *desa – kala – patra* menjelaskan adanya fleksibilitas yang tetap terarah pada dasar filosofinya ( Anindya, 1991 : 30). Pola desa misalnya, ada Pola Desa Bali Kuna, Pola Desa Pegunungan, Pola Desa Pusat Kerajaan, Pola Desa Dataran, dan Pola Desa Pesisir Pantai. Tata nilai penempatan *sanggah* di Kabupaten Tabanan tidak selalu di *kaja kangin*; disamping arah orientasi *kaja* dan *kangin* tetap dipegang sebagai arah *utama*, penempatan *sanggah* juga berorientasi pada jalan. Sebagai ilustrasi pada Gambar : 2.1 disajikan Pola Desa Pusat Kerajaan yang berkembang menjadi pusat kota di Propinsi Bali. Fasilitas desa umumnya dikelompokkan disekitar *pempatan agung* sebagai pusat desa; mencakup : *puri*, pasar, alun-alun dan *wantilan*. Penempatan alun-alun tidak selalu di arah tenggara dari *pempatan agung*, namun juga pada arah barat daya.

Filosofi *Tri Hita Karana* dan *Tri Angga* sebagai landasan konsep ruang tradisional Bali menjelaskan bahwa keselarasan hubungan kosmos (alam), dari unsur kosmos yang terkecil diturunkan dari unsur kosmos yang lebih besar dimana dalam setiap unsur kosmos





PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

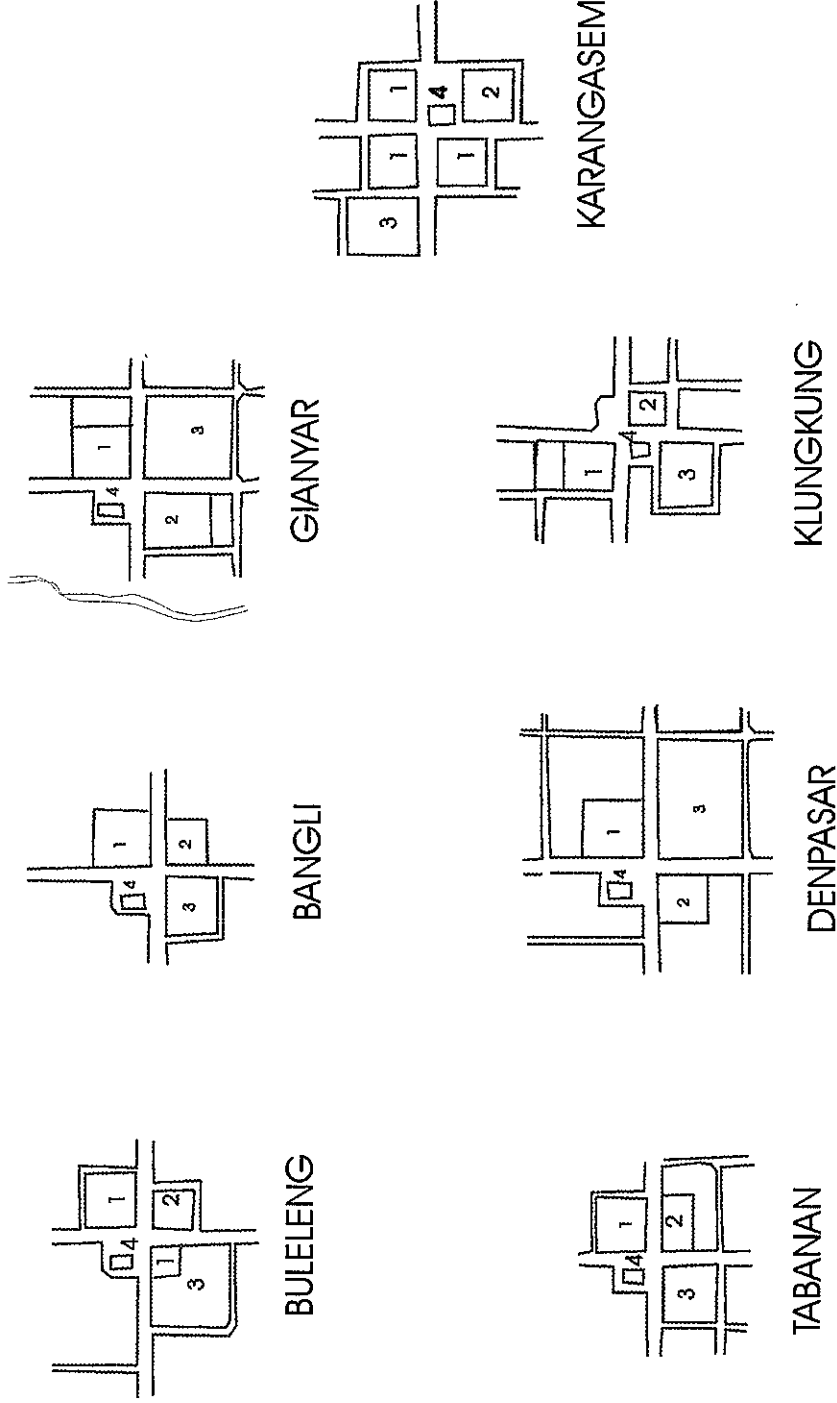
## TESIS

PERSEPSI MASYARAKAT BALI TERHADAP  
SISTEM NILAI RUANG TERBUKA TRADISIONAL  
DI KOTA DENPASAR

PUSAT KERAJAAN BERKEMBANG  
MENJADI KOTA KABUPATEN

### LEGENDA

- |   |           |
|---|-----------|
| 1 | PURI      |
| 2 | PASAR     |
| 3 | ALUN-ALUN |
| 4 | WANTILAN  |



SKALA PETA



UTARA

SUMBER:



ANINDYA (1991)

NO. PETA

HAL. PETA

2.1

26

melambangkan adanya tiga aspek yang mempengaruhi bentuk hubungan keselarasan antar unsur (Tabel : II.1 dan Tabel : II.2).

**TABEL : II.1**  
**TRI HITA KARANA DALAM SUSUNAN KOSMOS**

<b>SUSUNAN/UNSUR</b>	<b>JIWA</b>	<b>TENAGA</b>	<b>FISIK</b>
ALAM SEMESTA	<i>Paraatman</i>	Tenaga yang menggerakkan alam	Unsur-unsur <i>Pancamahabhuta</i>
LINGKUNGAN	<i>Kahyangan Tiga</i>	<i>Sima Krama Desa</i>	<i>Palemahan</i> /teritorial desa
TEMPAT TINGGAL	<i>Sanggah/Pemerajan</i>	Manusia penghuni	Pekarangan
MANUSIA	<i>Atman/Jiwa</i>	<i>Perana/Tenaga</i>	<i>Sarira</i> /badan

Sumber : Meganada. 1990 : 72

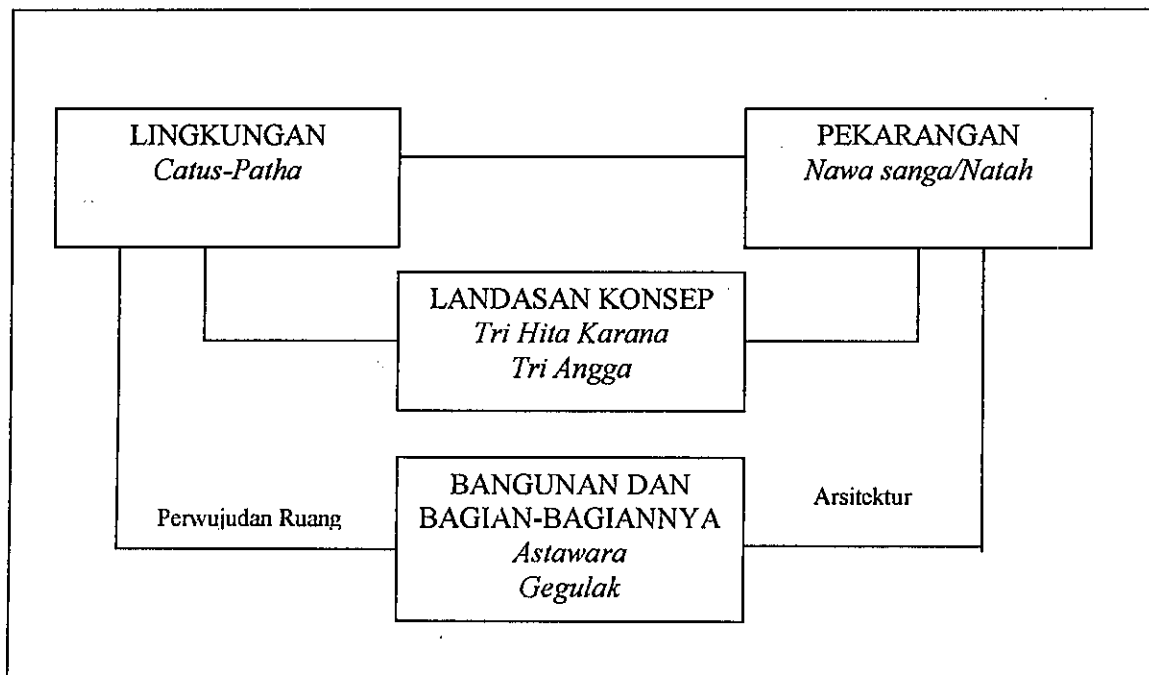
**TABEL : II.2**  
**TRI ANGGA DALAM SUSUNAN KOSMOS**

<b>SUSUNAN/UNSUR</b>	<b>SAKRAL UTAMA</b>	<b>NETRAL MADYA</b>	<b>KOTOR NISTA</b>
ALAM SEMESTA	Alam atas/ <i>Swah loka</i>	Alam tengah/ <i>Bwah loka</i>	Alam bawah/ <i>Bhur loka</i>
WILAYAH	Gunung	Daratan	Laut
LINGKUNGAN	<i>Kahyangan Tiga</i>	Permukiman	Kuburan
TEMPAT TINGGAL	<i>Sanggah/Pemerajan</i>	Bangunan rumah	Pintu Masuk
BANGUNAN	Atap	Kolom/ Dinding	Lantai
MANUSIA	Kepala	Badan	Kaki
MASA/WAKTU	Masa depan <i>Warthamana</i>	Masa kini <i>Nagata</i>	Masa lalu <i>Atita</i>

Sumber : Anindya. 1991 : 25

Seperti tersirat dalam landasan filosofi bahwa unsur-unsur keselarasan berlaku dari unsur-unsur yang terkecil sampai yang terbesar. Ini memberikan pengertian bahwa konsep tata ruang tradisional berlaku mulai dari lingkup wilayah, lingkungan sampai ke pekarangan. Hubungan kesinambungan antara landasan dengan konsep ruang digambarkan dalam Diagram : 2.2. Landasan konsep ruang yang dilandasi oleh *Tri Hita Karana* pada skala lingkungan atau

DIAGRAM : 2.2  
HUBUNGAN TATA RUANG DENGAN KONSEP YANG MELANDASINYA



Sumber : Anindya (1991)

desa perwujudannya adalah adanya *catus patha* sebagai pusat desa, sedangkan pada pekarangan adanya *natah* sebagai pusat orientasi massa bangunan yang berfungsi serbaguna. Pengertian desa dalam konteksual diatas mengandung adanya unsur-unsur *Tri Hita Karana*, yakni *Kahyangan Tiga*; *Sima Krama Desa*/masyarakat; dan *Palemahan*/ teritorial desa. serta unsur-unsur *Tri Angga* yakni susunan *utama*/sakral, *madya*/netral, dan *nista*/profan pada lingkungan desa. Dengan demikian pengertian desa merupakan pemenuhan landasan konsep tata ruangnya. Lebih jauh pengertian desa (*adat*) dijelaskan dalam bentuk terpenuhinya atribut atau syarat-syarat antara lain (Anindya, 1991: 29) :

- adanya wilayah dengan batas-batas tertentu yang disebut *palemahan desa* atau tanah desa;
- adanya warga desa yang disebut *pawongan desa*;
- adanya sejumlah *pura* sebagai pusat-pusat pemujaan para warga desa yang disebut *Kahyangan Tiga*;

- d. adanya suatu pemerintahan adat yang berlandaskan pada aturan-aturan adat tertentu / *awig-awig desa*.

Berdasarkan uraian diatas maka tata ruang tradisional pada lingkup desa memberikan pengertian terhadap ruang yang dibedakan atas tiga kelompok besar yakni :

1. *Ruang utama*; diperuntukan bagi kegiatan yang bersifat sakral, selalu berada di tempat yang lebih tinggi dari area di sekelilingnya seperti *Pura Desa*, letaknya dari arah *kaja-kangin* ke arah *kelod-kauh*;
2. *Ruang madya*; diperuntukkan bagi kegiatan bersifat keduniawian (sosial, ekonomi, dan budaya). Dunia manusia tempatnya lebih rendah dari *ruang utama*, letaknya dari tengah ke arah *kauh* dan *kelod*;
3. *Ruang nista*; diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan utilitas atau kegiatan lainnya seperti pemeliharaan hewan, kegiatan yang mengandung limbah dan sebagainya termasuk *setra*, letaknya di bagian *kelod-kauh*. *Setra* erat kaitannya dengan *Pura Dalem* sebagai komponen desa adat di Bali.

Secara spesifik variabel-variabel diatas membentuk perwujudan ruang yang digambarkan melalui perletakan pekarangan, fungsi peruntukan, dan jarak antar fungsi bangunan. Perletakan pekarangan dinyatakan melalui berbagai pantangan-pantangan, seperti disajikan berikut ini merupakan pekarangan yang diyakini berpengaruh buruk terhadap penghuninya (Sujana & Susila, 2000 : 137) :

- a. *Karang numbak rurung atau kerubuhan*; dimana suatu pekarangan berada di ujung jalan;
- b. *Karang ngeluanin atau disebut karang gerah*; adalah suatu pekarangan berada di arah *utama* dan berbatasan langsung dengan *kahyangan* atau *pura*;
- c. *Karang teledu nginyah*; suatu pekarangan yang terletak di ujung *tukad/sungai* (karang tumbak sungai);
- d. *Karang sandang lawe*; pekarangan dengan pintu keluar berhadapan dengan persimpangan jalan;

- e. *Karang sulanyapi*; adalah pekarangan yang dikelilingi oleh jalan/lorong;
- f. *Karang buta kabanda*; pekarangan yang diapit oleh jalan/lorong.

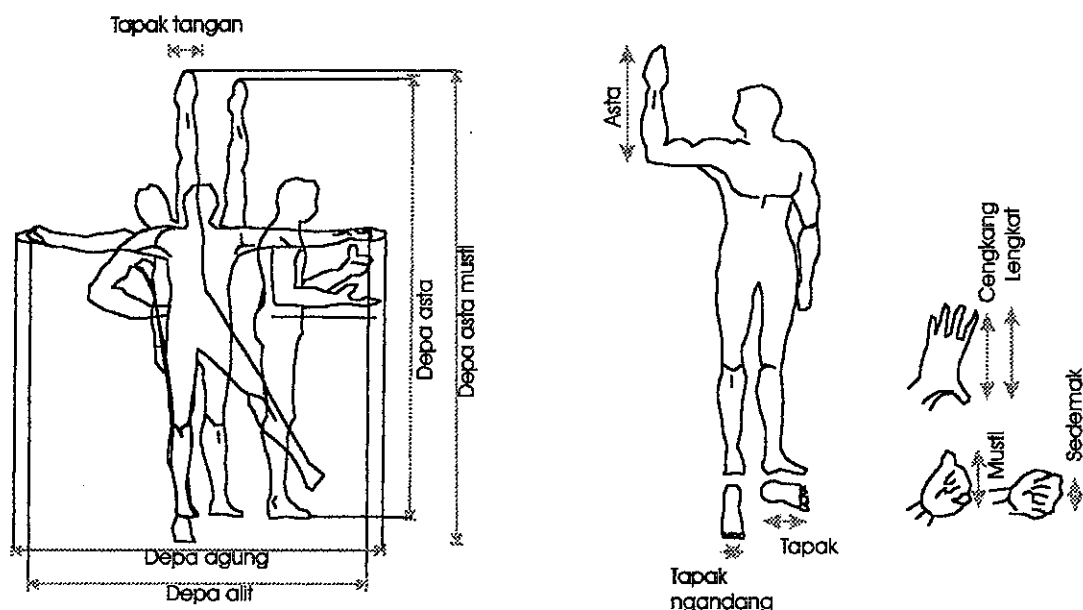
Fungsi peruntukan antara lain : permukiman, peribadatan, bale banjar dan sebagainya.

Jarak antara dua fungsi bangunan dalam skala lingkungan desa dinyatakan melalui :

1. Dimensi tak terukur; seperti : *apanimpug* (sejauh lemparan batu); *apeneleng* (sejauh cakupan pandangan mata); *apangebahan* (sejauh tinggi bangunan yang direbahkan) dan sebagainya.
2. Dimensi terukur : adalah ukuran dengan memakai standar anggota badan seperti : *depa*, tapak kaki, tangan, jari tangan dan sebagainya.

Secara spesifik sistem pengukuran dengan anggota badan seperti : *depa*, tapak kaki, tangan, jari tangan dan sebagainya disajikan pada Gambar : 2.3.

**GAMBAR : 2.3**  
**UKURAN TRADISIONAL**  
(Sumber : Adhika, 1994)

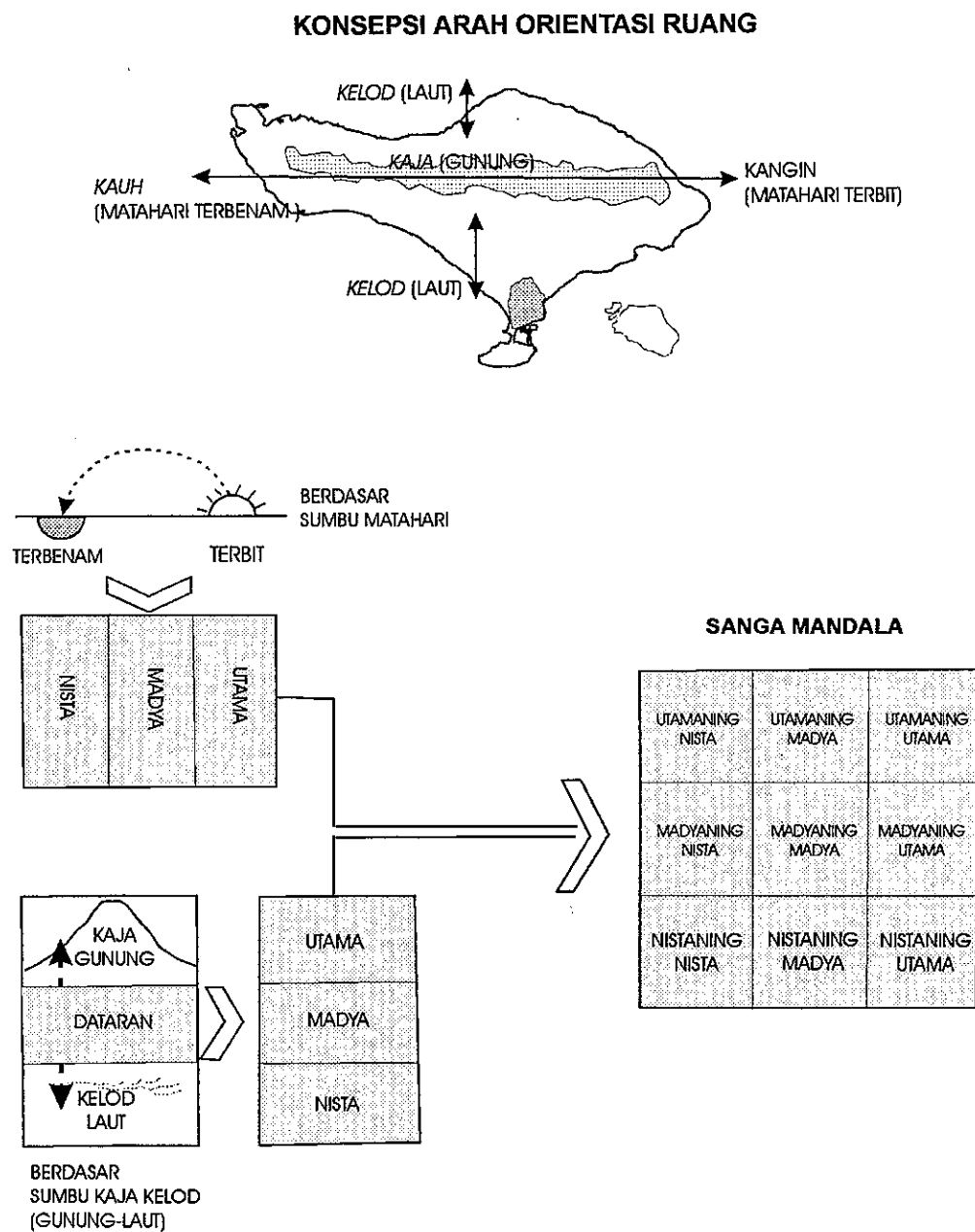


*Depa alit* adalah ukuran dari rentangan tangan dengan telapak tangan dikepalkan. *Depa agung* adalah ukuran dari rentangan tangan dengan telapak tangan terbuka. *Depa asta* adalah ukuran dari tumit sampai ujung jari tangan yang direntangkan keatas. *Depa asta musti* adalah jarak dari ujung jari kaki dengan tumit diangkat sampai ujung jari tangan yang direntangkan keatas. *Asta* adalah jarak dari siku sampai ujung jari tangan. *Tapak* adalah jarak memanjang telapak kaki dari tumit sampai ujung jari kaki. *Tapak ngandang* adalah jarak melintang atau lebar dari telapak kaki. *Musti* adalah jarak melintang dari telapak tangan yang dikepalkan dari kelingking sampai ibu jari. *Sedemak* adalah jarak melintang telapak tangan yang dikepalkan dari kelingking sampai telunjuk. *Cengkang* adalah jarak dari ujung ibu jari yang direntangkan sampai ke ujung telunjuk. *Lengkat* adalah jarak dari ujung ibu jari yang direntangkan sampai ke ujung jari tengah.

Penggunaan sistem pengukuran ini berbeda-beda, dimana satuan *depa* digunakan untuk mengukur pekarangan; satuan *tapak* untuk mengukur antar bangunan dalam pekarangan dan yang menggunakan jari tangan biasanya untuk ukuran konstruksi bangunan (tiang, *sunduk*, dan sebagainya) dan ukuran bangunan *sanggah*.

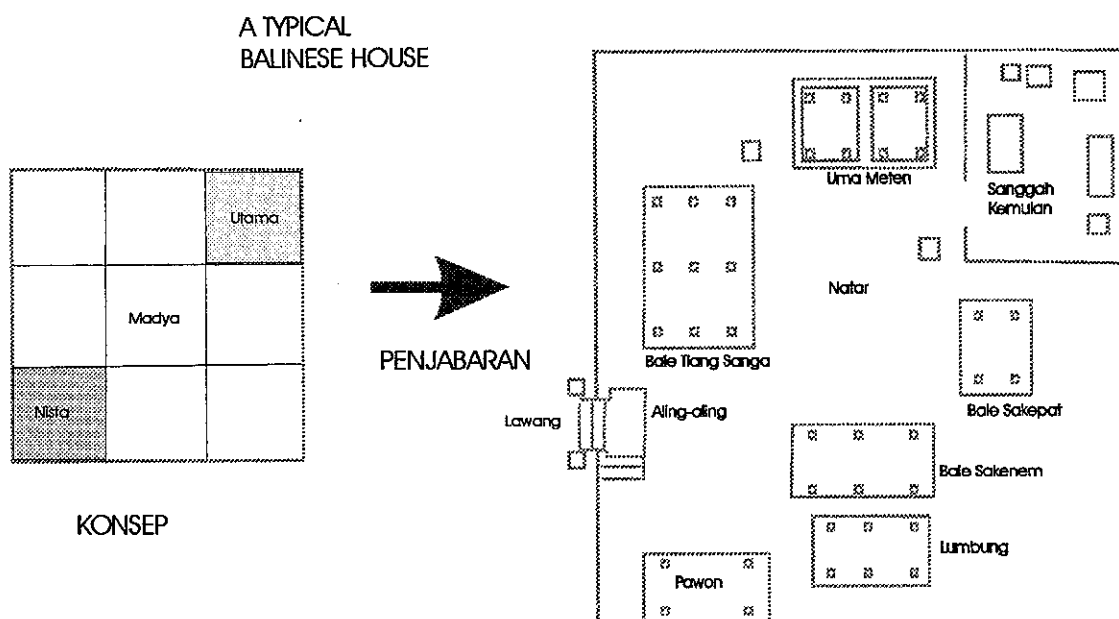
Konsep penataan ruang dalam lingkup pekarangan diturunkan dari konsep *Nawa Sanga* dan *Sanga Mandala* yang kemudian menjadi suatu pola ruang *Natah*. Tata nilai berdasar atas posisi vertikal dalam skala wilayah; gunung mempunyai nilai *utama*, dataran mempunyai nilai *madya* dan laut mempunyai nilai *nista*. Tata nilai dan arah orientasi berdasar atas garis horisontal mengacu pada terbit dan terbenamnya matahari; arah terbitnya matahari mempunyai nilai *utama*, puncak kulminasi matahari mempunyai nilai *madya*, dan arah terbenamnya matahari mempunyai nilai *nista*. Jika kedua sistem penentuan nilai ini digabungkan maka akan lahir Konsep *Sanga Mandala* yang membagi ruang menjadi sembilan segmen dan memiliki nilai yang dianggap paling utama (*utamaning utama*) sampai pada nilai yang paling *nista* (*nistaning nista*) seperti ilustrasi Gambar : 2.4.

**GAMBAR : 2.4**  
**KONSEP ARAH ORIENTASI RUANG**  
**DAN KONSEP SANGA MANDALA**  
 (Sumber : Adhika, 1994)



Konsep *Sanga Mandala* sebagai perwujudan dunia kecil (*bhuana alit*) atau mikro kosmos yang disebut pola *natah* dalam satu unit pekarangan. Pola *Natah* ini selanjutnya menjadi dasar pembangunan unit fungsi dalam area pekarangan; tata nilai fungsi akan membedakan besaran dan perwujudan bangunan. Sebagai alat untuk menjelaskan dimensi ruang dilakukan melalui pekarangan tempat hunian, yang peranannya sangat dominan dalam tata ruang tradisional Bali. (Gambar : 2.5 ). Konsep ini umumnya berlaku di Bali dataran; daerah yang berada antara pegunungan dan laut (Bappeda, 1982 : 22)

**GAMBAR : 2.5**  
**KONSEP DAN PENJABARAN SANGA MANDALA**  
(Sumber : Adhika,1994)



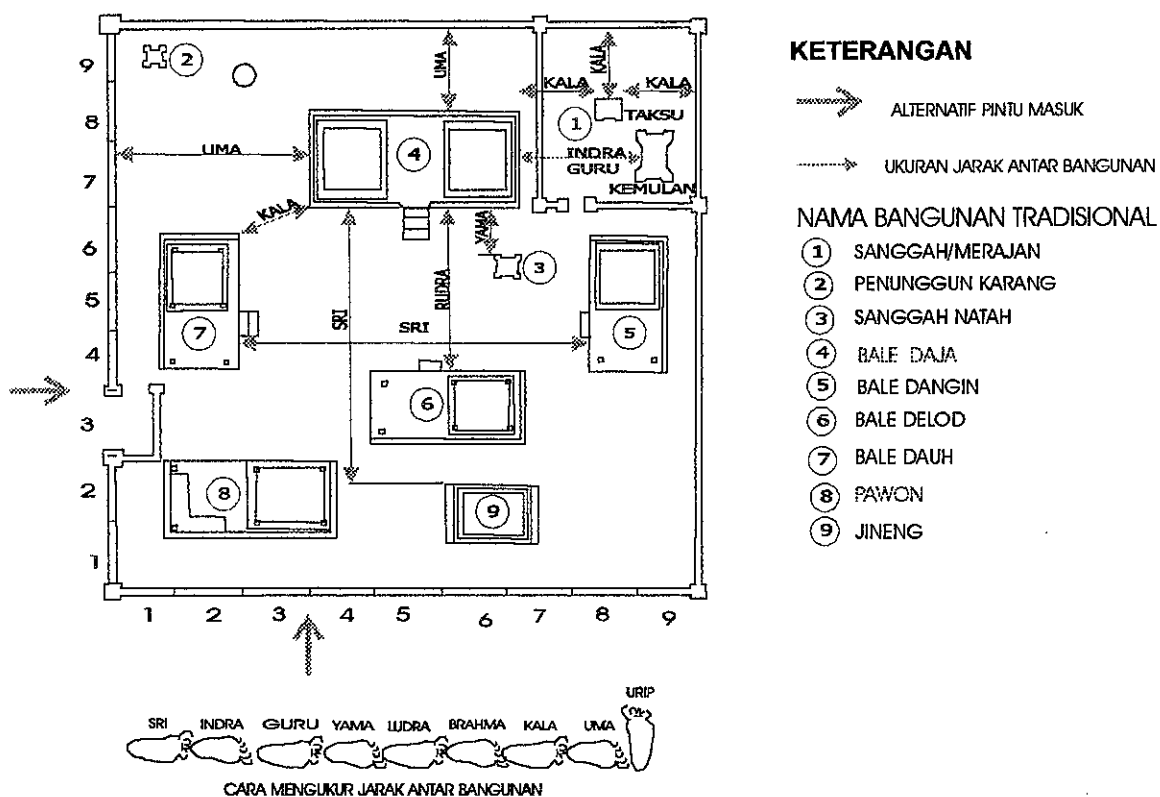
Pengukuran petak pekarangan dipakai *depa asta musti* ( $\pm 2,40$  meter) dimana ukuran pekarangan yang membawa kebaikan, menurut *asta bumi* (= petunjuk pengukuran pekarangan) yakni ukuran dari *kaja* (utara) kearah *kelod* (selatan) dan dari arah *kangin* (timur) ke arah *kauh* (barat) masing-masing dengan namanya sebagai berikut (Gambar, 2001 : 27). *Gajah lembu*, ukuran pekarangan 15 x 14 *depa asta musti*; *wreksa* ukuran pekarangan 12 x 11 *depa asta musti*; *gajah* ukuran pekarangan 11 x 10 *depa asta musti*; *duaaja*, ukuran pekarangan



10 x 9 *depa asta musti*; *singa* ukuran pekarangan 9 x 8 *depa asta musti*; dan *singa* ukuran pekarangan 8 x 7 *depa asta musti*. Pengukuran ini dalam penggunaannya selalu diikuti dengan *pengurip* sebagai ukuran tambahan dengan memakai dasar ukuran tangan/lengan (*gegulak*).

Jarak *depa asta musti* diperkirakan 2,40 meter maka ukuran pekarangan dengan kalibrasi ukuran *depa* diperkirakan antara 3 are sampai 8 are. Ukuran pekarangan ini juga akan berpengaruh terhadap kedudukan pintu masuk (*kori pemesuan*). Perletakkannya dengan membagi lebar/ panjang pekarangan menjadi sembilan sesuai dengan filosofi *Dewata Nawa Sanga*. Jumlah kelipatan dimensi dasar dan arah pintu akan mempengaruhi kehidupan penghuninya. Pintu masuk terletak pada nilai paling *nista* yakni  $\frac{1}{3}$  bagian dari arah paling *nista* yakni didekat dapur (*pawon*) (Gambar : 2.6) .

**GAMBAR : 2.6**  
**NAMA-NAMA BANGUNAN TRADISIONAL, PENGUKURAN**  
**JARAK ANTAR BANGUNAN DAN ALTERNATIF PINTU MASUK**  
(Sumber : Anindya, 1991)



Jenis dan luas bangunan tradisional : *sakapat* 3 x 2,5 meter, *sakanem* 6 x 2 meter, *sakutus* 5 x 2,5 meter, *antesari* 4 x 5 meter, *tiang sanga* 6 x 6 meter (Bidja, 2001 : 2). Keseluruhan jumlah luas bangunan tersebut 68 meter persegi. Dibandingkan dengan luas pekarangan minimum 3 are seperti tersebut diatas maka perbandingannya  $\pm 23 \%$ .

Pengukuran perletakan bangunan adalah dengan memakai telapak kaki ( Gambar : 2.6) atau disebut juga dengan *asta wara*. Jarak antar bangunan ditentukan dengan kelipatan ukuran dasar yang urutan nama (simbol/personifikasi dewa) dimulai dengan sebutan *Sri, Indra, Guru, Yama, Ludra, Brahma, Kala, Uma, Urip* (telapak kaki melintang). Besarnya kelipatan ukuran menunjukkan status sosial profesi penghuninya dan perwujudan dalam mencapai keselarasan, ketetapan dasar jarak antar bangunan tersebut ditentukan dengan jatuhnya kelipatan ukuran .

*Natah* sebagai bagian dari penataan pekarangan dilandasi oleh *Sanga mandala, tri angga*, dan *rwa bhineda*, membagi pekarangan menjadi sembilan yang mempunyai nilai masing-masing dimana *natah* terletak di tengah-tengah dengan nilai *madyaning madya* atau yang paling netral dan mencerminkan adanya kehidupan.

Ada dua cara pengukuran *natah* , masing-masing diyakini berpengaruh terhadap kehidupan penghuninya ( Gambar, 2001 : 32 – 36 ). Pertama ukuran *natah* berdasarkan jarak dari *bale daja* ke *pawon* dan dan jarak dari *bale dangin* ke *bale dauh*. Menurut Putra, ukuran *natah* dengan cara pertama ini 15 x 15 tapak ditambah *pelebihi* dengan jumlah bervariasi sesuai keinginan atau cita-cita pemilik rumah. Satu tapak kira-kira sama dengan 30 sentimeter sehingga ukuran *natah* minimal 4,5 x 4,5 meter belum termasuk *pelebihi* (wawancara 17 Juni 2002) Cara kedua berdasarkan jarak antar bangunan mulai dari bangunan *piasan-bale daja*, dari *bale daja-bale dangin*, dari *bale daja – bale dauh*, dari *bale dangin-bale delod* dan *bale dauh-pawon*. Pengukuran *natah* dengan cara kedua ini, sebidang tanah diibaratkan sebagai sebidang kertas kosong berbentuk segi empat panjang diletakkan di tanah dengan orientasi *Kaja-Kelod* (Utara-Selatan untuk Bali Selatan) dan *Kangin-Kauh*; dimana orientasi gunung

disebut *Kaja* dan orientasi laut disebut *Kelod*, sedang orientasi terbitnya matahari disebut *Kangin* dan orientasi terbenamnya matahari disebut *Kauh*. Kemudian gugus-gugus massa bangunan ditata dengan satuan ukuran tapak kaki. Kelipatan ukuran didasarkan atas perhitungan *asta dewata* (delapan personifikasi dewa). Setiap satuan ukuran dan *pengurip* yang dipilih, masing-masing membawa perwatakan yang diyakini berpengaruh terhadap keberuntungan penghuni. Adapun bangunan yang ada, namanya disesuaikan dengan fungsi dan tata letak pada suatu pekarangan .

*Bale Daja (Kaja)* atau *Meten* terletak di bagian utara difungsikan sebagai tempat tidur anak gadis/wanita, disebut *gedong* bila difungsikan sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka/sakral atau benda-benda berharga lainnya. *Bale Dangin (Kangin)* terletak di bagian timur dan *Bale Dauh (Kauh)* terletak dibagian barat difungsikan sebagai tempat tidur orang tua dimalam hari, sedang pada siang hari dipakai sebagai tempat kerja dan terima tamu keluarga. *Bale Sumanggen* terletak dibagian selatan berfungsi sebagai tempat melaksanakan upacara *manusa yadnya* dan *pitra yadnya/ngaben*, fungsi profannya sebagai tempat tidur anak laki-laki dan menerima tamu yang dihormati. *Pawon* (dapur) terletak dekat dengan pintu masuk berfungsi sebagai tempat masak dan kegiatan ibu rumah tangga lainnya. Disebelah dapur dan dibelakang *Sumanggen* terletak *Lumbung/Jineng* sebagai tempat penyimpanan padi dan hasil bumi lainnya. Tempat suci keluarga yang disebut *Mrajan* atau *Sanggah* terletak di timur laut berfungsi sebagai tempat pemujaan atau tempat sebahyang keluarga. Pada *natah* terletak bangunan *sanggah natah*, tempat persembahyangan jika tidak dapat ke *sanggah* induk.

Ruang terbuka lainnya yang terkait dengan pekarangan adalah *telajakan*. Lokasi *telajakan* pada umumnya berbatasan dengan jalan . Ditanami pohon yang dapat menunjang kegiatan upacara agama dan pemeliharaannya oleh pemilik *telajakan*. *Telajakan* ini telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda No.10 tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar); ditentukan lebar *telajakan* bervariasi sesuai dengan lebar jalan : minimum 0,5 meter pada lebar jalan lebih kecil atau sama dengan 6 meter; sampai lebar

*telajakan* minimum 2 meter pada jalan lebih besar atau sama dengan 18 meter. *Telajakan* dalam peraturan tersebut artinya disediakan oleh pemilik bangunan karena lebar *telajakan* dihitung mulai dari pinggir got terluar dari jalan.

Telah dijelaskan secara sepintas dalam pola desa pusat kerajaan bahwa *alun-alun* merupakan salah satu fasilitas lapangan terbuka; sarana pertemuan masyarakat yang diletakan di depan *puri*, arah tenggara dari *pempatan agung*. Alun-alun Puputan sesuai dengan namanya mempunyai arti tersendiri karena digunakan sebagai simbol perang *puputan* (perang habis-habisan) oleh Raja Gusti Gde Ngurah kerajaan Badung untuk melawan Belanda meskipun lokasi perang puputan lokasinya di sekitar Banjar Taensiat. Sampai saat ini, secara tradisional *Alun-alun Puputan* digunakan sebagai sarana upacara *Tawur Kesanga*.

*Setra* sebagai ruang terbuka tradisional; tempat penguburan mayat dan atau tempat pembakaran mayat (upacara *ngaben*) diletakkan pada bagian barat daya dari desa adat. Dalam tata nilai, arah barat daya atau *kelod kauh* adalah dipandang sebagai arah *nista* (kotor). Ketentuan mengenai penggunaan *setra* sebagai tempat penguburan mayat dan atau *ngaben* diatur oleh desa adat yang disebut *penanjung batu*. *Penanjung batu* adalah syarat (kewajiban) yang harus dipenuhi umat Hindu yang tidak berstatus sebagai *krama* (warga) desa adat, apabila ingin menggunakan *setra* milik desa adat. Hakekat pengenaan penanjung batu bermakna spiritual ; merupakan *yadnya* (peran serta) pembangunan *Pura Dalem dan Prajapati*, sebab umat hindu yang tidak berkedudukan sebagai warga desa adat belum mengeluarkan biaya dari pembangunan pura tersebut.

Ukuran yang dipakai dalam pengukuran radius kesucian *pura* adalah ukuran *apaneleng* = sejauh mata memandang, *apanimpug* = sejauh lemparan, dan *apanyenger* = sejauh yang dipagari. Radius kesucian sesuai dengan Surat Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat No.11/Kep./I/PHDIP/1994 tentang *Bhisama Kesucian Pura* adalah untuk *Pura Sad Kahyangan* dipakai ukuran *apaneleng agung* (minimal 5 km dari pura); untuk *Pura*

*Dang Kahyangan* dipakai ukuran *apeneleng alit* (minimal 2 km dari pura); dan untuk *Kahyangan Tiga* dan *pura* lainnya dipakai ukuran *apanimpug* atau *apanyengker*.

Tempat suci atau *pura* tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah *kekeran* dengan ukuran *Apeneleng* = sejauh mata memandang, *apanimpug* = sejauh lemparan, dan *apanyengker* = sejauh yang dipagari. Satuan *apaneleng* (sejauh mata memandang) dalam kaitannya dengan perencanaan taman Kota Chandigarh, India Le Corbusier mengemukakan bahwa cakupan pandangan mata adalah sejauh 400 meter (Wrede & Adams eds.1991 : 84-85).

Ketentuan radius kesucian *pura* untuk wilayah Kota Denpasar diperkuat dengan Perda Tata Ruang No. 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar. Ketentuan dalam Perda tersebut; radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* sama dengan yang diatur dalam Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI) No. 11/ Kep./ I / PHDIP / 1994. Radius kesucian *Pura Kahyangan Desa* dan radius kesucian *pura* lainnya dipertegas dengan ketentuan radius 50 meter terhadap bangunan bertingkat dan 25 meter terhadap bangunan tidak bertingkat. Pengaturan seperti ini juga dilakukan di Jepang terhadap bangunan Shrine, tempat dewa shinto memberikan ruang tertentu dimana para pengunjung dilarang memasukinya agar tidak mengganggu kesuciannya (Ashihara terjemahan Gunadi, 1974 : 25 –27). Adanya Surat Keputusan PHDI dan Perda Tata Ruang tentang radius kesucian *pura* menunjukkan bahwa radius kesucian pura sudah menjadi kebijaksanaan Pemda Kota Denpasar. Bagi bangunan yang telah memiliki perijinan lengkap pada radius kesucian *pura* diberlakukan sttus quo. Apabila mengadakan perbaikan dan atau pembangunan baru harus memenuhi ketentuan radius kesucian pura. Hanya bangunan yang terkait dengan kemudahan aktifitas keagamaan yang diijinkan pada radius kesucian *pura*.

Proses selanjutnya dari adanya kebijaksanaan tersebut adalah proses implementasi. Proses implementasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang : pemrakarsa kebijaksanaan; pejabat-pejabat pelaksana di lapangan; dan aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (Wahab, 2001 :

63). Pemahaman yang mendalam terhadap persepsi kelompok sasaran, sangat penting bagi pejabat pemrakarsa dan pejabat pelaksana. Sebab, pemahaman semacam itu akan memungkinkan untuk mengantisipasi umpan balik dan peka terhadap asumsi-asumsi tingkah laku yang melandasi setiap penyusunan program.

Ada beberapa model implementasi kebijaksanaan, salah satu diantaranya yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang disebut kerangka analisis implementasi (Wahab, 2001: 81-108). Peran penting mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut dibedakan menjadi tiga katagori (variabel pengaruh):

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan;
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi;
3. Pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Pada variabel pertama disebutkan antara lain yang mempengaruhi pencapaian tujuan adalah tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki. Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki, semakin sukar memperoleh implementasi yang berhasil. Atau keberhasilannya apabila kelompok sasaran tersebut merupakan sebagian kecil dari totalitas penduduk suatu wilayah.

Sedangkan variabel tergantung adalah :

1. Output-output kebijaksanaan (keputusan-keputusan) dari badan badan pelaksana;
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut;
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana;
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut;
5. Evaluasi sistem politik terhadap peraturan baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar (atau upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan/isinya.

## 2.3 Konsep Ruang Terbuka Non Tradisional

### 2.3.1 Pengertian dan jenis ruang terbuka non tradisional

Pengertian ruang terbuka didefinisikan secara umum sebagai bagian dari lahan kota yang tidak ditempati oleh bangunan dan hanya dapat dirasakan keberadaannya jika sebagian atau seluruh lahannya dikelilingi pagar. Selanjutnya ruang terbuka kota didefinisikan sebagai lahan dengan penggunaan spesifik yang fungsi atau kualitasnya terlihat dalam komposisinya (Rapuano, 1964 : 11). Pengertian ruang terbuka antara lain juga dikemukakan bahwa ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Dengan demikian, ruang terbuka merupakan suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik sehingga bisa terjadi intervensi sesuatu dari luar seperti air hujan dan terik matahari. Ruang terbuka merupakan aktifitas sosial yang melayani dan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat kota.

Ruang terbuka menjadi karakter arsitektur ketika terlingkupi oleh elemen-elemen bangunan atau menjadi bagian dari bangunan tersebut. Sering ruang yang demikian merupakan bagian dari sebuah bangunan. Ruang terbuka, kadang-kadang mengelilingi sebuah bangunan atau terlingkupi oleh sekelompok bangunan. Kadang-kadang menjadi bagian ruang depan sebagai pusat orientasi atau sebagai pembatas (Simonds, 1961 : 175). Ruang terbuka adalah halaman dari suatu bangunan (*precinct*) (Ashihara terjemahan Gunadi, 1974 : 27). Disebutkan pula adanya ruang positif dan ruang negatif; dimana ruang positif adalah ruang yang memusat ke dalam dan negatif adalah ruang yang merembes keluar. Ruang positif mengandung kepentingan dan kehendak manusia didalamnya. Salah satu teori ruang mengatakan bahwa dalam membuat rencana pertama-tama ditentukan batasnya kemudian bangunan-bangunan diatur didalamnya. Sebaliknya ruang negatif adalah ruang yang terjadi secara spontan atau tiadanya rencana ke arah luar ruang tidak teratur ( Simonds, 1961 : 175 dan

Ashihara terjemahan Gunadi, 1974 : 17 ). Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan antara lain menyebutkan bahwa ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Pengertian ruang terbuka dapat disimpulkan adalah suatu ruang kosong tanpa penutup fisik dan terkait dengan suatu bangunan atau kelompok bangunan. Jenis-jenis ruang terbuka antara lain dikemukakan bahwa ruang terbuka merupakan wadah kegiatan fungsional maupun aktivitas ritual yang mempertemukan sekelompok masyarakat, dalam rutinitas normal kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan-kegiatan periodik (Carr, 1992 : 3). Termasuk dalam jenis ini adalah *central park, downtown park, commons park, neighborhood park, dan mini/vest-pocket park* ( Carr, 1992 : 79). Senada dengan hal tersebut, kebutuhan ruang terbuka secara berurutan mulai dari : *family* (halaman) , *cluster, neighborhood, community, city, and region* ( Simonds, 1961 : 212-213). Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 menyebutkan jenis-jenis ruang terbuka hijau : kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan. Disebutkan pula bahwa jenis klasifikasi *park, open space, and pathways* seperti disajikan pada Tabel : II.3 (Mertes & Hall, 1995 : 94 – 95).

Berdasarkan definisi dan jenis ruang terbuka seperti diuraikan tersebut, bahwa terbuka adalah suatu ruang kosong tanpa penutup fisik dan terkait dengan suatu bangunan atau kelompok bangunan. Ruang terbuka tersebut diperlukan mulai dari keluarga sampai kepada ruang terbuka untuk masyarakat umum.



**TABEL : II.3**  
**DAFTAR KLASIFIKASI TAMAN, RUANG TERBUKA, DAN JALAN KECIL**

<b>Klasifikasi Taman dan Ruang Terbuka</b>				
<b>Klasifikasi</b>	<b>Diskripsi Umum</b>	<b>Kriteria Lokasi</b>	<b>Kriteria Besaran</b>	<b>Standar Tingkat Pelayanan</b>
Mini-Park	Digunakan pada tempat-tempat terbatas, terpencil atau kebutuhan rekreasi yang unik.	Kurang dari ¼ mil dari tempat tinggal	Antara 2.500 kaki persegi sampai 1 acre	Ya
Neighborhood Park	Taman Lingkungan merupakan unit dasar dari sistem taman yang menyediakan tempat rekreasi dan pusat orientasi sosial lingkungan. Terutama untuk kegiatan aktif informal dan rekreasi pasif.	¼ sampai ½ mil dari tempat tinggal tanpa dihalangi oleh jalan non perumahan atau penghalang fisik lainnya	5 acre dipertimbangkan untuk ukuran minimum. Yang optimal adalah 5 sampai 10 acre.	Ya
School Park	Bergantung pada keadaan, gabungan taman dengan lokasi sekolah dapat memenuhi syarat untuk kelas-kelas taman lainnya	Lokasinya ditentukan oleh daerah pemilik sekolah	Berubah-ubah, tergantung fungsinya	Ya; tapi tidak hanya dihitung penggunaan untuk sekolah.
	seperti : taman lingkungan, taman komunitas, komplek olah raga dan taman penggunaan khusus.			
Community Park	Menampung penggunaan lebih luas dari taman lingkungan. Menekankan pada kebutuhan rekreasi komunitas, dan juga memelihara ruang terbuka dan bentang alam yang unik.	Ditentukan oleh kualitas dan kesesuaian dari lokasi. Umumnya melayani dua lingkungan atau lebih dan jarak antara ½ sampai 3 mil	Jika diperlukan untuk mengakomodasi penggunaan-penggunaan yang diinginkan. Biasanya antara 30 dan 50 acre	Ya
Large Urban Park	Taman Kota yang luas menampung penggunaan yang lebih luas dari taman komunitas dan digunakan ketika taman komunitas tidak memadai untuk melayani kebutuhan dari komunitas. Menekankan pada kebutuhan rekreasi komunitas, dan juga memelihara ruang terbuka dan bentang alam unik.	Ditentukan oleh kualitas dan kesesuaian dari lokasi. Umumnya melayani seluruh masyarakat kota	Jika diperlukan untuk mengakomodasi penggunaan-penggunaan yang diinginkan. Biasanya ; minimum 50 acre, optimal 75 acre atau lebih.	Ya
Natural Resource Area	Lahan yang menyimpan sumber alam penting, bekas bentang alam, ruang terbuka, dan estetika visual/penyangga.	Ketersediaan dan peluang sumber alam	Berubah-ubah	Tidak
Greenway	Efektifitas keterkaitan komponen-komponen sistem taman bersama-sama membentuk sebuah lingkungan taman yang menerus.	Ketersediaan dan peluang sumber alam	Berubah-ubah	Tidak

Lanjutan Tabel : II.3

Sport Complex	Konsolidasi program berat atletik lapangan dan menyatukan lokasi fasilitas besar dan kecil yang strategis bagi komunitas.	Lokasi yang strategis untuk fasilitas masyarakat luas.	Ditentukan oleh proyeksi permintaan. Umumnya minimum 25 acre, optimal 40 - 80 acre	Ya
Special Use	Mencakup berbagai macam fasilitas rekreasi dan taman, berorientasi pada penggunaan tunggal.	Berubah-ubah, tergantung pada spesifik penggunaan	Berubah-ubah	Tergantung pada tipe dari penggunaan
Private Park/ Recreation Facility	Taman dan Fasilitas Rekreasi Kepemilikan Swasta, berkontribusi untuk Taman Umum dan sistem rekreasi.	Berubah-ubah, tergantung pada spesifik penggunaan	Berubah-ubah	Tergantung pada tipe dari penggunaan
<b>Klasifikasi Jalan Kecil</b>				
<b>Klasifikasi</b>	<b>Diskripsi Umum</b>	<b>Diskripsi Masing-masing Tipe</b>	<b>Standar Tingkat Pelayanan</b>	
Park Trail	Jalan Kecil serbaguna yang berada didalam jalur hijau, taman dan area sumber alam. Penekanannya pada nilai rekreasi dan keharmonisan dengan lingkungan alam.	Tipe I : Memisahkan/ penggunaan tunggal perkerasan jalan untuk pejalan kaki atau pengendara sepeda/pelari skats. Tipe II : Perkerasan jalan serbaguna untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda /pelari skats. Tipe III : Jalan kecil alami. Mungkin dengan perkerasan atau tanpa perkerasan permukaan jalan.	Tidak	
Connector Trails	Jalan Kecil serbaguna yang menekankan keamanan perjalanan pejalan kaki dari dan ke taman dan masyarakat sekitarnya. Perhatiannya lebih kepada transportasi dari pada rekreasi.	Tipe I : Memisahkan/ penggunaan tunggal perkerasan jalan untuk pejalan kaki atau pengendara sepeda/pelari skats lokasinya pada ruang bebas diluar DMJ (Contoh : DMJ Jalan Kereta api tua). Tipe II : Memisahkan/ penggunaan tunggal perkerasan jalan untuk pejalan kaki atau pengendara sepeda/pelari skats. Tipe yang berada di dalam DMJ.	Tidak	
On Street Bikeways	Bagian jalan yang dipaving untuk keamanan pemisahan pengendara sepeda dari lalu lintas kendaraan	Route sepeda : Bagian jalan didesain untuk menampung keinginan pengendara sepeda atau penggunaan tersendiri pada bagian jalan raya untuk pengendara sepeda.	Tidak	
All-Terrain Bike Trail	Jalan kecil di luar Jalan Raya untuk sepeda gunung.	Jalan kecil loop dengan penggunaan tunggal. Biasanya berlokasi di dalam taman yang lebih luas dan area sumber alam.	Tidak	
Cross-Country Ski Trail	Pengembangan Jalan-Jalan Kecil untuk tradisional dan skate ski lintas alam	Jalan Kecil loop, biasanya berlokasi di dalam taman yang lebih luas dan area sumber alam.	Tidak	
Equestrian Trail	Pengembangan Jalan-jalan Kecil untuk rekreasi penunggang kuda	Jalan-Kecil loop, biasanya berlokasi di dalam taman yang lebih luas dan area sumber alam. Kadang-kadang dikembangkan serbaguna dengan mendaki dan sepeda gunung dimana konflik dapat dikontrol	Tidak	

Sumber : (Mertes &amp; Hall. 1995 : 94 – 95)

Jenis-jenis ruang terbuka non tradisional adalah : halaman (*precinct*) dari suatu bangunan; taman dan ruang terbuka mencakup : *mini-park, neighborhood park, school park, community park, large urban park, natural resource, area greenway, sport complex, special use, private park/ recreation facility*; dan klasifikasi *pathway*.

### 2.3.2 Fungsi ruang terbuka non tradisional

Kegunaan dari ruang terbuka dilihat dari fungsi dasarnya adalah (Kaiser, et al. 1995 : 297) sebagai berikut :

1. Melindungi penduduk dan kepemilikannya dari bencana alam;
2. Melindungi sumber-sumber alam dan proses lingkungan;
3. Pengelolaan dan perlindungan sumber-sumber alam untuk produksi ekonomi;
4. Melindungi dan mempertinggi kenyamanan budaya dan alam;
5. Melindungi dan menyediakan rekreasi luar ruangan, pendidikan, dan fasilitas budaya;
6. Mempertegas bentuk kota.

Disebutkan pula bahwa fungsi ruang terbuka adalah sebagai taman dan tempat rekreasi aktif maupun rekreasi pasif ; sebagai tempat kegiatan sosial dan pendidikan; memelihara bentang alam yang unik; melindungi peninggalan sejarah; melindungi sumber-sumber alam yang potensial; dan harmonisasi dengan lingkungan (Mertes & Hall, 1995 : 98 – 113). Fungsi ruang terbuka juga dipilah menjadi fungsi yang bersifat umum dan fungsi ekologis. Fungsi umum adalah : tempat bermain dan berolah raga; tempat bersantai; tempat komunikasi sosial; tempat peralihan, tempat menunggu; sebagai ruang terbuka untuk mendapatkan udara segar dengan lingkungan; sebagai sarana penghubung antara suatu tempat dengan tempat yang lain; sebagai pembatas atau jarak di antara massa bangunan. Fungsi ekologis : penyegaran udara; menyerap air hujan; pengendalian banjir; memelihara ekosistem tertentu; pelembut arsitektur. (Budihardjo, 1999 : 91). Dapat ditambahkan bahwa tahun 1990-an Parkway mulai

dikembangkan sebagai tempat rekreasi dan pedestrian. Jadi pada sempadan jalan tidak dibiarkan kosong, dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan pedestrian. (Turner, 1996 : 202-207). Sedangkan untuk ruang terbuka pekarangan; kecendrungan perkembangan rumah di Amerika, membatasi pekarangan dengan tembok untuk menjaga privasi dan menata pertamanan halaman muka dan halaman belakang. (Eckbo, 1950 : 232 dan Simonds, 1961 : 201).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa nilai fungsi ruang terbuka mencakup fungsi-fungsi perlindungan; fungsi rekreatif; sarana penghubung antara suatu tempat dengan tempat yang lain dan fungsi pembatas atau jarak diantara bangunan. Secara umum nilai fungsi ruang terbuka non tradisional adalah :

- |   |   |
|---|---|
| (1). Tempat bermain dan berolah raga;                     | (9). Penyerapan air hujan;                                    |
| (2). Tempat bersantai;                                    | (10). Pengendalian banjir;                                    |
| (3). Tempat komunikasi sosial;                            | (11). Memelihara ekosistem tertentu;                          |
| (4). Tempat peralihan, tempat menunggu;                   | (12). Pelembut arsitektur;                                    |
| (5). Tempat untuk mendapatkan udara segar;                | (13). Melindungi peninggalan sejarah;                         |
| (6). Sarana penghubung antara satu tempat ke tempat lain; | (14). Tempat kegiatan sosial dan pendidikan;                  |
| (7). Pembatas diantara massa bangunan;                    | (15). Harmonisasi dengan lingkungan;                          |
| (8). Penyegaran udara;                                    | (16). Melindungi dan mempertinggi kenyamanan budaya dan alam. |

### 2.3.3 Penataan ruang terbuka non tradisional

Penataan ruang terbuka non tradisional berkaitan dengan fungsi dari masing-masing ruang terbuka. Berkaitan dengan fungsi perlindungan, dilakukan penataan dengan menetapkan kepadatan bangunan dalam bentuk Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yakni perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dengan luas petak peruntukan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.640/KPTS/1986 Tentang Perencanaan Tata Ruang Kota diatur pengelompokan Kepadatan Bangunan sebagai berikut :

- Blok peruntukan dengan Koefisien Dasar bangunan sangat tinggi (lebih dari 75 %).
- Blok peruntukan dengan Koefisien Dasar bangunan tinggi (50 - 75 %).
- Blok peruntukan dengan Koefisien Dasar bangunan menengah (20 - 50 %).
- Blok peruntukan dengan Koefisien Dasar bangunan rendah (5 - 20 %).
- Blok peruntukan dengan Koefisien Dasar bangunan sangat rendah (kurang dari 5 %).

Penataan taman dan ruang terbuka, sangat erat kaitannya dengan kriteria perancangan secara umum yakni kriteria terukur dan kriteria tak terukur. Terutama yang perlu diperhatikan dalam pembahasan persepsi masyarakat adalah kriteria tak terukur. Adapun kriteria tak terukur tersebut dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut (Shirvani, 1985 : 126). *Acces* adalah kemudahan, kenyamanan, keamanan, untuk mencapai tujuan atau aksesibilitas/kemudahan pencapaian. *Compatible* adalah kecocokan tata letak (lokasi/perletakan site, kepadatan, skala, dan bentuk massa bangunan). *Views* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek kejelasan orientasi bagi manusia, merupakan tengeran (*landmark*). *Identity* adalah identitas, nilai yang dibuat oleh bangunan maupun kelompok bangunan atau lebih dikenal dengan 'citra', penampilan (*performance*). *Sense* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek kebudayaan yang ditampilkan oleh bangunan maupun kelompok bangunan atau sebagai simbol budaya. *Livability* adalah kenyamanan lingkungan yang menyebabkan rasa senang untuk tinggal.

Prinsip-prinsip umum perencanaan ruang terbuka (Kaiser, 1995 : 298) :

1. *Conservation lands*; lahan-lahan yang harus dilindungi karena mempunyai keunikan, mudah rusak atau beresiko untuk dikembangkan; tempat hidup binatang yang dilindungi; resapan air; rawan banjir; rawan longsor; termasuk sumber-sumber alami seperti pemandangan dan sumber rekreasi.
2. *Compatibility*; kesesuaian dengan karakteristik fisiknya; dan kesesuaian dengan penampilan lingkungan sekitarnya.

3. *Linkage or continuity* ; keterkaitan dengan ruang terbuka lainnya yang lebih luas dalam sistem ruang terbuka yang multiguna.
4. *Accessibility*; tingkat kemudahan hubungan ruang terbuka, tergantung pada fungsi dan kegunaannya. Akses diperlukan pada ruang terbuka dengan fungsi rekreasi, namun sebaliknya tidak diperlukan pada ruang terbuka dengan fungsi pemeliharaan proses alamiah.
5. *Urban pressure*; penyediaan ruang terbuka menjadi prioritas pada area kota yang segera akan dibangun.

Aspek penataan dari ruang terbuka sebagai pertamanan perlu mempertimbangkan kaidah estetika yang menjadi dasar penyusunan taman; dimana pada prinsipnya menciptakan kesatuan dalam perancangan dengan pengorganisasian elemen-elemen pertamanan sehingga menjadi bentuk yang harmonis dan utuh. Kesatuan keharmonisan dan keutuhan ini dapat dicapai dengan memperhatikan prinsip-prinsip perancangan : keseimbangan (*balance*); aksen, penekanan (*focal point*); irama (*rhytme*) dan urutan (*sequence*); dan proporsi (*proportion*) (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Bali, 1989 : 62-64). Keseimbangan (*balance*); keseimbangan daya tarik kedua belah sisi sumbu vertikal. Keseimbangan ini dapat simetrik (*formal*) dan asimetrik (*tak formal atau bergaya alami*). Aksen, penekanan (*focal point*); suatu rancangan yang seimbang bisa membosankan (*monoton*) jika tidak ada aksen atau penekanan berupa elemen ataupun komposisi elemen yang mempunyai daya tarik di tempat-tempat tertentu. Irama (*rhytme*) dan urutan (*sequence*); suatu rancangan taman dimana kelompok elemen-elemen yang sama dan digunakan beberapa kali akan terjadi pengulangan atau urutan-urutan yang terkesan monoton. Menghindari hal tersebut perlu dimasukkan unsur irama yang teratur maupun tak teratur sehingga tidak membosankan. Proporsi (*proportion*); dalam memilih elemen-elemen pengisi taman, ketepatan skala sangat penting sehingga tidak akan ada elemen nampak terlalu besar dan mendominasi atau memperkecil arti elemen yang lain.

Disebutkan pula bahwa penatan ruang terbuka sebagai tempat rekreasi harus memperhatikan : *integration, multiple-use, flexible, multi-utile, exploit mechanization, and social approach* (Eckbo, 1993 : 81 – 82). *Integration* dimaksudkan bahwa pertamanan dengan bangunan harus terintegrasi sehingga terbentuk hubungan yang harmonis antara ruang luar dan ruang dalam dan pertamanan juga harus terkait dengan sistem pertamanan yang lebih luas. *Multiple-use* dimaksudkan bahwa tempat rekreasi yang dibangun harus dapat menampung kegiatan rekreasi dari berbagai umur dan kelompok secara berkesinambungan. *Flexible* dimaksudkan tempat rekreasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi, dengan menciptakan suatu kerangka yang memberikan keleluasaan masuknya udara dan sinar matahari agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. *Multi-utile* dimaksudkan adalah menggunakan metode, material dan peralatan yang modern. *Exploit mechanization* dimaksudkan bahwa dalam pemanfaatan alam harus dilaksanakan secara hati-hati oleh setiap pelaku pembangunan tempat rekreasi. *Social approach* dimaksudkan bahwa pengembangan tempat rekreasi harus memperhatikan kebutuhan lingkungan sekitarnya, yang dikembangkan berbeda dengan rekreasi yang dimiliki oleh masing-masing keluarga dilingkungan yang dilayani.

Kriteria perancangan tak terukur dalam perancangan ruang terbuka : *access, compatible, views, identity, sense, dan livability* merupakan kriteria perancangan ruang terbuka secara umum. Mengingat pembahasan ruang terbuka tradisional : *natah, telajakan, alun-alun, setra* dan *radius kesucian pura* yang dapat dianalogikan dengan ruang terbuka pekarangan, *right of way, community park* dan *special use*, dimana pada umumnya dengan fungsi pertamanan maka dapat disimpulkan bahwa kriteria penataan ruang terbuka adalah : *integration, multiple use, keseimbangan (balance)*; aksen, penekanan (*focal point*); irama (*rhytme*) dan urutan (*sequence*); proporsi (*proportion*), dan *social approach*.

## 2.4 Rangkuman

### 2.4.1 *Natah*

Ruang terbuka *natah* disetarakan dengan ruang terbuka pekarangan atau halaman; mempunyai nilai-nilai fungsi masing-masing. Nilai-nilai ruang terbuka tradisional *natah* : penataannya menggunakan konsep *tri angga / sangha mandala* ( Meganada, 1990 : 32 dan Sujana & Susila, 2000 : 136) ; menggunakan ukuran tradisional (*sikut*) (Gambar, 2001 : 32-36) ; merupakan pusat orientasi bangunan; lengkapnya bangunan tradisional yang ditempatkan pada pekarangan rumah; fungsinya sebagai tempat upacara agama (*bhuta yadnya, manusa yadnya, pitra yadnya dan dewa yadnya*); fungsi pertemuan antara *purusa* (langit) dan *pertiwi* (tanah) atau fungsi *rwa bhineda*.( Gomudha, 1999 : I-25).

Konsepsi *tri pramana: desa-kala-patra* yang menjelaskan adanya fleksibilitas dalam penerapan nilai-nilai ruang terbuka menyebabkan keberagaman pola-pola ruang di Propinsi Bali sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan. Pola desa misalnya, ada Pola Desa Bali Kuna, Pola Desa Pegunungan, Pola Desa Pusat Kerajaan, Pola Desa Dataran, dan Pola Desa Pesisir Pantai. Tata nilai penempatan *sanggah* di Kabupaten Tabanan tidak selalu di *kaja kangin*; disamping arah orientasi *kaja* dan *kangin* tetap dipegang sebagai arah utama, penempatan *sanggah* juga berorientasi pada jalan.

Ruang terbuka pekarangan atau halaman mempunyai nilai-nilai fungsi non tradisional: pertamanan dan privasi apabila dikelilingi tembok (Eckbo, 1980 : 232 dan Simonds, 1961 : 201); kebun, parkir, dan area pelayanan (Simonds, 1961 : 178).

Kebijaksanaan pemerintah dalam penataan halaman adalah melalui penetapan koefisien dasar bangunan. Kawasan dengan kepadatan sangat tinggi sampai kawasan dengan kepadatan sangat rendah. Kebijakan pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai tradisional maupun non tradisional. Nilai-nilai tradisional *natah* yang paling utama yang mencerminkan identitas lokal adalah : penataan berdasarkan *tri mandala*, fungsi tempat upacara agama, simbol pertemuan antara langit (*purusa*) dan *pertiwi* (tanah) karena fungsi-



fungsi tersebut secara langsung terkait dengan sendi-sendi kehidupan desa adat dan sendi-sendi kehidupan agama (Hindu).

#### 2.4.2 *Telajakan*

*Telajakan* sebagai salah satu ruang terbuka disetarakan dengan sempadan pagar. Nilai-nilai *telajakan* adalah : lahannya disediakan oleh pemilik bangunan, ditanami pohon penunjang upacara agama, tanggung jawab pemeliharaannya oleh pemilik bangunan (Gelebet, 1984 : 51). Sedang nilai fungsi sempadan pagar adalah : taman dan pembatas privasi (Simonds, 1961 : 198); pedestrian dan taman tempat main (Turner, 1996 : 202-207); dan penyaring polusi udara (Simonds, 1961 : 212).

Kebijaksanaan pemerintah terhadap garis sempadan pagar adalah ditetapkan melalui peraturan daerah. *Telajakan* ini telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda No.10 tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar); ditentukan lebar *telajakan* bervariasi sesuai dengan lebar jalan : minimum 0,5 meter pada lebar jalan lebih kecil atau sama dengan 6 meter; sampai lebar *telajakan* minimum 2 meter pada jalan lebih besar atau sama dengan 18 meter. *Telajakan* dalam peraturan tersebut penyediaanya oleh pemilik bangunan karena lebar *telajakan* dihitung mulai dari pinggir got terluar dari jalan.

Penggunaan sebagai pedestrian dan tempat main memerlukan lahan yang cukup luas dimana *telajakan* secara tradisional lebarnya hanya setengah *depa* (= 1,20 meter) . ( Meganada,1990 : 26). *Telajakan* disediakan oleh pemilik bangunan merupakan salah satu nilai utama; karena tanpa disediakan oleh pemilik bangunan *telajakan* tersebut sama dengan tidak ada.

#### 2.4.2 Radius kesucian *pura*

Nilai-nilai dari radius kesucian *pura* disetarakan dengan sempadan *pura* dengan fungsi melindungi dan mempertinggi kenyamanan budaya (Kaiser, et al. 1995 : 297).

Radius kesucian pura : 2 km dari tembok penyengker *Pura Dhang Kahyangan*; 50 meter dari tembok penyengker *Pura Kahyangan Desa* kearah bangunan yang bertingkat; 25 meter dari tembok penyengker *Pura Kahyangan Desa* kearah bangunan yang tidak bertingkat. Fungsi radius kesucian pura untuk menjaga kesucian/kesakralan *pura* dan menjaga kekhusukan umat bersembahyang. Bangunan yang dapat dibangun pada radius kesucian *pura* hanya bangunan yang terkait dengan pura.

Pemerintah Kota Denpasar telah menuangkan nilai radius kesucian pura ini kedalam peraturan daerah. Sama dengan *telajakan* yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota maka proses selanjutnya dari kebijaksanaan tersebut adalah proses implementasi. Proses implementasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang : pemrakarsa kebijaksanaan; pejabat-pejabat pelaksana di lapangan; dan aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (Wahab, 2001 : 63). Pemahaman yang mendalam terhadap persepsi kelompok sasaran, sangat penting bagi pejabat pemrakarsa dan pejabat pelaksana. Sebab, pemahaman semacam itu akan memungkinkan untuk mengantisipasi umpan balik dan peka terhadap asumsi-asumsi tingkah laku yang melandasi setiap penyusunan program.

Ada beberap model implementasi kebijaksanaan, salah satu diantaranya yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang disebut kerangka analisis implementasi. Peran penting mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut dibedakan menjadi tiga katagori :

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan;
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi;
3. Pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Pada variabel pertama disebutkan antara lain yang mempengaruhi pencapaian tujuan adalah tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki. Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki, semakin sukar memperoleh implementasi yang berhasil. Atau keberhasilannya apabila kelompok sasaran tersebut merupakan sebagian kecil dari totalitas penduduk suatu wilayah.

#### 2.4.4 *Setra*

*Setra* sebagai ruang terbuka tradisional disetarakan dengan ruang terbuka non tradisional tempat pemakaman. Nilai-nilai *setra* sebagai ruang terbuka tradisional : merupakan komponen *desa adat*; tempat penguburan mayat dan atau pembakaran mayat (*ngaben*); pemanfaatannya diatur dalam *awig-awig* desa adat (Surpha, 1999 : 19). Sedangkan nilai fungsi pemakaman; adalah tempat pemakaman dan ruang terbuka hijau kota (Permendagri No. 14 Tahun 1988). Kebijakan pemerintah terhadap tempat pemakaman adalah ditetapkannya sebagai ruang terbuka hijau kota. Namun kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah pusat.

Nilai-nilai tradisional *setra* yang paling utama adalah sebagai komponen desa adat dan sebagai tempat upacara *ngaben* karena merupakan sendi kehidupan desa adat di Bali pada umumnya.

#### 2.4.5 *Alun-alun*

Alun-alun sebagai ruang terbuka tradisional disetarakan dengan *community park* (Mertes & Hall, 1995 : 94). Nilai-nilai tradisional alun-alun adalah : peninggalan sejarah (kerajaan Badung), komponen pendukung *pempatan agung*, tempat upacara *tawur kesanga*. Sedangkan nilai-nilai non tradisional adalah sebagai taman dan tempat bermain. Kebijakan pemerintah terhadap alun-alun adalah ditetapkan sebagai taman kota dan tempat kegiatan upacara nasional atau upacara agama yang bersifat insidentil ( Surat

Keputusan Walikota Denpasar No. 914 Tahun 1996). Nilai-nilai tradisional yang utama dari alun-alun adalah peninggalan sejarah (kerajaan Badung), dan komponen pendukung *pempatan agung* (wawancara dengan Gelebet, 17 Juni 2002).

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN RUANG TERBUKA DI KOTA DENPASAR**

#### **3.1 Ruang Terbuka di Kota Denpasar**

Permasalahan ruang terbuka di Kota Denpasar antara lain karena perkembangan penduduk dan perkembangan kegiatan usaha. Jumlah penduduk Kota Denpasar tahun 2000 adalah 522.381 jiwa terdiri dari 264.377 jiwa laki-laki dan 258.004 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2000 ini, menunjukkan bahwa Kota Denpasar telah memasuki katagori kota besar (katagori 500.000 – 1.000.000 penduduk). Tingkat perkembangan jumlah penduduk Kota Denpasar selama 10 tahun terakhir sebesar 2,21 % per tahun. Sementara pada kurun waktu yang sama perkembangan jumlah penduduk Propinsi Bali hanya 0,94 % per tahun (Bappeda, 2000). Dapat diduga bahwa besarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Kota Denpasar adalah karena besarnya jumlah migrasi masuk ke Kota Denpasar.

Perkembangan kegiatan usaha dapat dindikasikan dari perkembangan jumlah PDRB Kota Denpasar Kota Denpasar mengalami pertumbuhan 4,85 % per tahun , sementara pada kurun waktu yang sama (1994-1999) pertumbuhan PDRB Propinsi Bali 4,34 % per tahun dengan dominasi kegiatan usaha Kota Denpasar adalah di sektor perdagangan hotel dan restoran (analisis sektor-sektor strategis Kota Denpasar).

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kegiatan usaha di Kota Denpasar maka kebutuhan lahan untuk menampung berbagai aktifitas di Kota Denpasar akan semakin meningkat, sementara luas lahan tidak akan bertambah. Luas Kota Denpasar adalah 12.778 ha dengan luas daerah terbangun saat ini lebih kurang 41 % dari seluruh Kota Denpasar dengan perkembangan rata-rata daerah terbangun  $\pm 100$  ha setiap tahun atau kecendrungan berkurangnya ruang terbuka di Kota Denpasar rata-rata 100 ha setiap

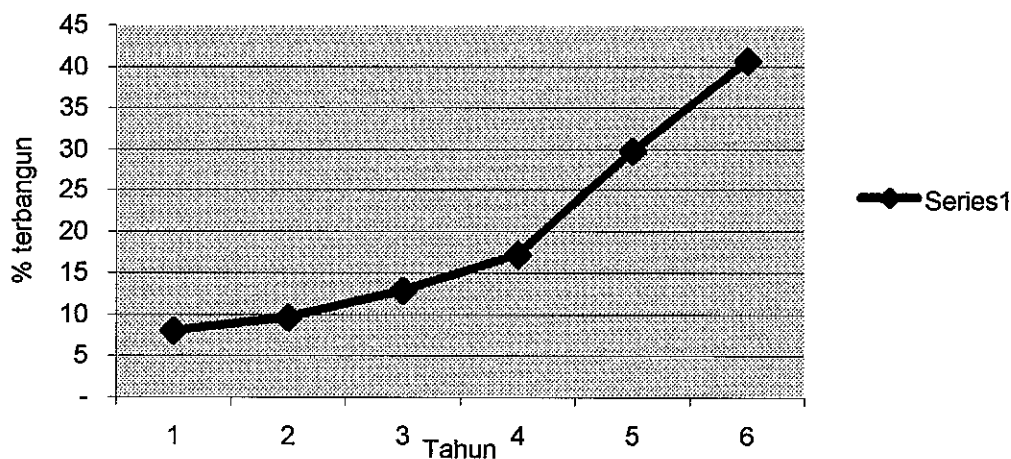
tahun. Pada tahun 1948 daerah terbangun Kota Denpasar 1.000 ha kemudian berkembang menjadi 6.133 ha pada tahun 1998. Perkembangan luas lahan terbangun disajikan pada Tabel : III.1. dan Diagram 3.1. Secara visual perkembangan tersebut disajikan pada Gambar : 3.2.

TABEL : III.1  
PERKEMBANGAN LUAS TERBANGUN DAN PERKEMBANGAN  
KEPADATAN PENDUDUK DI KOTA DENPASAR TAHUN 1948 – 1998

No	Tahun	Jumlah penduduk(jiwa)	Luas wilayah kota (ha)	Daerah terbangun		Kepadatan (jiwa/ha) <sup>1)</sup>	
				Luas (ha)	%	Netto	Bruto
1	1948	137.041	12.398	1.000	8	137	11
2	1960	167.490	12.398	1.200	10	140	14
3	1970	215.873	12.398	1.600	13	135	17
4	1980	271.969	12.398	2.137	17	127	22
5	1990	320.597	12.398	3.694	30	87	26
6	1998	382.555	12.778	5.197	41	74	30

Sumber : Adhika (1994), RUTR Kota Denpasar dan BPS Kota Denpasar

DIAGRAM : 3.1  
PERKEMBANGAN PROSENTASE LUAS TERBANGUN  
KOTA DENPASAR TAHUN 1948 - 1998



<sup>1)</sup> Kepadatan netto : jumlah penduduk dibagi luas terbangun; kepadatan bruto : jumlah penduduk dibagi luas wilayah kota



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

## TESIS

PERSEPSI MASYARAKAT BALI TERHADAP  
SISTEM NILAI RUANG TERBUKA TRADISIONAL  
DI KOTA DENPASAR

STADIA PERKEMBANGAN KOTA  
DENPASAR DARI TH. 1948 S/D 1998

## LEGENDA



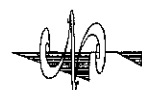
LUAS TERBANGUN

SKALA PETA



UTARA

SUMBER:



P2R BALI

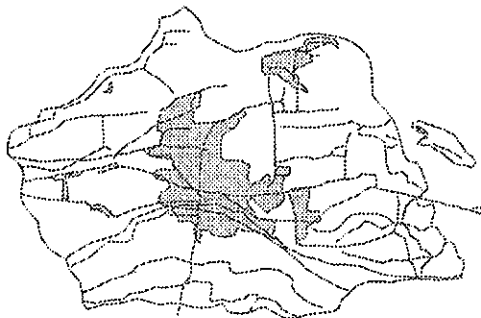
NO. PETA

HAL. PETA

3.2

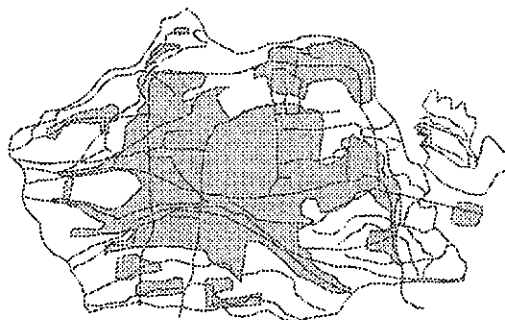
56

TAHUN 1970



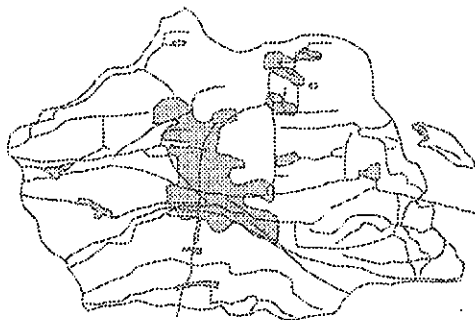
Luas Terbangun = 13 %  
Jumlah penduduk = 215.873 jiwa

TAHUN 1998



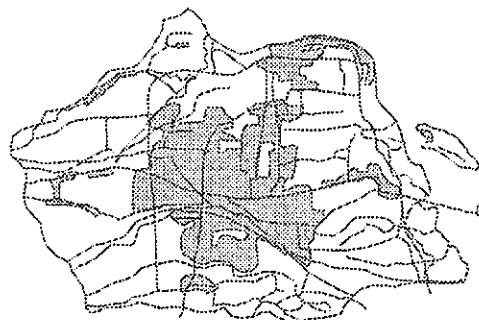
Luas Terbangun = 41 %  
Jumlah penduduk = 382.555 jiwa

TAHUN 1960



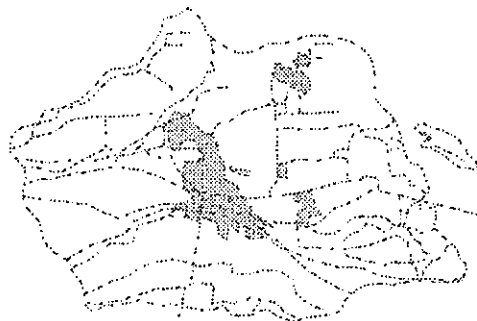
Luas Terbangun = 10 %  
Jumlah penduduk = 167.490 jiwa

TAHUN 1990



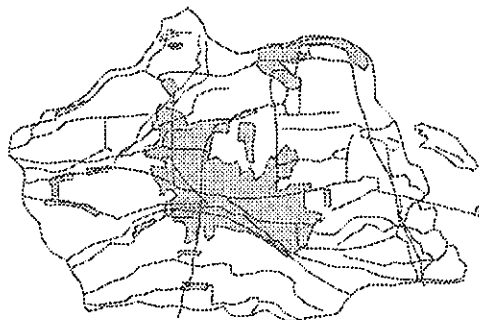
Luas Terbangun = 30 %  
Jumlah penduduk = 320.597 jiwa

TAHUN 1948



Luas Terbangun = 8 %  
Jumlah penduduk = 147.041 jiwa

TAHUN 1980



Luas Terbangun = 17 %  
Jumlah penduduk = 271.969 jiwa

Kebijakan pemerintah kota pada masa lalu juga menentukan berkurangnya ruang terbuka di pusat kota. Tahun 1994 lapangan umum, tempat bermain untuk Kota Denpasar bagian selatan telah dialihfungsikan menjadi pusat perbelanjaan (Mall Denpasar) dan tahun 1996 kuburan etnis cina yang berada di Banjar Balun dialihfungsikan menjadi perdagangan grosir (Tiara Grosir), sementara kuburan etnis cina di relokasi ke daerah Jimbaran Kuta. Kebijakan dalam penataan bangunan terutama ketentuan koefisien dasar bangunan serta pengawasannya yang lemah juga ikut menentukan berkurangnya ruangterbuka pekarangan. Saat ini koefisien dasar bangunan di Kota Denpasar antara 40 – 80 % dari luas kaveling atau luas ruang terbuka pekarangan antara 20 – 60 %.

Agak berbeda dengan permasalahan ruang terbuka seperti tersebut diatas, dimana masyarakat desa adat pada umumnya di Bali dan juga di Kota Denpasar mempunyai ruang terbuka terkait dengan aktifitas adat dan kebudayaan yang dilandasi Agama Hindu. Ruang terbuka tradisional antara lain : *natah*, *telajakan*, *radius kesucian pura*, *setra* dan *alun-alun*. Ruang terbuka tradisional ini cukup lama bertahan; sejak jaman kerajaan sampai jaman kemerdekaan, namun sejak pesatnya kegiatan fisik di Kota Denpasar tampak adanya perubahan-perubahan baik fisik maupun sistem nilainya. Masing-masing jenis ruang terbuka tradisional mempunyai nilai tersendiri yang dan memperkuat eksistensi suatu ruang kota menjadi ruang terbuka apabila masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai dari ruang terbuka tersebut.

Konsep desa di Bali mempunyai dua pengertian; pertama, desa sebagai suatu kesatuan wilayah tempat warga desa dengan nama desa adat; dan yang kedua, desa sebagai kesatuan wilayah administrasi dengan nama desa dinas. Batasan tentang Desa Adat dalam Peraturan Daerah No. 06 Tahun 1986 antara lain menyebutkan “Desa adat sebagai *Desa Dresta* adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali yang



mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa)* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri “(Dharmayuda. 2001 : 17). Secara struktural Desa Adat dan Desa Dinas hanyalah hubungan koordinatif dalam mesukseskan program-program pemerintah.

Saat ini Kota Denpasar terdiri dari 44 desa dinas, 35 *desa adat* dan 329 *banjar adat*. Sedangkan fasilitas pura Di Kota Denpasar terdapat satu buah *Pura Kahyangan Jagat*, tujuh buah *Pura Dang Kahyangan* dan 70 buah *Pura Kahyangan Desa*. Secara visual pusat-pusat desa adat dan *pura kahyangan jagat* yang ada di Kota Denpasar disajikan pada Gambar : 3.3

### 3.2 Ruang Terbuka di Desa Adat Denpasar.

Permasalahan berkurangnya ruang terbuka pada permukiman desa adat relatif lebih lambat dibandingkan dengan diluar permukiman desa adat. Desa Adat Denpasar sebagai wilayah penelitian terletak pada bagian pusat Kota Denpasar (Gambar : 3.3). Posisi geografis Desa Adat Denpasar menjadi pusatnya Kota Denpasar secara keseluruhan, dan saat ini menjadi pusat permukiman, pusat kegiatan transportasi, pusat kegiatan perdagangan, dan pusat kegiatan bisnis lainnya. Posisi ini merupakan lokasi dengan nilai lahan yang paling tinggi karena berada di pusat kota atau pada *central business district (CBD)* ( Yeates. 180 : 334). Sebagian besar masyarakat desa adat masih mempertahankan nilai-nilai budaya yang dianutnya pada permukiman desa adat termasuk nilai-nilai ruang terbuka tradisional

Berkembangnya Kota Denpasar sebagai kota : perdagangan, pemerintahan, pariwisata dan lain-lainnya maka terjadi penambahan penduduk dalam kota. Migrasi masuk di Kota Denpasar bukan saja datang dari Daerah Bali tapi juga dari luar Bali



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

## TESIS

PERSEPSI MASYARAKAT BALI TERHADAP  
SISTEM NILAI RUANG TERBUKA TRADISIONAL  
DI KOTA DENPASAR

## PETA

### ORIENTASI WILAYAH STUDI

### LEGENDA

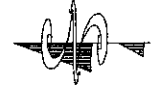
- BATAS ADMINISTRASI KOTA
- BATAS KECAMATAN
- PERMUKIMAN DESA ADAT
- DESA ADAT DENPASAR (WILAYAH STUDI)
- PUSAT PERMUKIMAN DESA ADAT
- PURA DANG KAHYANGAN

SKALA PETA



UTARA

SUMBER:



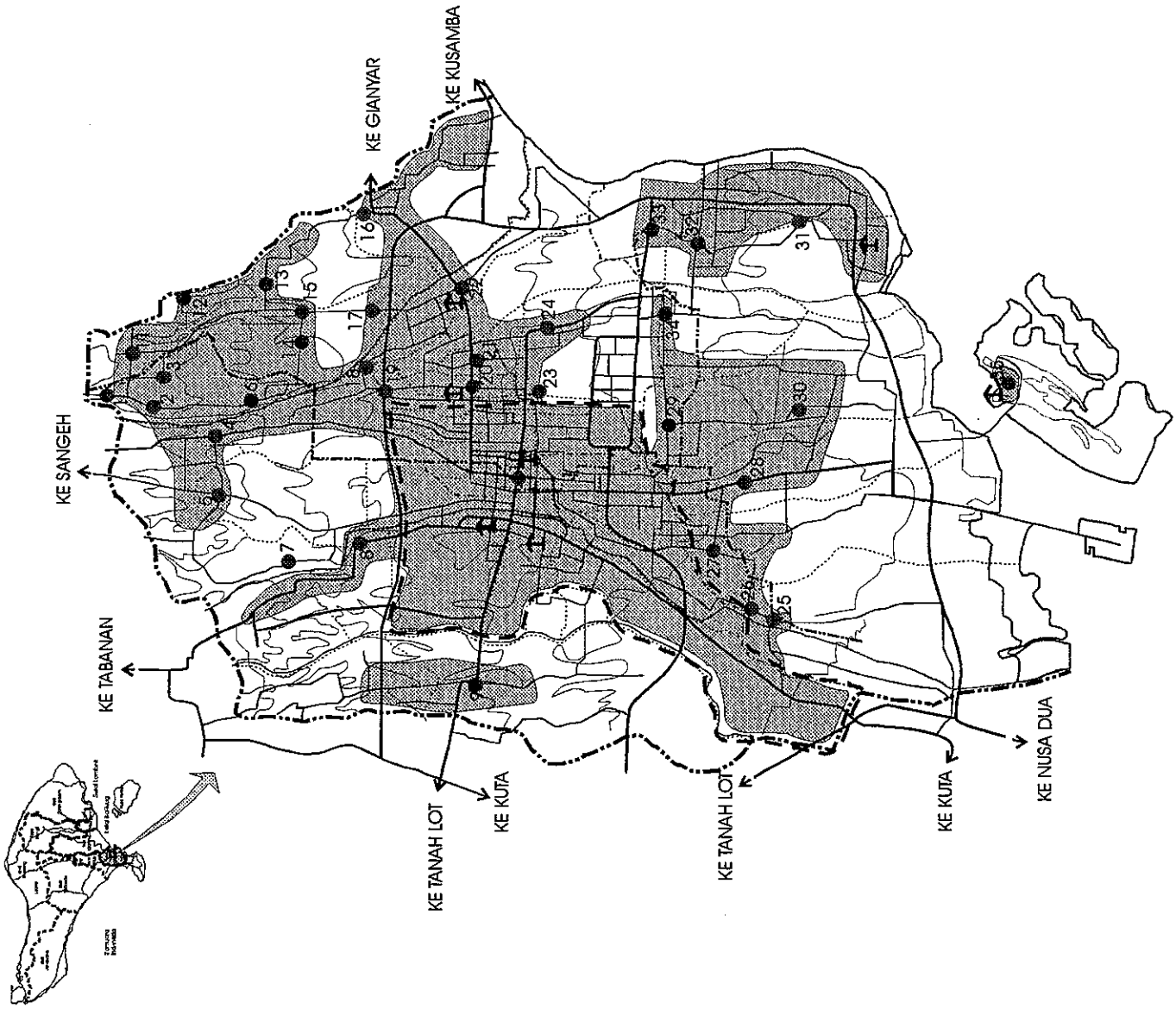
P2R BALI

NO. PETA HAL. PETA

3.3 59

Nama Pusat Permukiman  
Desa Adat

1. Cengkiling
2. Kedua
3. Jenah
4. Perampuan
5. Peguyangan
6. Peninjolan
7. Pah Gading
8. Ubung
9. Padangsamblan
10. Denpasar
11. Anggabaya
12. Pah Manis
13. Lapiap
14. Penatih Putih
15. Penatih
16. Bekul
17. Tembau
18. Oongan
19. Tonia
20. Pagan
21. Sumeita
22. Kesiman
23. Yang Batu
24. Tanjung Bunglak
25. Kapaan
26. Pemogan
27. Pedungan
28. Seselan
29. Panjer
30. Sidakanya
31. Penyandingan
32. Intian
33. Sanur
34. Renan
35. Sarangan



dengan berbagai suku, agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi mereka yang datang dari luar Bali umumnya hanya berstatus sebagai anggota *banjar dinas*, sedangkan yang datang dari daerah Bali adakalanya mereka menjadi anggota *banjar dinas* sekaligus anggota *banjar adat* dan ada pula yang hanya menjadi anggota *banjar dinas* saja. Karena orang Bali umumnya sangat kuat keterikatannya dengan desa tua (desa asalnya) sehingga mereka tetap menjadi anggota *banjar adat* di desa tuanya. Terutama kaitanya dengan penguburan mayat; anggota *banjar adat* hanya berhak menguburkan mayat pada kuburan *desa adat* dimana mereka menjadi anggota *banjar adat*.

*Desa Adat Denpasar* terdiri dari 65 banjar adat tua dan 21 banjar adat baru <sup>2)</sup> Nama-nama banjar adat yang termasuk Desa ada Denpasar tahun 2001 seperi disajikan pada Tabel III.2. Penggunaan Lahan Desa Adat Denpasar didominasi oleh perumahan, perdagangan dan jasa, dan pemerintahan. Penggunaan lahan yang lain jumlahnya relatif kecil (Gambar : 3.4). *Alun-alun Puputan* sebagai ruang terbuka tradisional terletak di pusat Kota Denpasar berdekatan dengan *Pura Jagatnatha*. Sedangkan *Setra Agung Badung* sebagai ruang terbuka tradisional lainnya terletak di jalan Imam Bonjol. Kepemilikan lahan *setra* adalah milik desa adat. Tanah-tanah adat di Bali disebut *tanah hak atas druwe desa* atau *tanah ayah*. Tanah *ayah* ini terdiri dari (Dharmayuda, 2001 : 136) :

1. Tanah *Desa*, yaitu tanah yang dipunyai yang bisa didapat melalui usaha-usaha pembelian maupun usaha lainnya. Misalnya tanah pasar, tanah lapang, tanah kuburan, tanah bukti dan sebagainya.
2. Tanah *Laba Pura*, yaitu tanah-tanah (dulunya milik desa atau dikuasai oleh desa) yang khusus dipergunakan untuk keperluan *pura*.

---

<sup>2)</sup> Banjar adat tua adalah banjar adat dimana warganya sebagian besar adalah umat hindu "penduduk asli" ; sedangkan banjar adat baru sebagian besar warganya penduduk umat hindu perantauan di Kota Denpasar.

**TABEL : III.2**  
**NAMA-NAMA BANJAR YANG TERMASUK**  
**DESA ADAT DENPASAR TAHUN 2001**

No	Desa Dinas	Nama Banjar Adat	No	Desa Dinas	Nama Banjar Adat
I	Pemecutan Kaja	1. Margajati * 2. Balun; 3. Mekar Manis* 4. Kertha Sari*	III	Pemecutan Kelod	32. Mergaya; 33. Abiantimbul; 34. Pekandelan; 35. Sading Sari
		5. Kertha Jati* 6. Semila Jati* 7. Tulangampiyang; 8. Mertha Yasa*			36. Buagan; 37. Batan Nyuh; 38. Tenten; 39. Samping Buni
		9. Panti Gede; 10. Panti Sari; 11. Belong Menak; 12. Belong Gede; 13. Gerenceng			40. Monang-maning 41. TegalDukuh Anyar; 42. Tegal Kawan; 43. Tegal Langon; 44. Tegal Gede;
II	Pemecutan	14. Kertha Pura* 15. Busung Yeh Kauh; 16. Busung Yeh Kangin; 17. Penyaitan;			45. Tegal Agung; 46. Tegal Baler Geria; 47. Abian Base;
		18. Kerandan; 19. Pemedilan; 20. Teallinggah; 21. P u r i;	IV	Dauh Puri Kangin	48. Gemeh; 49. Titih Kelod; 50. Titih Tengah; 51. Titih Kaler;
		22. Pemeregan; 23. Celagigendong; 24. Gelogor; 25. Alangkajeng Gede;	V	Dauh Puri Kelod	52. Suci; 53. Batu Bintang* 54. Bumi Shanti* 55. Eka Sila* 56. Sanglah*
		26. Alangkajeng Menak; 27. Manut Negara* 28. Mertha Gangga* 29. Kertha Dharma*	VI	Dauh Puri	57. Bumi Asri* 58. Pekambingan; 59. Catur Panca* 60. Pelita*
		30. Mertha Jaya* 31. Graha Santhi*	VII	Dauh Puri Kauh	61. Pengiasan; 62. Abian Tegal; 63. Beraban; 64. Sumuh; 65. Seblanga; 66. Jematang
VIII	Dauh Puri Kaja	67. Limintang; 68. Wangaya Kaja; 69. Wangaya Kelod; 70. Lelangon.	XI	Dangin Puri	77. Kayumas Kelod; 78. Batu Mas; 79. Abasan; 80. Bun; 81. Tegal sari;
IX	Padangsambian	71. Penamparan			82. Kaliungi Kelod; 83. Taensiat; 84. Kaliungu Kaja; 85. Kalanganyar; 86. Umasari*
X	Dangin Puri Kauh	72. Tampakgangsul; 73. Belaluan; 74. Belaluan Sadmerta; 75. Tengah 76. Pucak Sari*	XII	Dangin Puri Kaja	

Sumber : Desa Adat Denpasar

Keterangan : \*) = Banjar adat baru



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

## TESIS

PERSEPSI MASYARAKAT BALI TERHADAP  
SISTEM NILAI RUANG TERBUKA TRADISIONAL  
DI KOTA DENPASAR

## P E T A

PENGUNAAN LAHAN  
DESA ADAT DENPASAR

### LEGENDA

- BATAS WILAYAH STUDI
- JALAN
- SUNGAI
- PERUMAHAN
- PERDAGANGAN DAN JASA
- PEMERINTAHAN
- FASILITAS KESEHATAN
- ALUN-ALUN/LAP.OLAH RAGA
- KUBURAN
- DHANG KAHYANGAN
- KAHYANGAN DESA
- PENDIDIKAN
- LAHAN KOSONG

0m 0m 1.8 2.7 km  
1 : 90.000

SKALA PETA

UTARA  
SUMBER:



P2R BALI

NO. PETA HAL. PETA

3.4 62



Tanah *Pekarangan Desa (PKD)*, tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan kepada *krama desa* (anggota desa adat), untuk tempat mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama untuk tiap keluarga.

Tanah *Ayahan Desa (AYDS)*, adalah tanah-tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh desa yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing *krama desa* disertai hak untuk menikmati hasilnya. Tanah-tanah Desa Adat Denpasar yang masih bertahan sampai saat ini adalah *tanah desa* dan *tanah laba pura*. *Tanah Desa* berupa tanah pasar dan tanah *setra*, sedangkan tanah *laba pura* sebagian besar masih berupa tanah pertanian. Tanah PKD dan AYDS sebagian besar sudah menjadi hal milik perorangan.

Upacara-upacara keagamaan yang membutuhkan ruang terbuka tetap dilaksanakan oleh masyarakat desa adat misalnya kegiatan upacara pada hari raya *Galungan*, *Kuningan*, *Saraswati*, *Puranama* dan *Tilem* merupakan wujud *yadnya* kepada Tuhan Yang Maha Esa atau yang disebut *Dewa Yadnya*. *Pitra Yadnya* adalah upacara pemujaan dengan tulus ikhlas dan suci kepada roh leluhur, antara lain dalam bentuk upacara penguburan mayat dan upacara *ngaben* dilaksanakan pada *setra*. *Rsi Yadnya* adalah sedekah atau *punia* atau persembahan kepada para pendeta. *Manusa Yadnya* adalah korban suci yang bertujuan untuk memelihara hidup dan membersihkan lahir bathin manusia mulai dari janin dalam kandungan sampai akhir hidup manusia. Wujudnya dalam bentuk upacara *Pagedong-gedongan* untuk janin dalam kandungan, upacara bayi lahir, Upacara *Kepus Puser*, upacara bayi berumur 42 hari, upacara *Nyambutin* (umur 105 hari), upacara *Satu Oton* (umur 210 hari), upacara potong gigi, dan upacara perkawinan. Upacara tersebut sebagian besar penyelenggaraannya dilaksanakan pada *natah*. *Bhuta Yadnya* adalah upacara yang ditujukan kepada *Bhuta Kala* yang mengganggu ketentraman hidup manusia. Dengan upacara *Bhuta Yadnya* ini *Bhuta Kala* diyakini sebaliknya akan dapat menolong dan melindungi kehidupan manusia. Upacaranya antara lain *Mecaru* dan *Tawur Agung*

menjelang Hari Raya Nyepi. Upacara ini, ada yang dilaksanakan pada *natah* dan ada yang dilaksanakan pada *pempatan agung* (alun-alun)

Permukiman Desa Adat terkesan tertutup karena sebagian besar bangunannya berorientasi kedalam *natah*. Kepadatan populasi desa adat di Kota Denpasar umumnya merata karena adanya sistim *ngarangin* (mencari kapling baru). Dalam sistem ini dianut bahwa bagi keluarga yang mempunyai lebih dari satu anak laki-laki, maka bila anak mereka berkeluarga akan *ngarangan* (mencari pekarangan baru), kecuali anak laki-laki yang paling bungsu akan *ngerob* (bersama) dengan orang tuanya (Adhika, 1994 : 47).

Desa Adat Denpasar yang menjadi wilayah penelitian, pada masa lalu penataan ruang unit perumahan menggunakan pembagian ruang tradisional Bali (*Sanga Mandala*). Pesatnya perkembangan kota Denpasar mulai dekade 1960 an tampak adanya perubahan perubahan penataan ruang sesuai dengan tuntutan jaman sejauh dapat diadaptasikan dengan norma tradisional. Nampak adanya kecendrungan untuk mempertahankan pola tata ruang tradisional terutama peruntukan tempat suci (*sanggah*) dan ruang untuk bangunan adat (*bale dangin*) dan *bale delod* sedangkan bangunan lainnya, ada yang ditiadakan (bangunan *klumpu*) dan ada yang diganti dengan bangunan modern sehingga bentuk *natah* mengalami perubahan. Perubahan-perubahan bentuk dan luas *natah* bervariasi namun fungsi sebagai pusat orientasi bangunan dan simbol pertemuan antara *purusa* dan *pradana* tetap bertahan karena wujud simbol ini secara visual dapat teramati dengan adanya *sanggah natah*. Fungsi sebagai tempat upacara, adanya *sanggah* (induk) dan *sanggah natah* mendukung *natah* tetap ada sebagai ruang terbuka karena bangunan *sanggah* tidak boleh dibawah atap bangunan hunian atau bangunan lainnya dan bahkan tidak boleh dibawah cucuran atap ( foto 1 ). Bangunan tempat persembahyangan disebut *penunggun karang* yang letaknya di bagian *kaja kauh* juga memerlukan adanya ruang terbuka.



**Foto : 1** *Sanggah natah dan sanggah (induk) mendukung natah sebagai ruang terbuka (foto diambil pada permukiman desa adat di Jalan A Yani Denpasar)*

Pola *natah* juga digunakan pada instansi pemerintah, sekolah, hotel dan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Berikut (foto 2, foto 3, dan foto 4 ) ilustrasi secara visual pola *natah* ( pola massa bangunan yang berorientasi kedalam *natah*). Antara lain Kantor Bappeda Propinsi Bali (foto 2), SD No. 7 Sanur Denpasar (foto 3) dan Hotel Werdhapura Sanur Denpasar (foto 4).



**Foto : 2** Pola *natah* digunakan pada kantor pemerintah (Kantor Bappeda Propinsi Bali)





**Foto : 3** Pola *natah* digunakan pada sekolah (SD No. 7 Denpasar)



**Foto : 4** Pola *natah* digunakan pada hotel (Werdhapura Denpasar)

*Telajakan* sebagai salah satu bagian dari pekarangan rumah juga mengalami perubahan dan sangat jarang dijumpai di Desa Adat Denpasar, terutama karena adanya pelebaran jalan dan trotoarisasi (foto :5 ). Namun di sisi lain pemerintah kota berupaya untuk mempertahankan *telajakan* antara lain melalui lomba *telajakan* pada kantor pemerintah dan *telajakan* sekolah (foto : 6). Bahkan pemerintah kota telah mengatur *telajakan* ini melalui perda tata ruang (RUTR) Kota Denpasar dan merupakan persyaratan dalam penerbitan IMB. Nilai-nilai tradisional dari *telajakan* adalah : lahannya disediakan oleh pemilik bangunan; difungsikan sebagai taman dengan tanaman bunga yang dapat menunjang kegiatan upacara agama; pemeliharaan *telajakan* dilakukan oleh desa adat



**Foto : 5** *Telajakan* didesak oleh pelebaran jalan dan trotoarisasi (foto diambil jalan Setiabudi Denpasar )



**Foto : 6** *Telajakan* cukup lebar di jalan Udayana Denpasar

secara bersama-sama atau gotong royong, namun tanggung jawab pemeliharaan tetap pada pemilik *telajakan*.

*Radius kesucian pura* sebagai salah satu ruang terbuka tradisional, dilihat dari awal pendiriannya bahwa *pura* tersebut didirikan pada tempat yang memiliki nilai-nilai kesucian karena pada tempat tersebut orang-orang suci dan umat Hindu mendapatkan pikiran-pikiran suci. Tempat suci atau *pura* tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah *kekeran* dengan ukuran *Apeneleng* = sejauh mata memandang, *apanimpug* = sejauh lemparan, dan *apanyenger* = sejauh yang dipagari. Radius kesucian *Pura Sad Kahyangan* dipakai ukuran *apaneleng agung* (minimal 5 km dari pura); untuk *Pura Dang Kahyangan* dipakai ukuran *apaneleng alit* (minimal 2 km dari pura); dan untuk *Kahyangan Tiga* dan pura lainnya dipakai ukuran *apanimpug* atau *apanyenger*. Ketentuan satuan metrik tersebut merupakan Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat No. 11/ Kep./ I / PHDIP / 1994 Tanggal 25 Januari 1994. Untuk wilayah Kota Denpasar ketentuan ini diperkuat dengan Perda Tata Ruang No. 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar. Dalam Perda tersebut memuat ketentuan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* sama dengan yang diatur dalam Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat No. 11/ Kep./ I / PHDIP / 1994 sedangkan radius kesucian *Pura Kahyangan Desa* dan yang sederajat dipertegas dengan ketentuan radius 50 meter terhadap bangunan bertingkat dan 25 meter terhadap bangunan tidak bertingkat.

Kondisi dilapangan saat ini radius kesucian *Pura* yang berada di permukiman desa adat Kota Denpasar didesak oleh bangunan permukiman. *Pura Dhang Kahyangan* yang termasuk dalam wilayah penelitian adalah *Pura Maospahit*, *Pura Tambangan Badung* dan *Pura Jagatnatha*. *Pura Maospahit* pada mulanya adalah *Pura Kerajaan Badung* dan saat

ini *pengempon pura* adalah keluarga pemangku sebanyak 20 KK yang secara tradisional mendapat petunjuk-petunjuk dari Puri Pemecutan dalam menyelenggarakan dan pemeliharaan bangunan fisik dan upacara *yadnya* di Pura Maospahit. *Penyungsur Pura* sebagian besar yang terkait dengan *puri* dan masyarakat dari Bukit (Badung Selatan) dan *krama desa* di Banjar Gerenceng, Banjar Panti, Banjar Belong dan Banjar Balun. Pura Maospahit, Pura Tambangn Badung, dan Pura Jagatnatha ini masih terlihat radius kesuciannya berupa jalan dengan lebar 2 - 3 meter disekeliling pura (Gambar : 3.5).

*Pura Kahyangan Desa* di wilayah penelitian ada di dua tempat *Pura Desa* di Jalan Gajah Mada dan *Pura Dalem di setra* Badung (jalan Gunung Watukaru) (Gambar : 3.6). Saat ini ada suatu upaya dari Pemda Kota Denpasar untuk membongkar bangunan pertokoan di depan *Pura Desa Adat* Denpasar untuk memberikan suatu ruang terbuka kesucian *pura*.

Alun-alun *Puputan* sebagai salah satu ruang terbuka tradisional, disamping sebagai peninggalan sejarah juga digunakan sebagai tempat *Tawur Kesanga* sehari menjelang hari raya *Tahun Baru Caka* atau *Hari raya Nyepi*. Luas alun-alun *Puputan*  $\pm$  4 ha. Lokasi dari alun-alun *Puputan* ini berada di wilayah penelitian berdekatan dengan *Pura Jagatnatha* dan merupakan salah satu komponen *pempatan agung* peninggalan sejarah sebagai pusat kerajaan. Alun-alun *Puputan* setiap sore hari juga digunakan sebagai tempat rekreasi pasif. Pemanfaatan alun-alun telah diatur dalam Surat Keputusan Walikota No. 914 tahun 1996 yakni berfungsi : ruang terbuka hijau kota; paru-paru kota; upacara nasional dan upacara keagamaan yang sifatnya insidentil. Disebutkan pula bahwa alun-alun dibebaskan atau tidak diperkenankan sebagai tempat olah raga.



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

## TESIS

PERSEPSI MASYARAKAT BALI TERHADAP  
SISTEM NILAI RUANG TERBUKA TRADISIONAL  
DI KOTADENPASAR

### RADIUS KESUCIAN PURA DANG KAHYANGAN

#### LEGENDA

	JALAN
	SUNGAI
	PERUMAHAN
	PERDAGANGAN DAN JASA
	SETRA
	PURA DANG KAHYANGAN
	GEREJA
	KANTOR PEMERINTAH
	BALE BANJAR
	MILITER
	ALUN-ALUN
	TEMPAT PARKIR

SKALA PETA



UTARA

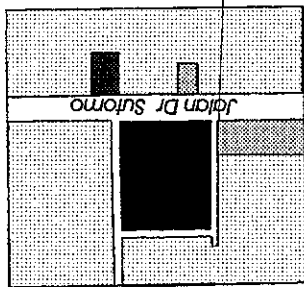
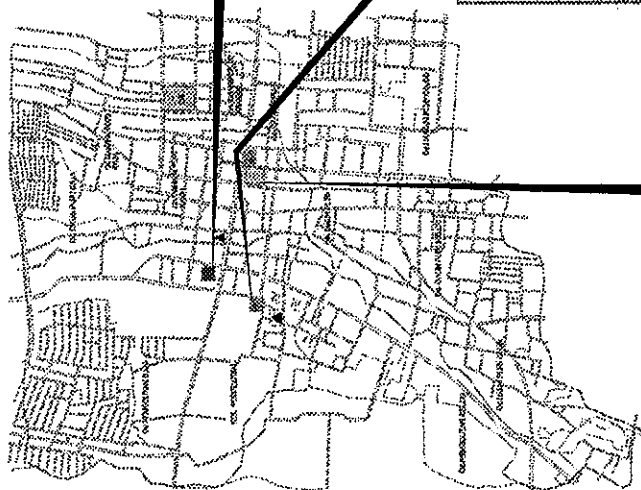
SUMBER:



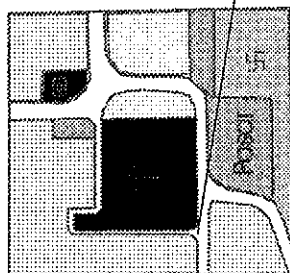
SURVEY LAPANGAN

NO. PETA HAL. PETA

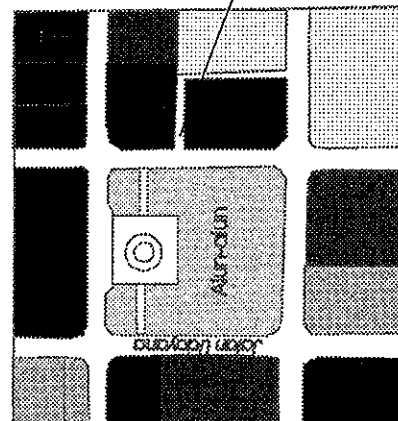
3.5 69



PURA MAOSPAHIT  
DAN SEKITARNYA



PURA TAMBANGAN BADUNG  
DAN SEKITARNYA



PURA JAGATNATHA DAN SEKITARNYA



Kondisi radius kesucian Pura Maospahit;  
sebatas lorong kecil



Lorong pada sisi barat Pura Tambangan  
Badung sebagai radius kesucian pura



Radius kesucian pada bagian selatan  
Pura Jagatnatha (lorong kecil)



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

## TESIS

PERSEPSI MASYARAKAT BALI TERHADAP  
SISTEM NILAI RUANG TERBUKA TRADISIONAL  
DI KOTA DENPASAR

### RADIUS KESUCIAN PURA KAHYANGAN DESA

#### LEGENDA

- JALAN
- SUNGAI
- PERUMAHAN
- PERDAGANGAN DAN JASA
- SETRA
- PURA KAHYANGAN DESA
- TEMPAT PARKIR
- RADIUS KESUCIAN PURA

SKALA PETA



UTARA

SUMBER:



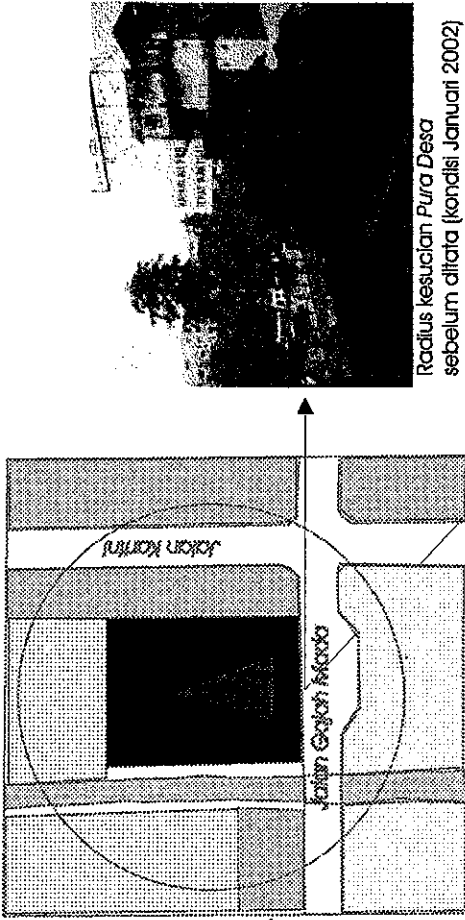
SURVEY LAPANGAN

NO. PETA

HAL. PETA

3.6

70



PURA DESA DAN SEKITARNYA



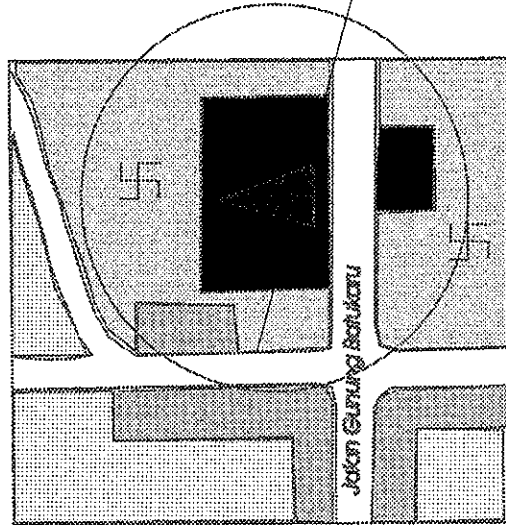
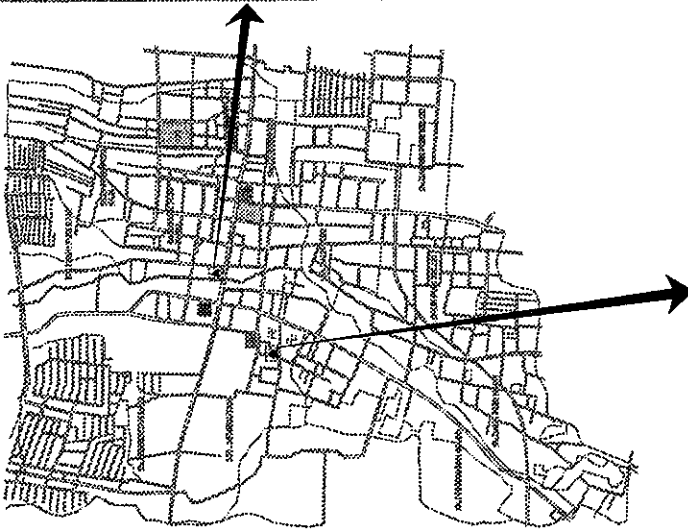
Radius kesucian Pura Desa  
sebelum ditata (kondisi Januari 2002)



Radius kesucian Pura Desa  
setelah ditata (kondisi Mei 2002)



Ruang terbuka dan jalan disekeliling  
Pura Dalem; memungkinkan dilatut sesuai  
ketentuan radius kesucian (60 meter)



PURA DALEM DAN SEKITARNYA

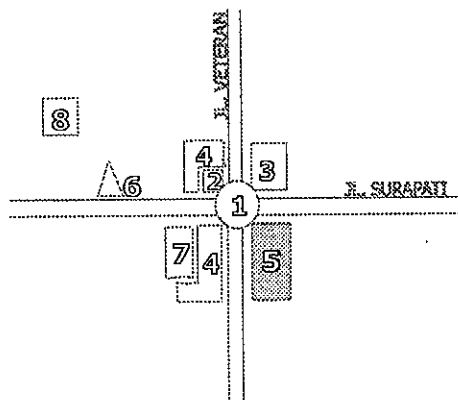
Sebagai komponen pusat kerajaan atau *pempatan agung*, alun-alun Puputan termasuk yang paling bertahan sejak dari jaman kerajaan sampai sekarang. Sejarah perkembangan perubahan tata guna lahan di sekitar *pempatan agung* sebagai pusat kerajaan disajikan pada Gambar 3.7. dan kondisi penggunaan lahan disekitar alun-alun saat ini disajikan pada Gambar : 3.8. Sebagai peninggalan sejarah, pada bagian utara Alun-alun Puputan telah dibangun Patung Puputan dengan pertamanan dan sekaligus sebagai tempat rekreasi pasif.

*Setra Agung Badung* sebagai salah satu komponen desa adat terletak di Jalan Imam Bonjol, merupaka *setra* terbesar di Kota Denpasar dengan luas  $\pm 10,50$  ha. Lokasi *setra* ini berada di sekitar pusat kota dan telah dikelilingi tembok penyengker dan batas-batasnya saat ini berupa jalan disekeliling *setra*. Kebijakan pemerintah dan desa adat pada masa lalu telah memberikan ijin pemanfaatan sebagian lahan *setra* sebagai pasar, pertokoan , kantor kelurahan dan kantor desa (Gambar : 3.8). *Setra* sesuai dengan fungsinya sebagai tempat penguburan mayat dan tempat *ngaben* sehingga pada *setra* sangat jarang ditemukan nisan, karena secara periodik meskipun ada penguburan mayat nisan akan kembali dibongkar pada saat upacara *ngaben*. Tata cara pemanfaatan *setra* diatur dalam *awig-awig* desa adat. Selain *Setra Agung Badung* masih terdapat beberapa *setra* untuk pelayanan masyarakat Desa Adat Denpasar. Nama *setra* lainnya sesuai dengan nama banjar adat dimana *setra* tersebut berada. *Setra* dimaksud adalah : *Setra Mergaya*, *Setra Pemogan*, *Setra Seblanga*, *Setra Bantas*, *Setra Sumuh*, dan *Setra Lumintang* dengan luas masing-masing  $\pm 1$  ha . Adanya *setra* sebagai komponen desa adat memperkuat keberadaan *setra* sebagai ruang terbuka kota.

**GAMBAR : 3.7**  
**SEJARAH PERKEMBANGAN BLOK PERUNTUKAN**  
**SEKITAR PUSAT KOTA (PEMPATAN AGUNG)**

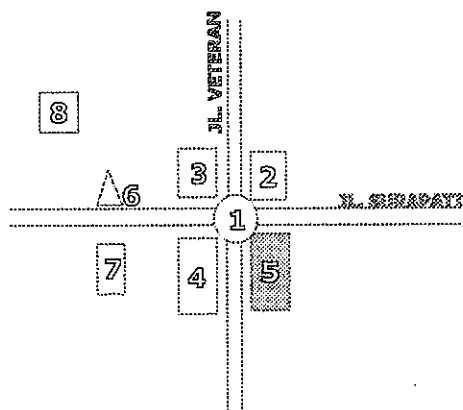
(Sumber : P2R Bali)

**JAMAN KERAJAAN (SEBELUM 1908)**



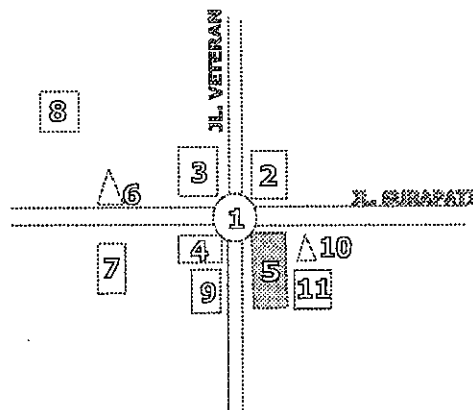
**KETERANGAN**  
 1. PEMPATAN AGUNG  
 2. WANTILAN  
 3. PURI  
 4. JERO  
 5. ALUN-ALUN  
 6. PURA DESA  
 7. PASAR

**JAMAN KOLONIAL (1908 - 1949)**



**KETERANGAN**  
 1. PEMPATAN AGUNG  
 2. PURI  
 3. BALI HOTEL  
 4. TANGSI  
 5. ALUN-ALUN  
 6. PURA DESA  
 7. PASAR  
 8. JERO

**JAMAN REPUBLIK (1949 - SEKARANG)**



**KETERANGAN**  
 1. PEMPATAN AGUNG  
 2. JAYA SABA  
 3. BALI HOTEL  
 4. KANTOR WALIKOTA  
 5. ALUN-ALUN  
 6. PURA DESA  
 7. PASAR  
 8. JERO  
 9. KODAM UDAYANA  
 10. PURA JAGATNATA  
 11. MUSIUM

ALUN-ALUN TETAP BERTAHAN DARI JAMAN KERAJAAN SAMPAI SEKARANG



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

## TESIS

PERSEPSI MASYARAKAT BAL TERHADAP  
SISTEM NILAI RUANG TERBUKA TRADISIONAL  
DI KOTA DENPASAR

### ALUN-ALUN DAN SETRA

#### LEGENDA

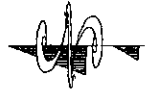
	JALAN
	PERUMAHAN
	PERDAGANGAN DAN JASA
	SETRA
	PURA DANG KAHYANGAN
	GEREJA
	PURA KAHYANGAN DESA
	PURI
	KANTOR PEMERINTAH
	BALE BANJAR
	MILITER
	ALUN-ALUN
	TERMINAL

SKALA PETA



UTARA

SUMBER :



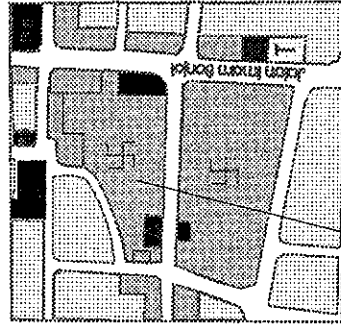
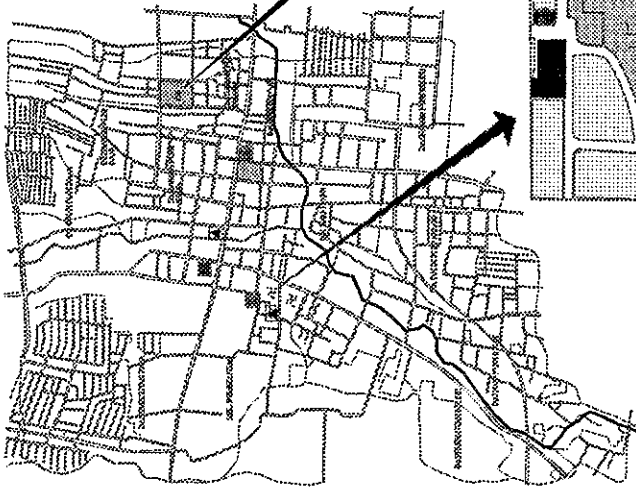
SURVEY LAPANGAN

NO. PETA

HAL. PETA

3.8

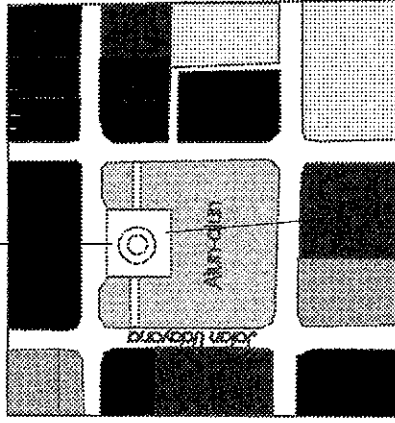
73



SETRA DAN SEKITARNYA



Puputan Badung , memperkuat alun-alun sebagai peninggalan sejarah; elemen taman dan tempat rekreasi pasif



ALUN-ALUN  
DAN SEKITARNYA



Perumahan disekitar Puputan



Salah satu tempat upacara ngaben



### 3.3 Rangkuman

1. Luas daerah terbangun Kota Denpasar saat ini (41 %) dengan tingkat perkembangan yang relatif pesat  $\pm 100$  ha/tahun
2. *Natah* sebagai ruang terbuka di desa Adat Denpasar mengalami perubahan luas; namun masih memperlihatkan adanya pola *natah* (bangunan berorientasi kedalam *natah*) dan adanya *sanggah* (induk) dan *sanggah natah* mendukung keberadaan *natah* sebagai ruang terbuka.
3. Kondisi *telajakan* di permukiman Desa Adat Denpasar jumlahnya sangat terbatas; berkurangnya *telajakan* antara lain karena pelebaran jalan dan trotoarisasi. Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya mendukung keberadaan *telajakan* melalui lomba *telajakan* antar instansi pemerintah dan antar sekolah serta menetapkan pengadaan *telajakan* ini melalui perda tata ruang kota dan persyaratan IMB.
4. Radius kesucian *pura* sebagai ruang terbuka untuk menjaga kesucian *pura* keberadaannya juga sangat terbatas. Sampai saat ini kondisi radius kesucian *pura* terbatas hanya berupa jalan sekeliling *pura* dan bahkan *pura desa* berbatasan langsung dengan pertokoan tanpa ada jarak pembatas. Radius kesucian *pura* juga diupayakan keberadaannya oleh Pemda Kota Denpasar melalui penetapan perda tata ruang. Upaya ini didukung oleh Desa Adat Denpasar untuk menata kembali pertokoan yang ada disekitar *pura desa* dalam rangka mewujudkan radius kesucian *pura*. Penataan ini lebih mudah dilaksanakan karena kepemilikan tanah pada pertokoan yang akan direlokasi adalah milik Desa Adat Denpasar.
5. *Setra Agung Badung* dengan luas 10,50 ha merupakan komponen Desa Adat Denpasar. Kebijaksanaan pada masa lalu telah mengalihfungsikan sebagian lahan *setra* untuk kantor kelurahan (Pemecutan) dan untuk kantor Desa Adat Denpasar.

Fungsi *setra* yang unik sebagai tempat pembakaran mayat (*ngaben*) membedakannya dengan pemakaman. Fungsi ini membawa *setra* terbebas dari bangunan-bangunan nisan.

6. Alun-Alun sebagai ruang terbuka tradisional dengan luas  $\pm 4$  ha berada di pusat Kota Denpasar. Saat ini fungsi alun-alun digunakan sebagai tempat upacara agama dan tempat rekreasi pasif. Alun-alun Puputan merupakan peninggalan sejarah; merupakan komponen *catus patha* dari pusat desa kerajaan. Patung Puputan telah dibangun pada bagian utara dari alun-alun dengan pertamanannya sekaligus sebagai tempat rekreasi. Kebijakan Pemda Kota Denpasar terhadap alun-alun ini adalah dengan menetapkan sebagai taman kota.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENDAPAT DAN KEINGINAN MASYARAKAT BALI TERHADAP NILAI-NILAI RUANG TERBUKA**

#### **4.1 Analisis Kondisi dan Keinginan Masyarakat Bali Terhadap Nilai-Nilai Ruang Terbuka Tradisional**

Mengetahui perubahan persepsi masyarakat Bali terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional dilakukan dengan membandingkan antara nilai-nilai acuan ruang terbuka tradisional dengan nilai-nilai ruang terbuka tradisional yang diterapkan sampai saat ini. Keinginan masyarakat Bali terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional tercermin dari seberapa besar nilai-nilai acuan ruang terbuka tradisional ingin diterapkan oleh masyarakat Bali. Asumsinya; mempertahankan nilai-nilai ruang terbuka tradisional apabila lebih dari 60 % responden menerapkan atau sependapat dengan nilai-nilai ruang terbuka acuan atau sebaliknya; mengabaikan nilai-nilai ruang terbuka tradisional apabila kurang dari 40 % responden yang menerapkan atau sependapat dengan nilai-nilai acuan. Apabila 40 – 60 % dianggap sedang, ragu-ragu atau mengambang atau belum bisa diberikan pernyataan secara langsung. Ruang terbuka tradisional yang akan dianalisis mencakup : *natah*, *telajakan*, radius kesucian *pura*, alun-alun, dan *setra*.

##### **4.1.1 *Natah***

Nilai-nilai tradisional dari *natah* yang menjadi acuan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

- (1). Adanya *natah* dilandasi oleh konsep penataan *Tri mandala*;
- (2). Pengukuran *natah* menggunakan ukuran tradisional (*sikut*) ;

- (3). Lengkapnya bangunan tradisional yang menempati pekarangan yakni bangunan : *sanggah* atau *merajan*, *penunggun karang*, *sanggah natah*, *bale daja*, *bale dangin*, *bale delod*, *bale dauh*, *pawon*, dan *jineng*;
- (4). *Natah* dijadikan sebagai pusat orientasi massa bangunan;
- (5). Mempunyai fungsi sakral, sebagai tempat upacara agama (Hindu);
- (6). *Natah* disimbolkan sebagai pertemuan antara langit (*purusa*) dan tanah (*pradana*).

Nilai-nilai *natah* tersebut poin (1), (4), (5), dan (6) akan dibahas tersendiri seperti disajikan pada tabel : IV.1. Sebagian besar atau lebih dari 60 % responden sampai saat ini menerapkan keempat nilai *natah* tersebut.

Sebanyak 96 % responden menyatakan bahwa *natahnya* timbul akibat dari adanya penataan pekarangan yang dilandasi *tri mandala* yakni dibagian *kaja-kangin* (timur laut) terletak *natah sanggah* (*sanggah* = tempat persembahyangan) dalam tata nilai merupakan posisi *utama* (sakral), di *madya* (netral) terletak *natah bale* dan di *nista* (profan) terletak (pintu masuk). *Natah sanggah*, *natah bale* dan pintu masuk adalah ruang terbuka tradisional pada satu pekarangan hunian tradisional Bali. Penataan pekarangan dengan konsep *tri mandala* ini merupakan konsep penataan yang dilaksanakan secara turun temurun dan sampai saat ini secara tradisi dilaksanakan oleh masyarakat Bali umumnya dan Kota Denpasar khususnya yang diyakini berpengaruh pada baik buruknya kehidupan. Responden lainnya mengatakan tidak menggunakan penataan *tri mandala* karena *sanggahnya* terletak pada pekarangan lain dan bangunannya adalah bangunan non tradisional.

Sebanyak 88 % responden *natahnya* dengan pola *natah*, dimana massa bangunan berorientasi kedalam *natah*; merupakan tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat karena mencerminkan satu unit hunian, dibatasi oleh tembok *penyengker* untuk menjaga

privasi, keamanan dan kenyamanan dalam rumah. Massa bangunan yang berorientasi kedalam sebagian besar masih diterapkan pada permukiman banjar adat tua. Wilayah penelitian terdapat 65 banjar adat tua, dan 21 banjar adat baru yang keseluruhannya berada di bawah Desa Adat Denpasar. Tranformasi penataan bangunan yang berorientasi ke dalam *natah* diturunkan dari generasi ke generasi secara mentradisi melalui praktek langsung dan berlangsung secara *gugon tiwon* (percaya dan patuh dengan apa yang digariskan oleh leluhur). *Natah* sebagai pusat didefinisikan menurut kejauhannya dari luar pada setiap arah. Jika di luar ada bahaya maka dalam marginalnya ada pencegahan.

Seluruh responden (100%) *natahnya* mempunyai fungsi sakral karena *natah* pada kenyataannya sampai saat ini digunakan untuk upacara keagamaan seperti : upacara tiga bulanan bayi; pernikahan; memandikan mayat; dan *mecaru*.

*Natah* menjadi simbol pertemuan antara langit (*purusa*) dan tanah (*pradana*) disepakati oleh 99 % responden; diwujudkan oleh masyarakat dalam bentuk bangunan *sanggah natah*. Atau perwujudan konsepsi *purusa perdana* adalah dalam bentuk penyediaan *natah*. Keempat nilai-nilai tradisional *natah* seperti tertuang pada Tabel : IV.1 sampai dengan saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat karena lebih dari 60% responden menerapkan nilai-nilai tersebut.

TABEL : IV.1  
ANALISIS KONDISI DAN KEINGINAN MENERAPKAN NILAI-NILAI *NATAH*

No	Nilai nilai tradisional natah	Kondisi s/d saat ini (%)		Ingin(sependapat) pada saat		
		Ya	Tidak	merenovasi (%)	ngarangin (%)	rata-rata (%)
1	Penerapan Konsep Tri Mandala	96,00	4,00	99,00	98,00	98,50
2	Pola natah	88,00	12,00	97,00	99,00	98,00
3	Fungsi sakral	100,00	0,00	98,00	99,00	98,50
4	Simbol pertemuan langit & tanah	99,00	1,00	97,00	99,00	98,00

Sumber : Hasil analisis data primer tahun 2002

Keinginan responden untuk menerapkan keempat nilai-nilai *natah* seperti tersebut pada Tabel : IV.1 tidak jauh berbeda dengan kondisi penerapannya sampai saat ini; keinginan pada saat merenovasi maupun keinginan pada saat *ngarangin* dengan rata-rata antara 98 – 98,50 %. Kesimpulannya keempat nilai-nilai *natah* masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Adat Denpasar.

Kondisi penggunaan *sikut* (ukuran tradisional) pada *natah* sampai saat ini hanya bertahan 35 % atau dengan kata lain penggunaan *sikut* telah mengalami perubahan 65 %. Penilaian penggunaan *sikut* disini ditujukan penerapannya pada *natah sanggah* dan *natah bale* karena merupakan satu kesatuan hunian pekarangan tradisional Bali. Penggunaan *sikut* pada *natah sanggah* terlihat cukup besar (63 %) karena *natah sanggah* dianggap sebagai sesuatu yang paling *utama*. Apabila seseorang yang akan mengukur *natah sanggah* belum memahami cara pengukuran, biasanya minta pertolongan kepada yang lebih memahami (kepada *brahmana*)<sup>3)</sup> Penggunaan *sikut* pada *natah bale* hanya 2 % atau sudah mengalami perubahan ke penggunaan ukuran metrik karena *natah bale* kedudukannya lebih rendah dari *natah sanggah*; ditinjau dari tata nilai *tri mandala* sehingga penggunaan *sikut* pada *natah bale* dipandang memungkinkan untuk dirubah karena tidak langsung terkait dengan bangunan persembahyangan. Penggunaan *sikut* pada *natah sanggah* masih diyakini akan mempengaruhi kehidupan. Penggunaan *sikut* pada *natah bale* telah berubah dengan ukuran modern atau metrik karena kurang diyakini mempengaruhi kehidupan.

Beberapa alasan perubahan penggunaan ukuran tradisional ke ukuran metrik antara lain karena keterbatasan lahan. Bila dilakukan tabulasi silang antara kepemilikan luas pekarangan dengan penggunaan ukuran tradisional menunjukkan adanya pengaruh yang

<sup>3)</sup> Brahmana adalah seorang pendeta hindu yang mengetahui seluk beluk pembangunan tradisional dan segala upacara keagamaan yang diperlukan berkaitan dengan pembangunan tersebut.

signifikan; dimana pada kepemilikan luas pekarangan kecil (0 - 4 are) penggunaan ukuran tradisional pada *natah sanggah & natah bale* relatif kecil pula (1%). Sebaliknya pada pemilikan lahan pekarangan relatif besar (> 8 are) penggunaan ukuran tradisional relatif besar pula (18 %). Angka Chi-Square hitung 39,855 dan pada tabel dengan  $df = 2$  diperoleh angka Chi-Square tabel 5,9915 pada tingkat signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ). Angka tersebut memberikan gambaran yang signifikan; pengaruh antara kepemilikan luas pekarangan dengan penggunaan ukuran tradisional (*sikut*), dengan tingkat kontingensi yang kuat (lampiran : B2). Tabulasi silang antara pendidikan dengan penggunaan *sikut* (lamipran B.1) tidak memberikan gambaran yang signifikan; pengaruh antara tingkat pendidikan dengan penggunaan *sikut*.

Keinginan menerapkan *sikut* pada saat merenovasi maupun pada saat *ngarangin* juga tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan dengan kondisi saat ini (rata-rata 39,50 %). Kondisi penggunaan *sikut* pada *natah*, dan keinginan penerapannya disajikan pada Tabel : IV.2

TABEL : IV.2  
ANALISIS KONDISI DAN KEINGINAN MENERAPKAN *SIKUT* PADA *NATAH*

No	Lokasi penerapan sikut	Penerapan s/d saat ini (%)	Ingin(sependapat) pada saat		
			merenovasi (%)	<i>ngarangin</i> (%)	rata-rata (%)
1	<i>Natah sanggah &amp; natah bale</i>	35,00	37,00	42,00	39,50
2	<i>Natah sanggah</i>	63,00	60,00	55,00	57,50
3	<i>Natah bale</i>	2,00	3,00	3,00	3,00

Sumber : Hasil analisis data primer tahun 2002

Kelengkapan bangunan tradisional, salah satu nilai *natah* sebagai ruang terbuka tradisional yakni adanya bangunan : *sanggah*, *penunggun karang*, *sanggah natah*, *bale daja*, *bale dangin*, *bale delod*, *bale dauh*, *pawon*, dan *jineng* dengan jumlah yang lengkap sebanyak 9 unit bangunan tradisional. Sampai saat ini 46 % responden yang memiliki

bangunan tradisional dengan katagori lengkap. Katagori lengkap diasumsikan memiliki 5 – 9 unit bangunan tradisional dan tidak lengkap 1 – 5 unit bangunan tradisional. Kelengkapan bangunan tradisional pada *natah*, saat ini dalam katagori sedang. Beberapa alasan tersebut antara lain bangunan *jineng* (lumbung) tidak diperlukan lagi karena mata pencaharian responden sebagian besar di sektor non pertanian. Bangunan tradisional telah dirubah menjadi bangunan modern sesuai dengan tuntutan jaman pada dekade terakhir ini, dan terbatasnya lahan untuk mewujudkan bangunan tradisional yang lengkap.

Keinginan masyarakat mewujudkan bangunan tradisional yang lengkap pada *natah* juga dalam katagori sedang (43,50%). Kecendrungan yang terjadi sampai saat ini terutama pada desa adat tua, jumlah bangunan tradisional dimiliki responden adalah 5 unit; 3 unit adalah bangunan persembahyangan (*sanggah*, *penunggun karang*, dan *sanggah natah*); 2 unit adalah bangunan *bale* yang berfungsi sebagai tempat tidur, tempat persiapan persembahyangan atau *bale* adat. Pemilikan 3 bangunan tradisional juga cukup dominan; dimana bangunan huniannya kemungkinan seluruhnya adalah bangunan non tradisional karena 3 bangunan tradisional tersebut seluruhnya merupakan tempat persembahyangan. Secara rinci kondisi lengkapnya bangunan tradisional dan keinginan responden untuk mewujudkan bangunan tradisional yang lengkap dalam merenovasi maupun di tempat baru (*ngarangin*) disajikan pada Tabel : IV.3.

TABEL : IV.3  
ANALISIS KELENGKAPAN BANGUNAN TRADISIONAL PADA NATAH

No	Jumlah bangunan tradisional	Kondisi S/d saat ini (%)	Ingin(lengkap) pada saat		
			merenovasi (%)	<i>ngarangin</i> (%)	rata-rata (%)
1	Lengkap	46,00	45,00	42,00	43,50
2	Tidak Lengkap	54,00	55,00	58,00	56,50

Sumber : Hasil analisis data primer tahun 2002



Kelengkapan bangunan tradisional pada satu unit hunian dipengaruhi oleh kepemilikan lahan yang sempit. Pada lampiran: B.4 disajikan tabulasi silang antara kepemilikan luas pekarangan dengan kepemilikan bangunan tradisional. Test Chi-Square menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan tingkat kontingensi yang kuat; pengaruh antara kepemilikan luas pekarangan dengan kepemilikan bangunan tradisional. Sedangkan tingkat pendapatan (lampiran B.3) dan jumlah KK (lampiran B.5) tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap lengkapnya bangunan tradisional yang menempati *natah*.

Ukuran *natah* pada karang tua atau pada permukiman desa adat tua yang “masih asli” rata-rata 6 x 7 meter sedangkan ukuran *natah* pada tempat yang baru (*ngarangin*) lebarnya minimum 2 meter dengan panjang yang bervariasi sesuai dengan ukuran tanah. Lebar 2 meter ini karena ukuran *sanggah natah* yang mengambil tempat 2 x 2 meter. *Sanggah natah* mengharuskan *natah* terbuka, karena *sanggah natah* tidak boleh dibawah atap bangunan atau bahkan tidak boleh kena cucuran atap. Di desa adat tua bentuk *natah* yang sering dijumpai adalah bentuk segi empat panjang dengan 2 unit *bale* tradisional yakni *bale daja* dan *bale delod* sedangkan bangunan hunian lainnya bangunan modern (Gambar : 4.1, Variasi *Natah* dan Bangunan Yang Menempatnya). Pada desa adat tua masih terlihat massa bangunan yang berorientasi kedalam *natah*, namun pada desa adat baru pola tersebut tidak tampak lagi karena bangunan sebagian besar hanya satu unit (monolit).

Kondisi nilai-nilai *natah* sampai saat ini dan keinginan menerapkan nilai-nilai *natah* secara keseluruhan dirangkum pada Tabel : IV. 4, Diagram 4.2 dan Diagram 4.3. Secara faktual keseluruhan nilai-nilai *natah* yang masih bertahan sebesar 77,33 % atau mengalami perubahan sebesar 22,67 %. Nilai *natah* yang paling bertahan secara faktual



## TESIS

PERSEPSI MASYARAKAT BALI TERHADAP  
SISTEM NILAI RUANG TERBUKA TRADISIONAL  
DI KOTA DENPASAR

VARIASI NATAH DAN BANGUNAN  
YANG MENEMPATINYA  
DI DESA ADAT DENPASAR

### LEGENDA

└ SANGGAH

■ SANGGAH NATAH

■ PENUNGGUN KARANG

□ RUANG TERBUKA TRADISIONAL  
(NATAH)

■ BANGUNAN TRADISIONAL

□ BANGUNAN MODERN

SKALA PETA

TANPA SEKALA

UTARA

SUMBER :



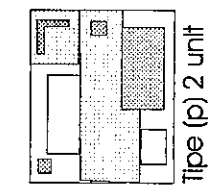
SURVEY LAPANGAN

NO. PETA

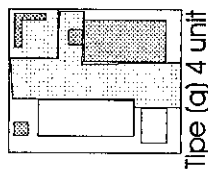
HAL. PETA

4.1

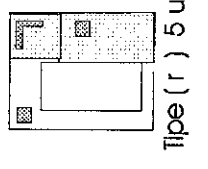
83



Tipe (p) 2 unit

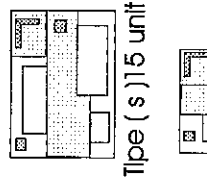


Tipe (q) 4 unit

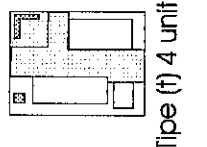


Tipe (r) 5 unit

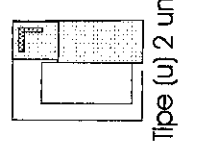
BANJAR ADAT BARU



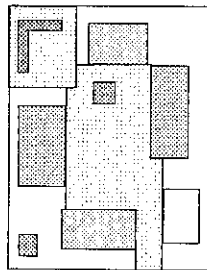
Tipe (s) 15 unit



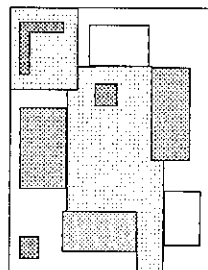
Tipe (t) 4 unit



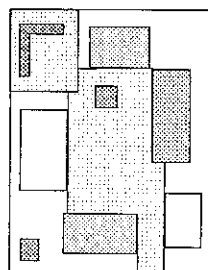
Tipe (u) 2 unit



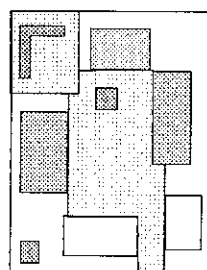
Tipe (k) 10 unit



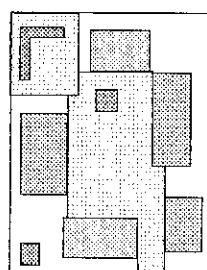
Tipe (l) 3 unit



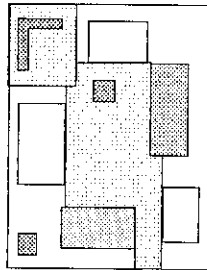
Tipe (m) 4 unit



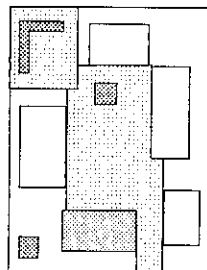
Tipe (n) 6 unit



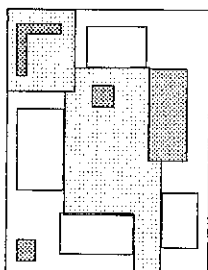
Tipe (o) 8 unit



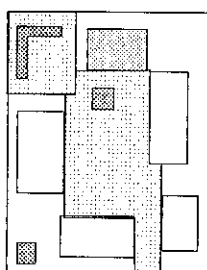
Tipe (f) 4 unit



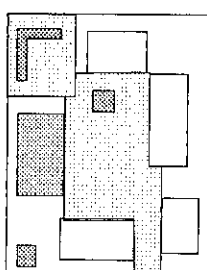
Tipe (g) 2 unit



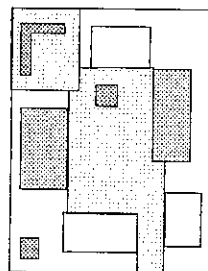
Tipe (h) 3 unit



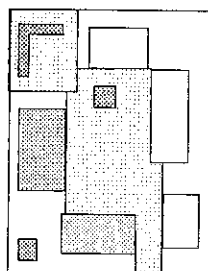
Tipe (i) 3 unit



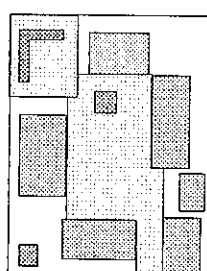
Tipe (j) 2 unit



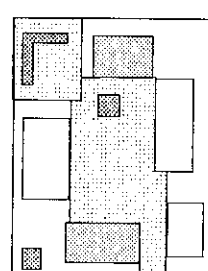
Tipe (a) 11 unit



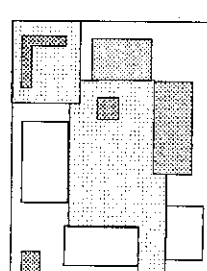
Tipe (b) 7 unit



Tipe (c) 3 unit



Tipe (d) 1 unit



Tipe (e) 1 unit

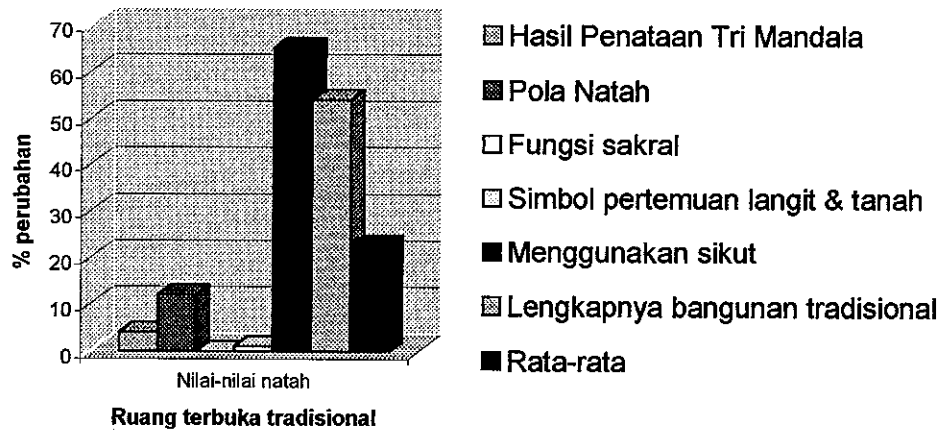
adalah fungsi sakral (100%) dan yang paling lemah adalah penggunaan *sikut* pada *natah* (35 %). Keinginan atau preferensi masyarakat menerapkan nilai-nilai *natah* sebesar 78,77 %. Preferensi penerapan nilai fungsi sakral *natah* menempati peringkat tertinggi (99%) dan terendah penerapan *sikut* (39,50 %). Kesimpulannya bahwa nilai-nilai *natah* yang masih bertahan adalah : merupakan hasil penataan *tri mandala*; sebagai pusat orientasi bangunan (pola *natah*); fungsi sakral; dan simbol pertemuan langit dan tanah. Sedang penggunaan *sikut* telah diabaikan dan lengkapnya bangunan tradisional pada *natah* telah berubah dari 9 unit menjadi 4 sampai 5 unit bangunan tradisional terdiri bangunan *sangah induk*, *penunggun karang*, *sangah natah*, dan 1 – 2 bangunan *bale* tradisional.

TABEL : IV.4  
IDENTIFIKASI PERUBAHAN DAN KEINGINAN  
MENERAPKAN NILAI-NILAI *NATAH*

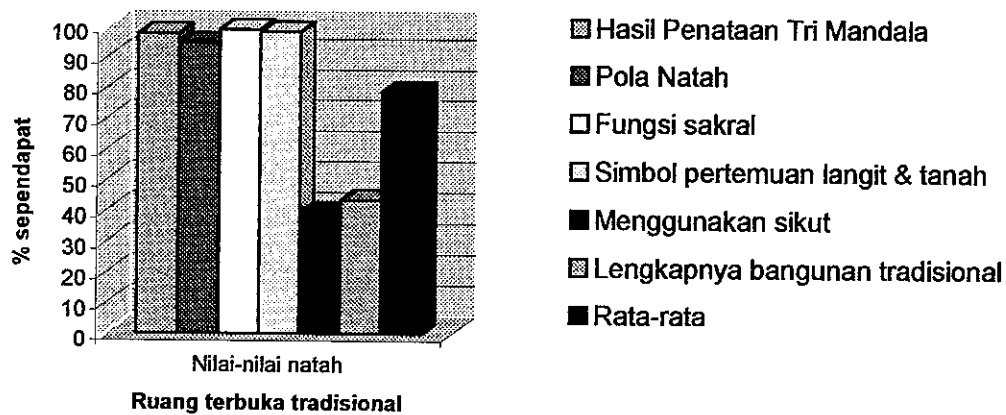
No.	Nilai-nilai natah	Menerapkan S/d saat ini (%)		Ingin (sependapat) pada saat		
		Ya	Tidak	merenovasi (%)	ngarangin (%)	rata-rata (%)
1	Hasil Penataan <i>Tri Mandala</i>	96,00	4,00	99,00	98,00	97,67
2	Pola <i>Natah</i>	88,00	12,00	97,00	99,00	94,67
3	Fungsi sakral	100,00	0,00	98,00	99,00	99,00
4	Simbol pertemuan langit & tanah	99,00	1,00	97,00	99,00	98,33
5	Menggunakan <i>sikut</i>	35,00	65,00	37,00	42,00	39,50
6	Lengkapnya bangunan tradisional	46,00	54,00	45,00	42,00	43,50
	Rata-rata	77,33	22,67	78,83	79,83	78,78

Sumber : Hasil pengolahan data primer tahun 2002

**DIAGRAM : 4.2**  
**IDENTIFIKASI PERUBAHAN NILAI-NILAI *NATAH* SAMPAI**  
**SAAT INI**



**DIAGRAM 4.3**  
**IDENTIFIKASI PENDAPAT DAN KEINGINAN MASYARAKAT**  
**TERHADAP NILAI-NILAI *NATAH* PADA SAAT MERENOVASI**  
**DAN ATAU *NGARANGIN***



#### 4.1.2 *Telajakan*

*Telajakan* sebagai salah satu ruang terbuka tradisional yang berada antara tembok pekarangan dengan got tepi jalan merupakan ruang peralihan dari ruang publik ke ruang privat. Nilai-nilai tradisional dari *telajakan* sebagai acuan :

- (1). Lahan disediakan oleh pemilik bangunan;
- (2). Ditanami tanaman yang menunjang upacara agama;
- (3). Pemeliharanya oleh pemilik bangunan.

Kondisi dan keinginan terhadap nilai-nilai *telajakan* menurut pendapat responden disajikan seperti pada Tabel : IV.5. Nilai-nilai *telajakan* yang masih bertahan sampai dengan saat ini rata-rata 14 % atau telah mengalami perubahan 86 %. Responden yang memiliki *telajakan* nilai-nilainya sesuai dengan ruang terbuka tradisional : penyediaan lahannya oleh responden sendiri; ditanami tanaman penunjang upacara agama; dan pemeliharanya dilakukan oleh pemilik *telajakan*. Bagi responden yang tidak memiliki *telajakan*; beberapa alasan yang melandasinya antara lain : terbatasnya lahan yang dimiliki; rumah responden berada pada jalan kecil (gang); trauma karena lahan *telajakan* yang telah disediakan sebelumnya dimanfaatkan untuk pelebaran jalan dan trotoarisasi. Rendahnya kepemilikan *telajakan* saat ini karena kepemilikan pekarangan hunian yang sempit seperti dikemukakan oleh beberapa responden. Berdasarkan test Chi-Square juga menunjukkan bahwa ada pengaruh yang cukup signifikan antara kepemilikan luas pekarangan dengan kepemilikan *telajakan* seperti dijaikan pada lampiran : B.8. Tabulasi silang antara pendidikan dan ketersediaan *telajakan* (lampiran B.6) ; pendapatan dan ketersediaan *telajakan* (lampiran B.7) tidak menunjukkan adanya signifikansi pengaruh. Rendahnya kepemilikan *telajakan* berpengaruh terhadap menurunnya citra struktur ruang desa adat. Perlu diambil langkah-langkah oleh pemerintah berupa keputusan

kebijaksanaan yang dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam pengadaan *telajakan*.

Kesadaran masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam pengadaan *telajakan*.

Sebagian besar atau 95, 33 % responden berkeinginan menerapkan nilai-nilai *telajakan* apabila berada ditempat yang baru dengan alasan untuk keasrian dan keindahan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai *telajakan* tersebut dapat diterima penerapannya pada tempat yang baru (*ngarangin*) karena rata-rata yang berkeinginan menerapkan pada tempat baru (*ngarangin*) masih diatas 60 % yakni 95,33 % ( Tabel : IV.5). Besarnya perbedaan antara kondisi faktual dan keinginan menerapkan *telajakan* antara lain disebabkan karena sebelumnya ada masa pembangunan dimana masyarakat desa adat kurang memperhatikan nilai-nilai tradisional termasuk nilai-nilai *telajakan*. Namun pada akhir-akhir ini kembali bangkit keinginan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai *telajakan*. Kondisi ini juga tidak terlepas dari adanya intervensi pemerintah dalam upaya untuk mempertahankan nilai-nilai *telajakan*; antara lain melalui lomba desa adat dimana *telajakan* merupakan salah satu kriteria penilaian. Upaya lain dari pemerintah adalah menetapkan pengadaan *telajakan* ini melalui perda tata ruang dan persyaratan dalam perijinan (IMB). Namun perlu dipertegas agar ketentuan tata ruang dan persyaratan *telajakan* dalam IMB diberlakukan juga pada saat perubahan bangunan atau merenovasi bangunan (termasuk di permukiman desa adat) terutama bangunan yang berbatasan langsung dengan jalan. Secara bertahap, apabila ketentuan ini dapat berjalan dengan baik maka *telajakan* akan terwujud kembali di seluruh permukiman kota termasuk permukiman desa adat.

TABEL : IV.5  
ANALISIS KONDISI DAN KEINGINAN MASYARAKAT TERDAP NILAI-NILAI  
TELAJAKAN

No	Nilai-nilai tradisional telajakan	s/d saat ini (%)		Keinginan di tempat baru (%)	
		ya	tidak	S	TS
1	Penyediaan lahan oleh responden	12,00	88,00	96,00	4,00
2	Ditanami tanaman penunjang untuk upacara agama	16,00	84,00	96,00	4,00
3	Pemeliharaan oleh pemilik <i>telajakan</i>	14,00	86,00	94,00	6,00
	Rata-rata	14,00	86,00	95,33	4,67

Sumber : Hasil analisis data primer tahun 2002

Keterangan:

S = Sependapat

TS = Tidak sependapat

Memperhatikan nilai-nilai ruang terbuka dalam satu unit hunian : *natah dan telajakan* dengan beberapa perubahan nilai serta keselarasan dengan nilai-nilai yang tetap dipertahankan ; ada kecendrungan terbentuk pola ruang terbuka pada satu unit hunian yakni adanya ruang terbuka : *natah* sanggah, *natah* bale, koridor pintu masuk dan *telajakan*. Beberapa variasi pintu masuk seperti telah dikemukakan pada Sub Bab 2.2.3 sebelumnya; demikian juga yang terjadi pada wilayah penelitian dimana pintu masuk ke dalam unit hunian dibuat tetap berada pada *nista mandala* (barat daya) sehingga untuk hunian yang berada disebelah barat dan selatan jalan, harus membuat lorong dibelakang bangunan berupa ruang terbuka untuk mencapai tempat masuk ke dalam *natah* dari *nista mandala* (barat daya). Pekarangan disebelah barat jalan memerlukan ruang terbuka pada sisi sebelah selatan , sedangkan pekarangan yang berada di sebelah selatan jalan harus menyediakan ruang terbuka pada sisi barat dari pekarangan hunian.

#### 4.1.3 Radius Kesucian *Pura*

Radius Kesucian *Pura* diwilayah studi dibedakan atas radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* dan radius kesucian *Pura Kahyangan Desa*. Radius kesucian pura yang menjadi acuan adalah :

- (1). Radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* adalah *apeneleng* (sejauh mata memandang) atau setara dengan 2 km dari tembok penyengker *pura*;
- (2). Radius kesucian *Pura Kahyangan Desa* adalah *apanimpug* (sejauh lemparan batu); yang diterjemahkan 25 meter terhadap bangunan tidak bertingkat dan 50 meter terhadap bangunan bertingkat.

Hanya 17 % responden yang sependapat dengan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan*. Responden yang tidak sependapat dengan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* ( 2 km) menilai terlalu jauh untuk bisa dilaksanakan di perkotaan. Test Chi-Square (lampiran B.10) menunjukkan mata pencaharaan atau pekerjaan responden signifikan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* dimana sebagian besar pegawai negeri sipil sependapat dengan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* dan wiraswasta yang jumlahnya lebih besar sebagian besar tidak sependapat dengan nilai radius kesucian *Pura Dang Kahyangan*. Tabulasi silang antara pendidikan dengan pendapat tentang radius kesucian pura (lampiran B.9) tidak menunjukkan adanya signifikansi pengaruh.

Radius kesucian *Pura Kahyangan Desa* relatif dapat diterima namun masih perlu upaya nyata mewujudkan radius kesucian pura tersebut; karena hanya 51 % responden sependapat dengan nilai radius kesucian *Pura Kahyangan Desa*. Rata-rata responden yang sependapat dengan nilai-nilai radius kesucian *pura* ( radius kesucian *Pura Dang*



*Kahyangan* dan *Pura Kahyangan Desa*) adalah 34 %. Secara rinci pendapat responden terhadap radius kesucian *pura* disajikan pada Tabel : IV.6.

**TABEL : IV.6**  
**PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP RADIUS KESUCIAN PURA**

No.	Radius Kesucian Pura	Pendapat masyarakat (%)		
		S	TS	Jumlah
1	Pura Dang Kahyangan	17,00	83,00	100,00
2	Pura Kahyangan Desa	51,00	49,00	100,00
	Rata-rata	34,00	66,00	100,00

Sumber : Hasil analisis data primer

Keterangan :

S = Sependapat

TS = Tidak sependapat

Sementara responden yang tidak sependapat dengan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* ( 2 km) sebagian besar memberikan alternatif agar radius kesuciannya kurang dari 100 meter mengingat keterbatasan lahan di Kota Denpasar ( Tabel IV.7).

**TABEL : IV.7**  
**KEINGINAN RESPONDEN YANG TIDAK SEPENDAPAT DENGAN RADIUS KESUCIAN PURA DANG KAHYANGAN (RADIUS 2 KM)**

No.	Alternatif radius kesucian <i>Pura Dang Kahyangan</i>	% Frekuensi jawaban	Keterangan
1	kurang dari 100 meter	75	Sependapat radius kesucian pura = 13 %
2	100 meter	5	
3	200 meter	3	
4	300 meter	2	
5	400 meter	2	
	Total	87	

Sumber : Hasil analisis data primer tahun 2002

Nilai radius kesucian *Pura Kahyangan Desa*, 25 meter dari tembok penyengker *pura* untuk bangunan tidak bertingkat dan 50 meter untuk bangunan bertingkat. Alternatif pilihan responden terhadap bangunan yang telah ada pada radius kesucian cukup diberikan pembinaan kepada pemiliknya. Kondisi di sekitar *Pura Desa* yang berbatasan langsung dengan pertokoan bertingkat dan saat ini sedang dilakukan penataan oleh Pemda

Kota Denpasar bersama Desa Adat Denpasar untuk membongkar bangunan pertokoan di sekitarnya dengan memberikan kompensasi yang telah disepakati bersama karena kepemilikan lahan adalah milik Desa Adat Denpasar. Status kepemilikan lahan pura yang ada di sekitar pura sangat membantu penerapan radius kesucian pura. Saat ini telah selesai ditata/dibongkar bangunan pertokoan yang ada di depan *Pura* dan direncanakan menyusul akan ditata/ dibongkar bangunan pertokoan di sebelah timur *Pura*.

Meskipun pendapat masyarakat sebagian besar ingin memberikan toleransi dengan memberikan pembinaan kepada pemiliknya, namun sebagian lainnya juga ada yang berpendapat agar bangunan di sekitar *Pura Desa* dibongkar untuk menjaga kesucian dan kekhusukan pada saat sembahyang. Selengkapnya pendapat responden tentang bangunan yang telah ada pada radius kesucian *Pura Kahyangan Desa* disajikan pada Tabel : IV.8. *Pura Dalem* sebagai salah satu *Pura* status *Kahyangan Desa* sangat memungkinkan untuk diterapkan radius kesucian seperti disebutkan diatas, karena *Pura Dalem* berada di dalam area *setra* dimana bangunan sekitarnya cukup jauh ( lebih dari 50 meter).

TABEL : IV.8  
PENDAPAT RESPONDEN TERHADAP BANGUNAN YANG BERADA  
PADA RADIUS PURA KAHYANGAN DESA

No	Perlakuan terhadap bangunan yang berada pada radius kesucian	% Frekuensi jawaban	Keterangan
1	diberikan pembinaan kpd pemilik	26	Tidak sependapat radius kesucian pura = 49 %
2	diberlakukan status quo	8	
3	dijijinkan selama umur bangunan	1	
4	Dibongkar	16	
	Total	51	

*Sumber : Hasil analisis data primer tahun 2002*

Mencermati pendapat masyarakat terhadap radius kesucian *Pura Dang Kahyangan*; bertentangan dengan kebijaksanaan yang tertuang dalam rencana tata ruang kota. Berdasarkan informasi Dinas Tata Kota Dan Bangunan Kota Denpasar bahwa terdapat beberapa kemungkinan penyebab dari perbedaan tersebut antara lain :

- Radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* dituangkan dalam Perda Tata Ruang Kota Denpasar relatif baru (tahun 1999); meskipun ketentuan tersebut telah ada sejak dikeluarkannya surat keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat tahun 1994;
- Sosialisasi rencana tata ruang belum sampai ke masyarakat langsung; hanya melibatkan aparat pada tingkat desa saja;
- Karena relatif baru, pejabat pelaksana perijinan juga belum pernah memproses perijinan yang terkait dengan ketentuan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan*;
- Ketentuan radius kesucian pura yang tertuang dalam rencana tata ruang masih bersifat umum; masih perlu tindak lanjut yang lebih rinci terutama ketentuan bangunan yang diijinkan pada radius tersebut.

Sebelum diterjemahkan ke satuan metrik ( 2 km ) , radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* menggunakan ukuran *apaneleng alit* (sejauh cakupan pandangan mata). Radius kesucian *pura* berfungsi untuk mengamankan *pura* dari kegiatan non profan sehingga kesakralan *pura* dan kekhusukan umat bersembahyang dapat terjaga dengan baik. Terjemahan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* sejauh *apaneleng alit* sangat relatif untuk disetarkan dengan 2 km. Le Corbusier dalam perencanaan taman Kota Chandigarh, India menggunakan cakupan pandangan mata setara dengan 400 meter. Adanya konsepsi *desa-kala-patra* <sup>4)</sup> yang menjelaskan adanya fleksibilitas namun tetap pada landasan filosofinya menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan kesucian pura. Konsep radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* (2 km) yang dikembangkan adalah yang dapat menjembatani antara kondisi yang ada saat ini dengan tujuan menjaga kesakralan *pura* dan menjaga kekhusukan umat yang bersembahyang. Antara lain dalam bentuk pengendalian pembangunan.

---

<sup>4)</sup> Desa-kala-patra adalah suatu istilah digunakan untuk menyesuaikan dengan tempat-waktu dan keadaan; sesuai dengan hati nurani dan tetap dapat dipertanggungjawabkan terhadap Ida Sanghyang Widhi (=Tuhan Yang Maha Esa)

Sesuai dengan *konsep tri mandala* maka radius kesucian Pura Dang Kahyangan (2 km) dapat dibagi menjadi tiga zona; zona 1 yang berada pada radius 600 meter dari pura merupakan zona *utama*, zona 2 berada pada radius 600 - 1.200 meter adalah zona *madya* dan zona 3 antara 1.200 – 2.000 meter dari pura adalah zona *nista*. Adanya pedoman pengendalian pembangunan ini diharapkan dapat memudahkan dalam proses implementasi radius kesucian pura sesuai dengan perda rencana tata ruang.

#### 4.1.4 *Setra*

*Setra* (“kuburan”) yang ada di Desa Adat Denpasar adalah : *Setra Agung Badung, Setra Mergaya, Setra Seblanga, Setra Bantas, Setra Sumuh, dan Setra Lumintang*. Makna yang terkandung atau nilai-nilai dari *setra* tersebut adalah :

- (1). Merupakan komponen Desa Adat;
- (2). Media penguburan mayat dan atau media upacara *ngaben* (pembakaran mayat);
- (3). Ada syarat-syarat tertentu (disebut *penanjung batu*) yang harus dipenuhi bagi umat hindu non anggota desa adat yang bersangkutan untuk melaksanakan penguburan mayat atau *ngaben* di *setra* tersebut.

Seluruh responden sependapat mempertahankan nilai-nilai *setra*, karena ingin melestarikan *setra*, tidak digusur, dan tidak ingin *setra* dirubah fungsinya menjadi ruko, mall, hotel, swalayan dan sebagainya. Saran yang dikemukakan oleh responden antara lain agar ketentuan (*penanjung batu*) tidak memberatkan dan pelaksanaannya konsisten baik bagi pemakai *setra* maupun pelaksana ketentuan (*penanjung batu*) tersebut. Kondisi ini perlu didukung berupa keputusan kebijaksanaan dari pemerintah kota yang dapat mempertahankan keberadaan *setra* antara lain penataan pertamanan yang sesuai dengan atau yang menunjang fungsi *setra*.

#### 4.1.5 Alun-alun

Alun-alun yang dimaksudkan disini adalah lapangan Puputan yang berada di wilayah Desa Adat Denpasar. Nilai-nilai dari alun-alun yang menjadi acuan adalah :

- (1). Peninggalan sejarah (Perang Puputan);
- (2). Sebagai pelengkap *Catus Patha/Pempatan Agung*;
- (3). Fungsinya sebagai tempat Tawur *Kesanga*.

Sebagian besar responden atau rata-rata 97,67 % ingin tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional tersebut diatas dengan alasan ingin melestarikan alun-alun untuk dikenang sebagai peninggalan sejarah dan juga dengan alasan letak alun-alun yang strategis di Kota Denpasar. Sebagian kecil responden juga berpendapat agar kegiatan upacara yang bersifat nasional dibawa ke lapangan Renon. Selengkapnya pendapat masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional dari lapangan Puputan tersebut disajikan pada Tabel : IV.9

TABEL : IV.9  
PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP NILAI-NILAI LAPANGAN  
PUPUTAN BADUNG (ALUN-ALUN)

No.	Nilai-nilai alun-alun yang Dipertahankan	Frekuensi Jawaban (%)	Alasan
1	Peninggalan sejarah	98	- letaknya strategis
2	Pendukung Catus Patha	99	- melestarikan alun-alun
3	Tawur Kesanga	96	
	Rata-rata	97,67	

*Sumber : Hasil pengolahan data primer tahun 2002*

## 4.2 Pendapat dan Keinginan Masyarakat Bali Terhadap Nilai-nilai Ruang Terbuka Non Tradisional

Ruang terbuka tradisional *natah* disetarakan dengan ruang terbuka pekarangan atau halaman; mempunyai nilai-nilai fungsi non tradisional: pertamanan dan privasi apabila dikelilingi tembok; sebagai kebun (*garden*), tempat main, sirkulasi udara, parkir, dan area pelayanan. Pada pembahasan nilai tradisional *natah* menjadi pusat orientasi bangunan terungkap nilai non tradisional antara lain : *natah* sebagai tempat bermain anak-anak (= tempat main); *natah* sebagai ruang terbuka dan penghijauan (= pertamanan); *natah* memberi peluang sirkulasi udara, penghijauan dan privasi (= area pelayanan dan privasi); *natah* sebagai tempat komunikasi, privasi dan terima tamu (= area pelayanan dan privasi); *natah* dapat memperindah lingkungan (= pertamanan); *natah* dikatakan indah dan nyaman ditempati (= pertamanan dan privasi). Pada pembahasan terkait dengan fungsi sakral *natah* terungkap bahwa *natah* juga dapat sebagai area pertamanan. Pada pembahasan nilai *natah* sebagai simbol pertemuan antara langit (*purusa*) dan tanah (*pradana*) terungkap bahwa *natah* harus terbuka sehingga dapat sinar matahari dan udara segar.

*Telajakan* disetarakan dengan sempadan pagar; nilai fungsi sempadan pagar adalah : taman dan pembatas privasi; pedestrian dan taman tempat main; dan penyaring polusi udara. Nilai non tradisional dari *telajakan* terungkap dari persepsi masyarakat Bali antara lain : keindahan dan penahan polusi (= penyaring polusi udara); kelestarian, keserasian dan keindahan lingkungan (= fungsi pertamanan); *telajakan* ditanami taman hias saja (= fungsi pertamanan); menjaga keseimbangan manusia dengan alam (= fungsi taman).

Nilai-nilai dari radius kesucian *pura* disetarakan dengan sempadan *pura*; nilai fungsi melindungi dan mempertinggi kenyamanan budaya. Nilai radius kesucian *pura*

untuk menjaga kekhusukan umat bersembahyang adalah juga nilai non tradisional (= menjaga kenyamanan budaya dan alam).

*Setra* sebagai ruang terbuka tradisional disetarakan dengan ruang terbuka non tradisional tempat pemakaman. Nilai fungsi pemakaman adalah tempat pemakaman dan ruang terbuka hijau kota. Tidak terungkap persepsi masyarakat terkait dengan nilai-nilai tempat pemakaman.

Alun-alun sebagai ruang terbuka tradisional disetarakan dengan *community park*. Nilai-nilai non tradisional dari alun-alun adalah sebagai taman dan tempat bermain. Persepsi masyarakat Bali terhadap nilai-nilai non dari alun-alun adalah : sebagai taman dan tempat bermain; sebagai tempat upacara agama dan upacara yang bersifat nasional.

Rekapitulasi persepsi masyarakat Bali terhadap nilai-nilai non tradisional disajikan pada Tabel : IV.10 Persepsi masyarakat Bali terhadap nilai-nilai non tradisional adalah mendukung nilai-nilai tradisional kecuali pada *natah* sebagai tempat hunian, menurut persepsi masyarakat Bali tidak difungsikan sebagai tempat parkir karena umumnya *natah* terlingkupi oleh bangunan. Begitu pula pada *telajakan* tidak difungsikan sebagai pedestrian dan tempat bermain. Pada *setra* tidak digunakan sebagai tempat pemakaman, tetapi tempat pembakaran mayat (*ngaben*). *Setra* sebagai ruang terbuka hijau sesuai dengan persepsi masyarakat Bali.

TABEL : IV.10  
PERSEPSI MASYARAKAT BALI TERHADAP NILAI-NILAI RUANG TERBUKA  
NON TRADISONAL PADA RUANG TERBUKA TRADISONAL

No	Ruang terbuka tradisional	Nilai-nilai non tradisional	Nilai-nilai non tradisional menurut persepsi masyarakat Bali
1	Pekarangan/halaman	- pertamanan & privasi	√
		- kebun	√
		- parkir	X
		- tempat main	√
		- sirkulasi udara	√
		- area pelayanan	√
2	Sempada pagar	- taman	√
		- pembatas	√
		- pedestrian	X
		- tempat bermain	X
		- penyaring polusi udara	√
3	Sempadan Pura	- melindungi kenyamanan budaya	√
4	Pemakaman	- tempat pemakaman	X
		- ruang terbuka hijau	√
5	Community park	- taman	√
		- tempat bermain	√

Sumber : Hasil Analisis data primer tahun 2002

### 4.3 Prospek dan Implikasi

#### 4.3.1 Di Desa Adat Denpasar

Sesuai dengan hasil survey primer bahwa nilai-nilai *natah* yang cenderung dipertahankan oleh masyarakat Desa Adat Denpasar :

- a. *Natah* merupakan hasil penataan pekarangan berdasarkan *tri mandala*;
- b. *Natah* sebagai pusat orientasi massa bangunan;
- c. Fungsinya sebagai tempat upacara agama (Hindu);
- d. Simbol pertemuan antara langit (*purusa*) dan tanah (*pradana*).



Sedangkan nilai tradisional *natah* lainnya yakni penggunaan *sikut* telah mengalami perubahan dalam penerapannya. Adanya perubahan bangunan tradisional yang menempati, biasanya empat atau lima unit dengan satu atau dua *bale* tradisional maka kebutuhan akan lahan semakin kecil pula. Jika bangunan yang menempati *natah* lengkap (9 unit) dan pengukuran tradisional masih digunakan maka ruang terbuka yang tercipta akan sangat besar dan kebutuhan lahan diperkirakan antara 600 – 800 m<sup>2</sup> untuk setiap unit hunian. Transformasi baru ini cenderung hanya membutuhkan lahan antara 250 – 600 m<sup>2</sup>. Pola *natah* yang baru ini cenderung berlaku bagi warga desa adat tua, sedang bagi warga desa adat yang baru (perantau) meberlakukan pola *natah* ini di desa asalnya. Kecendrungan pola *natah* yang baru ini dengan luas *natah* menyempit dari luas *natah* yang ‘asli’; namun penyempitannya mempunyai limitasi karena adanya bangunan *sanggah* (induk) dan *sanggah natah* yang mengharuskan *natah* tetap terbuka. Pola *natah* ini biasanya menempati sisa lahan yang belum terbangun dari kepemilikan satu keluarga besar disekitar permukiman yang telah terbangun. Atau menempati lahan yang masih berada di lingkungan desa adat dimana pemiliknya memang berasal dari desa adat tersebut. Kondisi ini belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah dalam penataannya.

Nilai-nilai *telajakan* di Desa Adat telah diabaikan karena hanya sebagian kecil yang masih memiliki *telajakan*, namun keinginan mempertahankan nilai-nilai *telajakan* masih tetap ada. Kondisi ini telah didukung oleh pemerintah kota melalui perda tata ruang dimana pengadaan *telajakan* menjadi persyaratan dalam perijinan (IMB). Perlu dipertegas bahwa pengadaan *telajakan* sesuai dengan perda tata ruang dan persyaratan IMB berlaku juga bagi permukiman desa adat yang akan mengadakan perubahan bangunan terutama bangunan yang berbatasan langsung dengan jalan. Adapun nilai-nilai *telajakan* tersebut : lahan *telajakan* disediakan oleh pemilik bangunan; ditanami tanaman yang menunjang

upacara agama; dan pemeliharanya oleh pemilik bangunan. Apabila ini dapat diwujudkan maka cukup baik untuk keseimbangan dan keserasian lingkungan berfungsi merangkai ruang terbuka mulai dari *natah* menerus mengikuti pola jalan sampai ke ruang-ruang terbuka lainnya . Fungsi *telajakan* yang lain adalah pelindung bagi pejalan kaki dan penghuni perumahan yang berbatasan dengan jalan dari polusi akibat lalu lintas kendaraan.

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar juga mengatur ketentuan mengenai radius kesucian pura; dibedakan atas radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* dan radius kesucian *Pura Kahyangan Desa*. Masyarakat Desa Adat Denpasar cenderung tidak sependapat dengan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* (sejauh 2 km) karena dinilai terlalu luas. Namun disisi lain pemahaman masyarakat tentang ketentuan radius kesucian pura sesuai dengan kebijaksanaan yang tertuang dalam rencana tata ruang kota masih kurang; karena sosialisasinya baru pada tingkat aparat desa. Bahkan aparat pelaksana juga belum paham terhadap radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* terutama ketentuan mengenai bangunan yang boleh dan tidak boleh dibangun pada radius kesucian *pura* tersebut. Memperhatikan hal ini maka sebaiknya pemda kota mempertajam aturan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* dengan mengeluarkan aturan (keputusan kebijaksanaan) yang lebih rinci sehingga lebih mudah dalam proses implementasi. Sebagai bahan pertimbangan radius (2 km) dapat dibagi menjadi tiga zona sesuai dengan tata nilai *tri mandala*. Hal ini akan dibahas lebih rinci pada sub bab prospek dan implikasi terhadap Kota Denpasar.

Radius kesucian *Pura Kahyangan Desa*, dimana masyarakat cenderung sependapat dan telah didukung dengan tindakan nyata; pembebasan atau penghentian perpanjangan masa kontrak pertokoan yang berada disekitar *Pura Desa* (Jalan Gajah

Mada). Proses relokasi pertokoan tidak mengalami hambatan yang berarti karena tanahnya milik Desa Adat Denpasar.

*Setra* sebagai ruang terbuka mempunyai prospek yang cukup kuat untuk bertahan karena merupakan komponen desa adat atau tidak mudah untuk direlokasi ketempat lain karena merupakan komponen desa adat. Desa Adat Denpasar sangat berkepentingan untuk mempertahankan *setra* terkait dengan fungsinya sebagai media atau tempat pembakaran mayat (*ngaben*). Belum ada kebijakan pemerintah kota yang memperkuat keberadaan *setra* sesuai dengan pendapat masyarakat dan masih kurangnya penataan pertamanan ditinjau dari nilai non tradisional.

Ada kebanggaan dari masyarakat Desa Adat Denpasar untuk mempertahankan Alun-alun Puputan dengan nilai-nilai tradisional :

1. Peninggalan sejarah (Perang Puputan);
2. Sebagai pelengkap *Catus Patha/Pempatan Agung*;
3. Fungsinya sebagai tempat Tawur *Kesanga*;

Nilai-nilai non tradisional menurut pendapat masyarakat Denpasar dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi atau nilai-nilai tradisional. Kondisi ini telah didukung dengan surat keputusan walikota tentang pemanfaatan alun-alun sebagai taman kota.

#### **4.3.2 Prospek dan Implikasi Terhadap Kota Denpasar.**

Permukiman desa adat di Kota Denpasar seperti disajikan pada Gambar : 3.2 mempunyai karakteristik permasalahan ruang terbuka tradisional yang sama dengan Desa Adat Denpasar. Sistem nilai ruang terbuka tradisional yang menjadi acuan bersumber dari filosofi *Tri Hita Karana* dan *Tri Angga* baik dalam lingkungan desa maupun dalam tempat tinggal. Desa Adat Denpasar dapat mewakili seluruh desa adat yang ada di Kota Denpasar

karena wilayahnya cukup luas ; menjangkau pusat kota sampai pinggiran kota. Jumlah seluruh desa adat di Kota Denpasar adalah 35 desa adat dengan pola permukimannya yang sama. Kecendrungan yang terjadi terhadap nilai-nilai ruang terbuka tradisional : *natah*, *telajakan*, *radius kesucian pura*, *setra* dan *alun-alun* di desa adat lainnya di Kota Denpasar sama dengan dengan di Desa Adat Denpasar.

*Natah* dengan nilai-nilainya sesuai dengan persepsi masyarakat cenderung diterapkan disekitar permukiman masing-masing desa adat Di Kota Denpasar terutama bagi warga desa adat tua.

*Telajakan* dengan nilai-nilainya cenderung diadakan untuk seluruh Kota Denpasar, karena didukung oleh perda tata ruang. *Telajakan* ini berfungsi merangkai ruang terbuka mulai dari *natah*, *telajakan* kemudian ke ruang terbuka lainnya mengikuti struktur jaringan jalan.

Radius kesucian *Pura Kahyangan Desa*, dengan nilai 25 meter untuk bangunan tidak bertingkat dan 50 meter untuk bangunan bertingkat prospektif dan didukung oleh masyarakat serta didukung oleh Perda Tata Ruang Kota Denpasar. Akan lebih baik jika pada radius kesucian pura kepemilikan lahannya adalah *duwe pura* (milik pura) seperti yang terjadi saat ini di Desa Adat Denpasar; desa adat sedang menata radius kesucian pura desa dengan tidak memperpanjang kontrak pertokoan yang ada di sekitar *pura*. Namun radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* cenderung ditolak oleh masyarakat karena berbagai pertimbangan antara lain : dinilai terlalu luas cakupannya; kurangnya pemahaman masyarakat tentang radius kesucian; sosialisasi perda tata ruang belum menyentuh masyarakat secara langsung; aparat pelaksana belum pernah memproses perijinan pembangunan yang terkait dengan ketentuan radius *Pura Dang Kahyangan* karena ketentuan tersebut relatif masih baru. Sebagai bahan pertimbangan dengan

memperhatikan kondisi tersebut diatas maka pada radius (2 km) tidak berupa ruang terbuka , namun dalam bentuk pengendalian pembangunan yang dapat menunjang fungsi radius kesucian *pura*. Pada radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* dapat dibagi menjadi tiga zona sesuai dengan tata nilai *tri mandala*. Arahkan pembangunan pada masing-masing zona adalah :

- Pada zona 1 (radius 600 meter dari *pura*) diarahkan untuk bangunan yang terkait dengan kegiatan persembahyangan dan pembinaan umat seperti : *dharmasala* = tempat penginapan pendeta, *pesamuan* = tempat pertemuan para pendeta, dan *pesraman* = fasilitas pembinaan umat/ sekolah agama, dan permukiman *pengemong pura*<sup>5)</sup>;
- Pada zona 2 ( zona yang berada pada radius 600 – 1200 meter dari *pura*) diarahkan untuk permukiman *penyusung pura*<sup>6)</sup>;
- Pada zona 3 ( zona yang berada pada radius 1200 - 2000 meter dari *pura*) diarahkan untuk permukiman *para pamedek*<sup>7)</sup>

Bangunan yang telah ada pada masing-masing zona, yang telah memiliki perijinan lengkap (antara lain : ijin prinsip, ijin lokasi, IMB, HO ) dapat diberlakukan status quo, namun apabila mengadakan perubahan harus menyesuaikan dengan ketentuan ini. Batas masing-masing zona dilapangan dapat berupa fisik alami seperti sungai dan batas non alami seperti jalan; hal ini diperlukan adanya penelitian khusus.

*Setra* cenderung dipertahankan oleh masyarakat karena merupakan bagian dari desa adat namun belum adanya dukungan pemerintah yang nyata dalam upaya mempertahankan *setra*. *Setra* sebagai salah satu ruang terbuka sangat bermanfaat untuk

<sup>5)</sup> *Pengemong pura* adalah pengayom pura biasanya keluarga raja atau keluarga *puri*.

<sup>6)</sup> *Penyusung pura* adalah umat hindu yang secara turun temurun bersembahyang di suatu *pura* tertentu karena ada hubungan keturunan atau profesi tertentu.

<sup>7)</sup> Para pamedek adalah umat hindu yang datang bersembahyang disuatu pura umum tertentu (*Pura Dang Kahyangan* termasuk pura umum).

dipertahankan ; menjaga keseimbangan antara ruang terbuka dengan daerah terbangun di Kota Denpasar dan lebih jauh untuk pembangunan kota yang berkelanjutan. Penataan pertamanan disekeliling *setra* belum tertata dengan baik.

Sama dengan *setra*, alun-alun juga cenderung dipertahankan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar telah mendukung kecenderungan tersebut dengan surat keputusan walikota yang menetapkan alun-alun sebagai taman kota. Alun-alun penting untuk menjaga keseimbangan antara ruang terbuka dengan daerah terbangun di Kota Denpasar dan lebih jauh untuk pembangunan kota yang berkelanjutan. Alun-alun juga menjadi identitas Kota Denpasar sebagai kota pusat kerajaan dengan *catus pathanya*.

#### 4.3.3 Prospek dan Implikasi Terhadap Kota-kota di Bali.

Sistem nilai ruang terbuka tradisional : *natah, telajakan, radius kesucian pura, setra dan alun-alun* nilai-nilai acuannya bersumber dari filosofi *Tri Hita Karana* dan *Tri Angga* baik dalam lingkungan desa maupun dalam tempat tinggal. Sistem nilai acuan ini berlaku mulai dari alam samesta, wilayah, lingkungan, tempat tinggal dan seterusnya sampai bangunan, dan manusia. Namun disisi lain adanya konsepsi *tri pamana : desa-kala-patra* menjelaskan adanya fleksibilitas yang tetap terarah pada konteks filosofinya menunjukkan adanya keragaman pola-pola ruang tradisional pada tempat yang berbeda. Adanya keragaman ruang terbuka tradisional; kurang tepat nilai-nilai ruang terbuka tradisional hasil penelitian di Kota Denpasar diterapkan secara langsung di kota lain di Propinsi Bali. Contoh penempatan *sangghah* dalam satu unit hunian di Kota Tabanan tidak selalu pada arah *kaja kangin*; arah *kaja* atau *kangin* tetap dipandang sebagai arah utama disamping posisi jalan juga menentukan dimana tempat hunian berada. Contoh lain adalah pada pusat desa kerajaan yang berkembang menjadi ibu kota kabupaten dengan pola *catus pathanya* ; penempatan alun-alun tidak selalu berada pada arah tenggara seperti di Kota

Denpasar . Di Klungkung, Tabanan, Bangli dan Buleleng letak alun-alun disebelah barat daya *pempatan agung*.

Mempertahankan *setra* seperti yang dipersepsikan di Kota Denpasar cenderung berlaku juga di kota-kota lainnya di Propinsi Bali karena *setra* dimanapun berada adalah merupaka komponen desa adat. Persepsi masyarakat Bali terhadap *setra* cenderung ingin mempertahankan keberadaannya. Kondisi ini juga belum mendapat dukungan yang berarti dari pemerintah lokal dalam upaya mempertahankan ruang terbuka kota.

#### 4.4 Rangkuman

1. Perubahan sistem nilai ruang terbuka di Desa Adat Denpasar sebesar 35,40 %; perubahan tertinggi adalah *telajakan* (86 %) karena lahan sempit, jalan kecil dengan bangunan mepet ke jalan namun *telajakan* ini telah diatur pengadaanya dalam rencana tata ruang kota. Perubahan radius kesucian pura juga cukup besar (66 %) karena sebagian besar masyarakat tidak sependapat dengan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan*. Kelompok sasaran dari kebijaksanaan tata ruang tentang radius kesucian pura ini belum memahami ketentuan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* karena belum tersentuh secara langsung dalam proses sosialisasi tata ruang tentang ketentuan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan*. Radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* perlu dipertimbangkan agar bukan hanya dalam bentuk ruang terbuka (ruang kosong), namun boleh ada bangunan yang sesuai dengan nilai fungsi kesucian. Sebagai bahan pertimbangan radius (2 km) dapat dibagi menjadi tiga zona sesuai dengan tata nilai *tri mandala*.
2. Keinginan responden terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional sebagian besar (81,16 %) sependapat dengan keberadaannya. Keinginan mempertahankan keberadaan

*setra* paling menonjol (100%) menyusul *alun-alun* (97,67) dan *telajakan* (95,33 %).

Keinginan terhadap keberadaan radius kesucian pura sangat kecil (34 %).

3. Rangkuman persepsi masyarakat Bali terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional di Kota Denpasar disajikan pada Tabel : IV.11; perubahan sistem nilai ruang terbuka secara diagramatis disajikan pada Diagram : 4.4; dan keinginan mempertahankan sistem nilai ruang terbuka tradisional disajikan pada Diagram : 4.5;
4. *Natah*, *telajakan* radius kesucian *Pura Kahyangan Desa*, *setra* dan *alun-alun* yang dikaji dalam penelitian ini prospektif diterapkan di Desa Adat Denpasar dan di Kota Denpasar. *Natah* meskipun ada kemungkinan berkurang, namun ada limitasinya karena adanya *sanggah* ('induk') dan *sanggah natah* harus terbuka, dan upacara agama yang harus dilaksanakan ditempat terbuka (*natah*). Untuk hal ini belum adanya dukungan nyata dari pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai *natah* tersebut. *Telajakan* telah didukung keberadaanya dengan perda tata ruang; demikian juga radius kesucian pura dan alun-alun. Sedangkan *setra* belum ada dukungan nyata dari pemerintah tentang prospek keberadaanya.
5. Ditinjau dari konsep ruang terbuka tradisional hanya *setra* yang dipersepsikan dalam penelitian ini cenderung dapat diterapkan di kota-kota lainnya di Propinsi Bali karena sebagai komponen desa adat.



TABEL : IV.11  
PERSEPSI MASYARAKAT BALI TERHADAP SISTEM NILAI RUANG TERBUKA  
TRADISIONAL DI KOTA DENPASAR

No	Ruang Terbuka Tradisional & Nilai-Nilainya	Kondisi saat ini (%)		Keinginan bertahan(%)	Pernyataan	Keterangan
		keberadaan	perubahan			
1	<b>Natah</b> a. Berdasar penataan <i>tri mandala</i> ; b. Pola <i>Natah</i> ; c. Fungsi sakral; d. Simbol pertemuan langit & tanah; e. Menggunakan <i>sikut</i> ; f. Lengkapnya bangunan tradisoal.	<b>77,33</b> 96,00 88,00 100,00 99,00 35,00 46,00	<b>22,67</b> 4,00 12,00 0,00 1,00 65,00 54,00	<b>78,78</b> 97,67 94,67 99,00 98,33 39,50 43,50	Bertahan Bertahan Bertahan Bertahan Bertahan Diabaikan Berubah dari 9 menjadi 5 unit	
2	<b>Telajakan</b> a. Penyediaan lahan oleh pemilik; b. Tanaman penunjang upacara; c. Pemeliharaan oleh pemilik.	<b>14,00</b> 12,00 16,00 14,00	<b>86,00</b> 88,00 84,00 86,00	<b>95,33</b> 96,00 96,00 94,00	Bertahan Bertahan Bertahan Bertahan	Didukung oleh perda
3	<b>Radius kesucian pura</b> a. <i>Pura Dang Kahyangan</i> ;  b. <i>Pura Kahyangan Desa</i> .	<b>34,00</b> 17,00  51,00	<b>66,00</b> 83,00  49,00	<b>34,00</b> 17,00  51,00	Sebagian bertahan Perlu pengaturan pemb.  Bertahan	Sosialisasi kurang  Didukung desa adat
4	<b>Setra</b> a. Komponen Desa Adat; b. Media upacara <i>ngaberr</i> ; c. Mempunyai syarat-syarat tertentu	<b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00	Bertahan Bertahan Bertahan Bertahan	Didukung desa adat
5	<b>Alun-alun</b> a. Peninggalan sejarah; b. Pelengkap <i>pempatan agung</i> ; c. Tempat <i>tawur kesanga</i> .	<b>97,67</b> 98,00 99,00 96,00	<b>2,33</b> 2,00 1,00 4,00	<b>97,67</b> 98,00 99,00 96,00	Bertahan Bertahan Bertahan Bertahan	Didukung SK Walikota
	<b>Seluruh sistem nilai</b>	<b>64,60</b>	<b>35,40</b>	<b>81,16</b>	Bertahan	

Sumber : Hasil Analisis, tahun 2002

DIAGRAM : 4.4  
IDENTIFIKASI PERUBAHAN SISTEM NILAI RUANG TERBUKA TRADISIONAL  
DI KOTA DENPASAR

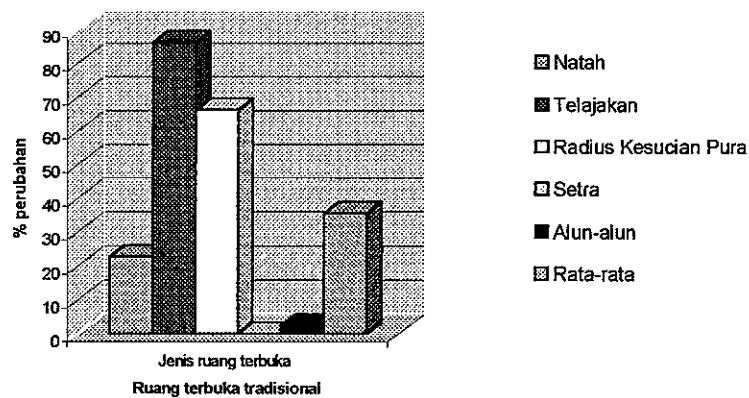
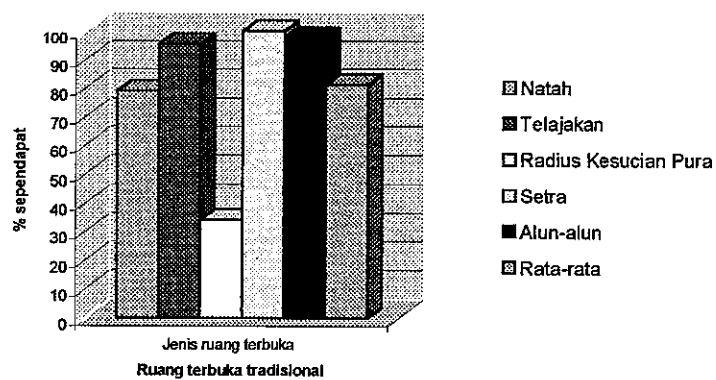


DIAGRAM : 4.5  
KEINGINAN MEMPERTAHANKAN SISTEM NILAI  
RUANG TERBUKA TRADISIONAL



## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem nilai ruang terbuka tradisional di Kota Denpasar tidak mengalami perubahan; kondisi faktual dan keinginan masyarakat Bali terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional masih bertahan.
2. Nilai-nilai *natah* juga tidak mengalami perubahan; kondisi faktual dan keinginan masyarakat Bali terhadap nilai-nilai *natah* masih bertahan. Kondisi ini disebabkan karena *natah* memiliki enam nilai tradisional yang menjadi acuan. Nilai-nilai *natah* dapat bertahan karena :
  - (1). Merupakan hasil penataan pekarangan berdasarkan *tri mandala*;
  - (2). Sebagai pusat orientasi massa bangunan;
  - (3). Berfungsi sebagai tempat upacara agama (Hindu);
  - (4). Simbol pertemuan antara langit (*purusa*) dan tanah (*pradana*).Dua nilai *natah* yang lain : penggunaan *sikut* berubah dengan ukuran metrik dan lengkapnya bangunan tradisional yang menempati *natah* berubah dari 9 (sembilan) unit bangunan tradisional menjadi 4 (empat) atau 5 (lima) bangunan tradisional.
3. Kondisi faktual nilai-nilai *telajakan* telah mengalami perubahan yang cukup besar; namun keinginan masyarakat Bali untuk mempertahankan nilai-nilai *telajakan* masih tetap ada. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya intervensi dari Pemerintah Kota Denpasar seperti lomba *telajakan* dan kebijaksanaan pengadaannya dalam perda

tata ruang dan menjadi persyaratan penerbitan IMB . Semua nilai-nilai *telajakan* masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Bali karena:

- (1). Penyediaannya oleh pemilik lahan;
  - (2). Ditanami tanaman yang menunjang upacara agama;
  - (3). Pemeliharanya oleh pemilik lahan.
4. Sebagian besar masyarakat Bali tidak sependapat dengan radius kesucian *pura*. Ada dua nilai radius kesucian pura : radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* dan radius kesucian *Pura Kahyangan Desa*. Sebagian besar masyarakat Bali tidak sependapat dengan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* karena dinilai terlalu luas cakupannya. Sedangkan pendapat masyarakat terhadap radius kesucian *Pura Kahyangan Desa* cenderung sependapat karena didukung oleh aparat desa adat.
5. Nilai-nilai *setra* tidak mengalami perubahan; semua nilai-nilai *setra* tetap dipertahankan karena :
- (1). Merupakan komponen Desa Adat;
  - (2). Media penguburan mayat;
  - (3). Media upacara *ngaben* (pembakaran mayat);
  - (4). Ada syarat-syarat tertentu (disebut *penanjung batu*) yang harus dipenuhi bagi non anggota desa adat yang bersangkutan untuk melaksanakan penguburan mayat atau *ngaben* di *setra* tersebut.
6. Sebagian besar masyarakat sependapat mempertahankan keberadaan nilai-nilai alun-alun karena :
- (1). Peninggalan sejarah (Perang Puputan) ;
  - (2). Sebagai pelengkap *Catus Patha/Pempatan Agung* ;
  - (3). Fungsinya sebagai tempat Tawur *Kesanga*;

7. Nilai-nilai non tradisional dari ruang terbuka yang dibahas menurut persepsi orang Bali ada yang mendukung dan ada pula yang kurang mendukung nilai-nilai ruang terbuka tradisional. Nilai-nilai fungsi non tradisional yang mendukung nilai-nilai tradisional *natah* : pertamanan & privasi, kebun, tempat main, sirkulasi udara dan area pelayanan. Nilai-nilai non tradisional yang kurang mendukung adalah sebagai tempat parkir pada *natah* perumahan. Pada *telajakan* nilai-nilai ruang terbuka non tradisional yang mendukung : taman, pembatas, penyaring polusi udara; sedangkan nilai-nilai yang kurang mendukung adalah : pedestrian dan tempat bermain karena umumnya *telajakan* lebarnya terbatas. Nilai non tradisional sempadan *pura* mendukung nilai tradisional kesucian *pura*. *Setra* sebagai ruang terbuka tradisional bukan sebagai tempat pemakaman, tetapi sebagai tempat pembakaran mayat (*ngaben*). Alun-alun sebagai taman dan tempat main tidak mengganggu nilai fungsi tradisional.
8. Kebijakan yang tertuang dalam rencana tata ruang kota mengenai radius kesucian *pura* kurang mendapat dukungan dari kelompok sasaran dimana kelompok sasaran jumlahnya cukup banyak; cenderung mengalami kesulitan dalam proses implementasi. Hal ini disebabkan karena radius kesucian *pura* belum dipahami oleh masyarakat karena sosialisasi yang dilakukan hanya pada tingkat aparat desa. Aparat pelaksana dari pemerintah kota juga menginginkan ketentuan yang lebih rinci.

## 5.2 Rekomendasi

1. Kepada Pemerintah Kota Denpasar diusulkan agar nilai-nilai ruang terbuka tradisional : *natah*, *telajakan*, radius kesucian *pura*, *setra* dan alun-alun hasil penelitian ini dijadikan dasar dalam penataan ruang kota terutama dalam penataan Ruang Terbuka Hijau Kota serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam Perancangan Kota.

2. Hasil penelitian ini menjadi bahan kajian dalam teknik pembangunan kota terutama dalam perencanaan dan perancangan kota;
3. Pada kota-kota lain di Propinsi Bali diusulkan agar nilai-nilai *setra* dari hasil penelitian ini dijadikan dasar oleh pengambil kebijakan dalam penataan kota, khususnya dalam penataan Ruang Terbuka Hijau Kota dan dasar bagi penelitian lanjutan dalam Perancangan Kota.
4. Perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai jumlah warga desa adat tua serta kemungkinan deliniasi perkembangan permukimannya untuk menampung hunian pola *natah* dengan ruang terbuka yang berada di tengah-tengah (bangunan berorientasi kedalam *natah*); dan perlu ada dukungan dari pemerintah.
5. Bentuk keselarasan ruang terbuka tradisional yang diusulkan dalam satu unit hunian rumah adalah seperti disajikan pada gambar 5.1, khususnya bagi warga desa adat tua.
6. Perlu dipertegas bahwa pengadaan *telajakan* sesuai dengan perda tata ruang dan persyaratan IMB berlaku juga bagi permukiman desa adat yang akan mengadakan perubahan bangunan terutama bangunan yang berbatasan langsung dengan jalan. Apabila ini dapat diwujudkan akan mendukung citra struktur ruang desa adat; dan cukup baik untuk keseimbangan dan keserasian lingkungan, berfungsi merangkai ruang terbuka mulai dari *natah* menerus mengikuti pola jalan sampai ke ruang-ruang terbuka lainnya. Fungsi *telajakan* yang lain adalah pelindung bagi pejalan kaki dan penghuni perumahan yang berbatasan dengan jalan dari polusi akibat lalu lintas kendaraan.
7. Berdasarkan persepsi masyarakat Bali terhadap nilai radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* maka diusulkan agar Pemda Kota membuat kebijaksanaan yang lebih rinci dalam bentuk pengendalian pembangunan (bukan dalam bentuk ruang terbuka). Radius




PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO


## TESIS

PERSEPSI MASYARAKAT BALI TERHADAP  
SISTEM NILAI RUANG TERBUKA TRADISIONAL  
DI KOTA DENPASAR

BENTUK RUANG TERBUKA  
TRADISIONAL YANG SELARAS  
DENGAN TATA NILAI TRI MANDALA

### LEGENDA

 RUANG TERBUKA TRADISIONAL

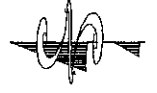
 RUANG TERBANGUN

SYALA PETA

TANPA SEKALA

UTARA

SUMBER:



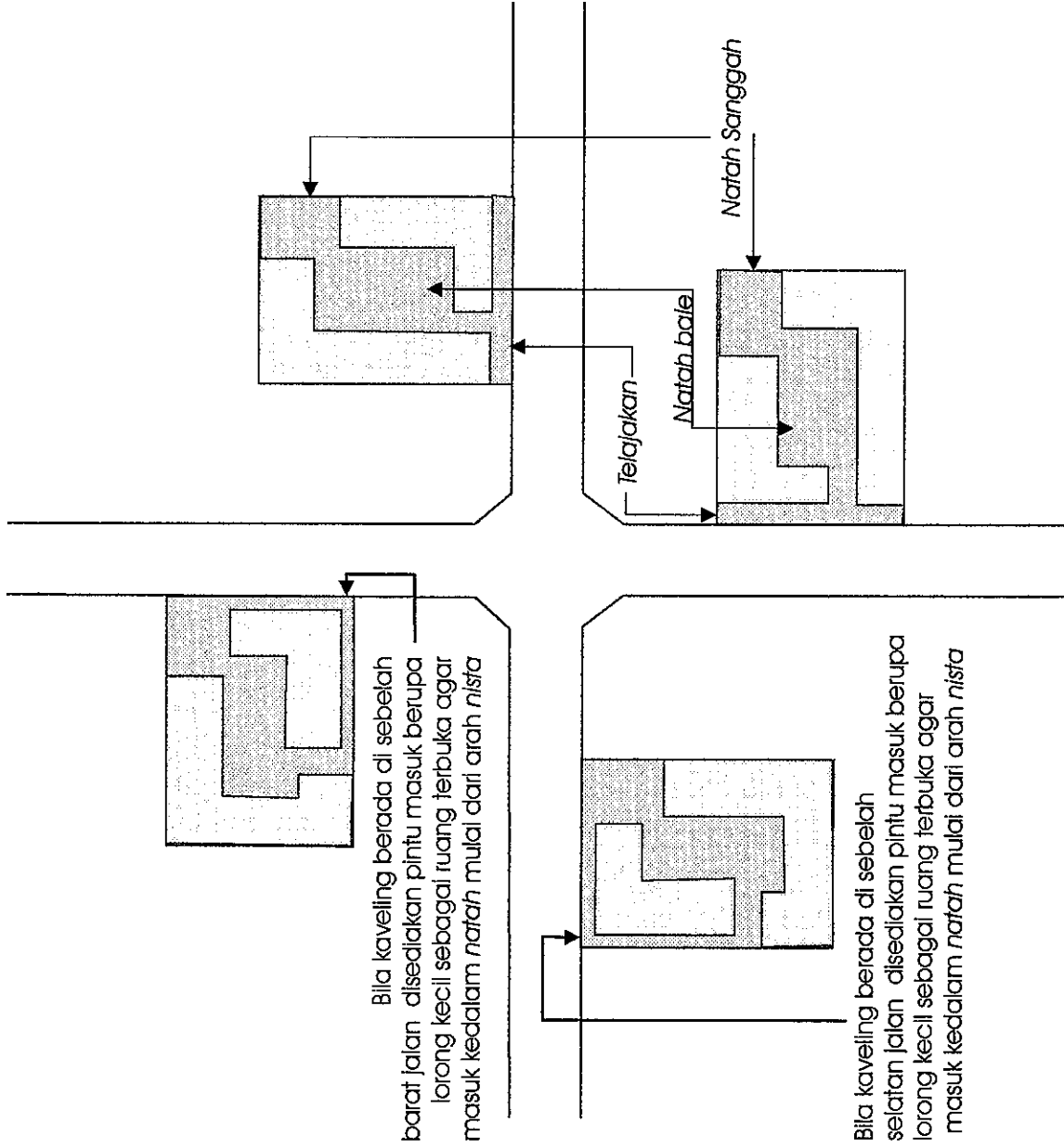
HASIL ANALISIS

NO. PETA

HAL. PETA

5.1

112



kesucian ( 2 km ) dibagi kedalam tiga zona : zona 1 (*utama*), zona 2 (*madya*) dan zona 3 (*nista*). Arahkan pembangunan pada masing-masing zona adalah :

- Pada zona 1 (radius 600 meter dari pura) diarahkan untuk bangunan yang terkait dengan kegiatan persembahyangan dan pembinaan umat seperti bangunan : *dharmasala* = tempat penginapan pendeta, *pesamuan* = tempat pertemuan para pendeta, dan *pesraman* = fasilitas pembinaan umat/ sekolah agama, dan permukiman *pengemong pura*
- Pada zona 2 ( zona yang berada pada radius 600 – 1200 meter dari *pura*) diarahkan untuk permukiman *penyungsurung pura*;
- Pada zona 3 ( zona yang berada pada radius 1200 - 2000 meter dari *pura*) diarahkan untuk permukiman *para pamedek*;

Bangunan yang telah ada pada masing-masing zona, yang telah memiliki perijinan lengkap (antara lain : ijin prinsip, ijin lokasi, IMB, HO ) dapat diberlakukan status quo, namun apabila mengadakan perubahan harus menyesuaikan dengan ketentuan ini. Batas masing-masing zona dilapangan dapat berupa fisik alami seperti sungai dan batas non alami seperti jalan; hal ini memerlukan adanya penelitian khusus.

8. Penataan alun-alun yang mengakomodasi nilai-nilai tradisional dan non tradisional memerlukan penelitian yang lebih mendalam terutama kajian terhadap persepsi pengunjung dalam penataan alun-alun.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Dharmayuda, I Made Suasthawa. 2001. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Denpasar : Upada Sastra.
- Eckbo, Garrett. 1950. *Landscape For Living*. USA : F.W Dodge Corporation.
- Gelebet, I Nyoman. 1984. *Pengaruh Teknologi Pada Pemukiman Tradisional*. Denpasar: Fakultas Teknik Universitas Udayana.
- Hester, Randolph T. 1984. *Planning Neighborhood Space, with People*. New York : Van Nostrand Renhold Company.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moughtin, Cliff. 1996. *Urban Design Green Dimensions*. Bath : Bath Press.
- Nasution, S. 1994. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi akasara.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Oka Netra, Anak Agung Gde. 1994. *Tuntunan Dasar Agama Hindu*. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.
- Rapoport. 1969. *House Form and Culture*. Engglewood Cliffs : Prentice-Hall
- Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. New York : Van Nostrand Renhold Company.
- Smith, Hebert. H. 1982 . *The Citizen's Guide to Zoning*. Washington, DC : Planners Press American Planning Assosiation.
- Sullivan, Arthur.M. 1990. *Urban Economics*. Boston : Richard D. Irwin .
- Simonds, John Ormsbee. 1961. *Landscape Architecture*. New York : Mc Graw-Hill Book Company.
- Sujana. 1996. *Metoda Statistika*. Bandung : Tarsito
- Turner, Tom. 1996. *City As Landscape, A Post Modern View Design And Planning*. London : E & FN Spon.
- Trieb, Marc. 1989. *Modern Landscape Architecture*. London : MIT Press
- Walgito, Bimo. 2001. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Andi
- Warpani, Suwardjoko. 1983. *Analisis Kota & Daerah*. Bandung : Penerbit ITB.
- Wiryomartono, A. Bagoes P. 1995. *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Budihardjo, Eko dan Sujarto, Djoko. 1999. *Kota Berkelanjutan*. Bandung : Penerbit

- Garvin, Alexander & Berens, Gayle. 1997. *Urban Parks and Open Space*. Washington DC : ULI-the Urban Land Institute.
- Hall, Peter and Pfeiffe, Ulrich. 2000. *Urban Future 21 A Global Agenda for Twenty-First Century Cities*. London : E & FN Spon.
- Mertes, James D and Hall, James R. 1995. *Park, Recreation, Open Space and Greenway Guidelines*. Texas : Nastional Recreation and Park Association.
- Rapuano, Michael Pirone & Wigginton, Brooks E. 1964. *Open Space in Urban Design*. Ohio : The Cleveland Developmen Foundation.
- Sujana, I Made & Susila, I Nyoman. 2000. *Manggala Upacara*. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Yeates, Maurice and Barry J. Garner. 1980. *The North American City*. Third Edition. San Fransisco : Harper & Row
- Carr, Stephen et al. 1992. *Public Space*. Australia : Press Syndicate University of Cambrige.
- Gelebet, I Nyoman et al. 1985 . *Arsitektur Tradisional Daerah Bali*. Denpasar : Kantor Wilayah Departeman Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali.
- Kaiser, Edward J. et al. 1995. *Urban Land Use Planning*. Urbana and Chicago : University of Illionis Press.
- Wrede, Stuart and Adams, William Howard eds.1988. *Denatured Visions Landscape and Culture in the Twentieth Century*. New York : Harry and Abrams.
- Bidja, I Made (ed.). 2000. *Asta Kosala-Kosali/Asta Bumi*. Denpasar : Percetakan Offset BP.
- Gambar, I Made (ed.). 2001. *Asta Bumi*. Denpasar : Pusat Dokumentasi Kebudayaan.
- Ashihara, Yoshinobu terjemahan S.Gunadi. 1974. *Merencana Ruang Luar*. Surabaya : Fakultas Teknik Arsitektur.
- C.Branch, Melville. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar & Penjelasan*. Terjemahan Bambang Hari Wibisono. Yogyakarta : Gajah mada University Press.

## ARTIKEL

- Gomudha, I Wayan. 1999. *Pernik-Pernik Spasial Hunian Arsitektur Tradisional Bali. Ngawangun Ki Nusantara, Wacana Teori Arsitektur*. Bandung : Penerbit UNPAR.
- Mussadun. 2000. *Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang : Ditinjau dari Undang-Undang No.24 Tahun 1992.*” *Tata Loka* Vol 5, April 2000, hal. 61 - 65.
- Tjahyati, Budhy. 2000. ”Pembangunan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah”. Makalah Stadium General Bagi Mahasiswa Planologi TA 2000/2001

## TESIS

Adhika, I Made, 1994. "Peran Banjar Dalam Penataan Komunitas. Studi kasus Kota Denpasar". Tesis Program S2 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Pascasarjana Institut Teknologi Bandung.

Anindya Putra, I Gusti Putu. 1991. "Kajian Kearah Pendekatan Konsep Ruang Tradisional Bali Dalam Penataan Ruang Kota dan Penelusuran Syarat-syarat Ruang dari masyarakat Sebagai Landasan Perwujudan Ruang kota Berwawasan Identitas Studi Kasus Kota Gianyar". Tesis Program S2 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Pascasarjana Institut Teknologi Bandung.

Meganada, I Wayan. 1990. "Pola Tata Ruang Arsitektur Tradisional Dalam Perumahan KPR-BTN di Bali". Tesis S2 Jurusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung.

Suanendri, Ni Made. 2000. "Eksistensi Rumah Bali Sebagai Basis Ekonomi Rumah Tangga". Tesis Program Pascasarjana Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

## HASIL PENELITIAN

Putra, I Gusti Made et al. 1987. *Pengaruh Pariwisata Dalam Perkembangan Bangunan Perumahan Tradisional Bali di Desa Bualu*. Denpasar : Universitas Udayana.

*Pengembangan Arsitektur Tradisional Bali Untuk Kesenjangan Alam Lingkungan, Sikap Hidup, Tradisi, dan Teknologi*. 1982. Denpasar : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Bali.

*Penyusunan Rencana Umum Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali*. 1989. Denpasar : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Widiastuti et al. 1996. *Pola Perubahan Pempatan Agung Akibat Perkembangan Kota (Kasus Studi Pusat Kota-kota di Bali)*. Denpasar : Universitas Udayana.

## BUKU DATA/LAPORAN

*Data Bali Membangun Tahun 1999*. 1998. Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Bali  
Denpasar : Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Bali

*Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan*. 1988. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.

*Rencana Umum Tata Ruang Kota Denpasar*. 1999. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. Denpasar : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.

*Urbanisasi di Indonesia*. 1996. Biro Pusat Statistik . Jakarta : Biro Pusat Statistik